

**KONSEP *KHILAFAH* DAN *JIHAD*  
DALAM KONSTELASI PEMBELAJARAN  
FIQIH POLITIK ISLAM  
(Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran  
Fiqih MA se-Kabupaten Kudus)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam



Oleh :  
**FADILA ARIFATUL FARDAH**  
NIM : 1603016108

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**



## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadila Arifatul Fardah  
NIM : 1603016108  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**"Konsep Khilafah dan Jihad dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam (Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqih MA se-Kabupaten Kudus)"**

Secara keseluruhan adalah penemuan/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dikutip sumbernya.

Semarang, 23 Juni 2020

Pembuat Pernyataan,



Fadila Arifatul Fardah  
NIM : 1603016108

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
Jl. Prof. Hamka (Kampus 2), Ngaliyan, Semarang 50185, Indonesia  
Telp. 024-7601295 Fax. 7615387

## PENGESAHAN

Naskah skripsi yang ditulis :

Judul : **Konsep *Khilafah* dan *Jihad* dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam (Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqih MA se-Kabupaten Kudus)**  
Penulis : Fadila Arifatul Fardah  
NIM : 1603016108  
Program Studi : S.1 Pendidikan Agama Islam  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh dewan penguji fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Sarjana dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam.

Semarang, 3 Juli 2020

### DEWAN PENGUJI

Ketua/Penguji I,

**Dr. Fihris, M.Ag.**  
NIP: 197711302007012024

Penguji III,

**Hj. Nur Asiyah, M.Si.**  
NIP: 197109261998032002



Sekretaris/Penguji II,

**Agus Khumaifi, M.Ag.**  
NIP: 197602262005011004

Penguji IV,

**Luthfiyah, S.Ag., M.Si.**  
NIP: 197904222007102001

Pembimbing,

**H. Ahmad Muthohar, M.Ag.**  
NIP: 196911071996031001



## NOTA DINAS

### NOTA DINAS MUNAQASYAH SKRIPSI

Semarang, 23 Juni 2020

Kepada  
Yth. Dekan FITK UIN Walisongo  
c.q. Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang ditulis oleh:

Nama lengkap	: Fadila Arifatul Fardah
NIM	: 1603016108
Semester ke-	: Delapan
Program Studi	: S.1 Pendidikan Agama Islam
Judul	: Konsep <i>Khalifah</i> dan <i>Jihad</i> dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam (Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqih MA se-Kabupaten Kudus)

Saya memandang bahwa skripsi tersebut sudah layak dan dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi.

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing,



**H. Ahmad Mathohar, M.Ag.**  
NIP. 196911071996031001

## ABSTRAK

Judul : **“Konsep *Khilafah* dan *Jihad* dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam (Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqih MA Se-Kabupaten Kudus)”**

Penulis : Fadila Arifatul Fardah

NIM : 1603016108

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan; 1) Bagaimana Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqih MA tentang Konsep *Khilafah* dan *Jihad* dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam? 2) Bagaimana Metode yang Diterapkan oleh Guru Ketika Menyampaikan Materi tentang Konsep *Khilafah* dan *Jihad* dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut; jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat eksploratif. Lokasi penelitiannya di Kota Kudus, dan menggunakan pendekatan fenomenologis. Datanya diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa menurut guru mapel Fiqih MA di Kabupaten Kudus *khilafah* merupakan sebuah sistem pemerintahan yang pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam sehingga sistem *khilafah* tersebut tidak pas untuk diterapkan di Indonesia dan sudah tidak relevan untuk kondisi di masa sekarang. Menurut guru Fiqih, alasan ketidak cocokannya dikarenakan tidak adanya dalil Al-qur'an maupun Hadits yang mewajibkan untuk mendirikan *khilafah*, meskipun jika dilihat dari sudut pandang yang lain dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah mengikuti

dasar yang ada dalam *khilafah*. Hal tersebut dibuktikan dari kelima sila dalam Pancasila yang sama dengan isi dari dasar negara dengan sistem *khilafah*, akan tetapi dalam hal ini hanya bisa diberlakukan dikalangan umat Islam saja padahal Indonesia sendiri adalah negara yang mengakui enam agama, maka jika diterapkan secara keseluruhan dalam satu negara, akan merubah semua tatanan yang ada dalam negara, dan tentunya akan menyebabkan adanya kekacauan, perpecahan dan pertengkaratan antar warga Indonesia. Sedangkan tentang konsep *jihad*, diartikan sebagai berjuang, bersungguh-sungguh dalam segala hal. Guru Fiqih mengidentifikasi makna *jihad* secara umum maupun khusus. Adapun secara umum yaitu setiap usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dalam rangka melaksanakan, membela, memperjuangkan agama Islam serta menegakkan kalimat Allah SWT. Contohnya, belajar untuk memberantas kebodohan, bekerja untuk memberantas kemiskinan dan beribadah untuk memberantas kemaksiatan. Sedangkan secara khusus yaitu *jihad qital*, *jihad* dengan peperangan, berjuang dengan kekerasan. Para guru Fiqih memandang mereka yang hanya mengartikan *jihad* sekadar dengan peperangan maka mereka termasuk golongan orang-orang yang dangkal akan pengetahuan agama dan fanatik pada satu sumber saja.

Demikian halnya dalam proses pembelajaran Fiqih, metode yang dipilih yaitu mauidhoh hasanah atau ceramah. Guru yang menjadi objek utama dalam kegiatan pembelajaran dikarenakan materi ini sangat rentan disalahpahami dan jika kegiatan belajar mengajarnya berpusat pada siswa nantinya malah akan menimbulkan dampak buruk untuk siswa. Beberapa narasumber juga memberikan himbauan diawal proses pembelajaran seperti jangan sampai terpengaruh dengan kelompok radikal, perbanyak pengetahuan agama agar tidak mudah terdoktrin



dan lain sebagainya. Untuk evaluasinya, para guru menggunakan tes tertulis baik melalui ulangan harian pada setiap bab, penugasan maupun ketika ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf arab-latin dalam skripsi ini berpedoman pada SK menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

Huruf Hijaiyah	Huruf Latin	Huruf Hijaiyah	Huruf Latin
ا	a	ط	t ṭ
ب	b	ظ	z ṭ
ت	t	ع	‘
ث	s	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	”
ص	s ṭ	ي	Y
ض	d ṭ		

### Bacaan Madd :      Bacaan Diftong :

ā = a panjang

وا = au

ī = i panjang

يا = ai

ū = u panjang

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillahirabbil Aalamiin, segala puji bagi Allah atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membawa risalah untuk membimbing manusia dari kebodohan menuju jalan yang terang. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau di dunia dan di akhirat. Amiin.

Penelitian skripsi yang berjudul “Konsep *khilafah* dan *jihad* dalam konstelasi pembelajaran Fiqih Politik Islam (Studi atas persepsi guru Fiqih MA se-Kabupaten Kudus)” ini merupakan sebuah hasil karya ilmiah yang menjadi syarat untuk mencapai gelar sarjana (S.1) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang. Adapun dalam menyelesaikan buah karya ini, penulis mengalami beberapa kendala dan hambatan yang pada akhirnya semuanya mampu penulis hadapi dengan bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak yang membantu dalam penyelesaiannya sampai akhir.

Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, pengarahan serta bimbingan baik secara moril maupun materiil. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag.

2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang, Dr. Hj. Lift Anis Ma'shumah, M. Ag yang telah memberi kesempatan kepada penulis menempuh studi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo Semarang, Bapak H. Musthofa, M.Ag.
4. Sekertaris Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo Semarang Ibu Dr. Fihris, M.SI.
5. Dosen Pembimbing Bapak H. Ahmad Muthohar, M.Ag. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang.
7. Dosen Wali Studi Ibu Lutfiyah, M.SI. Yang telah memberikan saran dan arahan dalam perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Narasumber yaitu Guru Fiqih MA di Kabupaten Kudus yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk diwawancarai.
9. Kedua orang tua, Bapak Mohammad Rifki dan Ibu Sri Anah serta kakak tercinta Muhammad Fahmi Riza yang tak pernah berhenti mendoakan, memberikan motivasi dan nasihatnya sehingga dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan kemudahan.
10. Sepupu rasa sahabat, dek ulya, mbak lia, dan mbak ifah yang selalu peduli, menasihati, menyemangati dan selalu mendoakan.
11. Muhammad Ihya Ulumuddin yang selalu memotivasi, membantu dalam memberikan pemahaman, tak henti-

- hentinya memberi semangat, menghibur dan tentunya selalu mendoakan.
12. Terkhusus sahabatku Elizza Nuriyana, Firda Handita, Dita Khoirun, Alifiana Ridlo Alhayyu, Novi Laila Athiyah, Afifah dan Alma Nur Fauziah yang selalu memberi semangat untuk berjuang bersama menyelesaikan skripsi.
  13. Teman-teman PAI C 2016 yang selama ini bersama-sama menuntut ilmu dalam bangku perkuliahan dan juga saling memberi semangat satu sama lain.
  14. Keluarga 4 tahun di kontrakan perumahan bank niaga blok C4, Naili, Risma, Wilan, Hanum, Meila, Izza, Dita, mbak Afin, Cisa, Siddah, mbak Mila, mbak Dewi dan Ayuk yang selalu menghibur dikala lelah, saling mendoakan, memberi semangat dan dukungan yang tak pernah berhenti.
  15. Teman-teman PPL di SMK N 7 Semarang, Ujang, bella, Alma, Ambar, Fifi, Novi, Wahyu, Wiwin, dan Kholis sekaligus murid-murid kelas X TFM 1, X TKGSP 2, X TEDK 2, X TMPO 2, X TTL 1, X TKJIJ 1, XII TME 2, dan XII TFM 1 yang tak pernah berhenti mendoakan dan memberi semangat serta teman-teman KKN 2016 di desa Pledokan, Eka, Aini, Cahya, Azizah, Ahul, Amrul, Uswah, Dewi, Laili, Afif, Mas Ulil, Eis, Afifah, dan mbak Haula yang menjadi teman bertukar pikiran terkait masalah penelitian.
  16. Semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis tidak dapat memberikan sesuatu yang berharga, hanya do'a yang dapat penulis panjatkan semoga Allah swt menerima amal baik mereka, serta membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Amiin.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam sistematika penulisan, penyusunan kata, referensi, dan beberapa aspek inti di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang mendukung sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis secara khusus dan umumnya bagi para pembaca semuanya. Amiin.

Semarang, 26 Juni 2020  
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fadila Arifatul Fardah', with a stylized flourish at the end.

Fadila Arifatul Fardah  
NIM.1603016108

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
A. Deskripsi Teori.....	12
B. Kajian Pustaka Relevan.....	85
C. Kerangka Berpikir .....	90
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>94</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	94
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	95
C. Sumber Data.....	96
D. Fokus Penelitian .....	98
E. Teknik Pengumpulan Data .....	99
F. Uji Keabsahan Data.....	102
G. Teknik Analisis Data.....	103

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>107</b>
A. Deskripsi Data Konsep <i>Khilafah</i> dan <i>Jihad</i> dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam .....	107
B. Analisis Konsep <i>Khilafah</i> dan <i>Jihad</i> dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam .....	135
C. Keterbatasan Penulis .....	163
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>165</b>
A. Kesimpulan .....	165
B. Saran .....	168
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persoalan klasik yang kontroversial di kalangan cendekiawan ataupun masyarakat awam, khususnya di internal kelompok Islam adalah tentang Isu penegakan *khilafah* yang hampir tidak pernah berhenti diperdebatkan sejak zaman sepeninggal Rasulullah SAW sampai kekhalifahan Turki Usmani. Ide pembentukan kembali negara *khilafah* yang diprakarsai oleh Hasan al-Banna dengan mendirikan *ikhwanul muslimin* pada tahun 1928. Namun gerakan tersebut ditentang oleh penguasa-penguasa bahkan di negara-negara Islam sendiri. Gerakan tersebut kemudian menyebar ke seluruh negeri tak terkecuali Indonesia, Seperti belakangan ini wacana sistem *khilafah* kembali dimunculkan di Indonesia karena bagi mereka yang tanpa pengetahuan memadai tentang konsep dan praktik “*khilafah*” sebagaimana yang terjadi sejak zaman *khulafa al-rasyidin* dan setelahnya dengan serta merta mempersepsikan atau bahkan meyakini “*khilafah*” sebagai sistem, bentuk dan praksis politik Islam paling shohih, paling ideal, dan terbaik yang perlu diperjuangkan terus menerus. Misalnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai salah satu gerakan

politik Islam yang beraliran kanan, dengan menyusung sebuah ideologi khilafahnya yang mereka yakini akan kembali tegak di muka bumi. Bagi mereka *khilafah islamiyah* akan menggantikan ideologi yang ada di Indonesia yakni Pancasila dengan harapan nilai-nilai Islam dapat diterapkan dengan sempurna, dan mungkin menjadi alternatif terbaik untuk menggantikan demokrasi di Indonesia. Juru bicara HTI, Burhanuddin Muhtadi, menyebutkan tiga alasan mengapa HT meyakini bahwa pendirian *khilafah* adalah wajib bagi umat Islam, *pertama*, alasan normatif berupa perintah dari Allah seperti tersebut dalam Al-Qur'an, padahal mereka hanya menyandarkan tanpa mengkaji terlebih dahulu pesan dari sebuah ayat.<sup>1</sup> *Kedua*, alasan historis, yakni eksistensi sistem ini sejak meninggalnya Rasulullah. *Ketiga*, alasan faktual berupa kondisi umat Islam yang terpecah belah tanpa *khilafah*, sehingga mudah diadu domba dan ditindas oleh kelompok lain. Padahal jika menengok dalam sejarahnya, *Khilafah* itu hampir tak pernah sesempurna yang dibayangkan. Selain ketiga alasan tersebut, ada juga alasan yang berkaitan dengan bidang pendidikan di Indonesia yaitu adanya kurikulum dan metode operasional pendidikan yang dibangun di atas

---

<sup>1</sup> Makmun Rasyid, *Gagal-Paham Khilafah*. (Tangerang : Pustaka compass, 2016), hlm. 2.

fondasi yang telah diletakkan oleh para penjajah Barat, yang akibatnya produk-produk pendidikan dari lembaga-lembaga tersebut mempersepsikan Islam seperti yang diharapkan oleh orang kafir, lembaga pendidikannya menjadi pemegang dan penyebar kurikulum penjajah Barat. Aplikasi kurikulum pendidikan dari penjajah kafir yang kontinyu, akan menjadikan mayoritas pemuda lulusannya bergerak ke arah yang berlawanan dengan Islam. Maka dari itulah mereka disadarkan untuk menegakkan *khilafah*.<sup>2</sup>

Sebaliknya banyak pihak yang kontra dengan gagasan kelompok HTI, salah satunya alasan yang dilontarkan oleh Wakil Presiden Indonesia, KH Ma'ruf Amin menilai :

*Khilafah* tidak bisa diterapkan di Indonesia. Dengan penduduk yang sangat majemuk. Fahaman ini akan tertolak otomatis. Jika dipaksakan akan berpotensi terjadi benturan / perang saudara. Paham Islam di Indonesia sudah termasuk paham yang sempurna atau *kaffah*, menurut ruang dan waktunya. Karena di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai agama dan suku bangsa yang berbeda, sehingga tidak bisa diterapkan sistem syariat Islam atau *khilafah*. Indonesia mempunyai dasar negara Pancasila yang sudah menjadi ideologi yang tepat untuk diterapkan di bumi pertiwi ini, jika tetap dipaksakan menerapkan *khilafah* maka akan terjadi benturan sosial yang berpotensi terjadinya perang saudara, sebagaimana

---

<sup>2</sup> Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI*, (Yogyakarta : Lkis Pelangi Aksara, 2015), hlm. 109.

perang yang terjadi di sejumlah negara arab akibat pemaksaan paham dalam bernegara. Memang ada beberapa negara Arab yang menggunakan paham *khilafah* namun kondisi sosial masyarakat Indonesia berbeda jauh dengan negara Arab yang memiliki suku yang sama dan lebih cocok diterapkan *khilafah*” ujarnya.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Presiden Indonesia, salah satu ormas Islam yang bisa dikatakan cukup besar pengikutnya, Nahdlotul Ulama (NU) juga berpendapat demikian. Inti dari Musyawarah Nasional Alim Ulama pada tahun 2014, NU mengatakan bahwa NKRI adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini, maka dari itu jika muncul gerakan yang mengancam keutuhan NKRI (pembentukan *khilafah*) wajib ditangkal, sebab akan menimbulkan mafsadah yang besar dan perpecahan umat.<sup>4</sup>

Seperti halnya konsep *khilafah* yang mengandung kontroversi di Indonesia, konsep *jihad* juga demikian sering disalahpahami baik dari kaum muslim maupun kalangan non muslim. *Jihad* merupakan terminologi Islam yang paling banyak “didzalimi”. Ia sering dipersepsikan sebagai perang dan kekerasan padahal ia

---

<sup>3</sup> Ardian Fanani, “Ma’ruf Amin Nilai Khilafah Tak Cocok di Indonesia, Ini Alasannya” DetikNews, Rabu, 31 Oktober 2018 pukul. 18.39

<sup>4</sup> Komaruddin Hidayat (ed), *Kontroversi Khilafah Islam, Negara, dan Pancasila*, (Bandung : Mizan, 2014), hlm. 149-150.

lebih luas daripada sekedar perang. Persepsi inilah yang menjadi kiblat Imam Samudra dan kawan-kawan yang mengartikan *jihad* secara sempit sebagai perang atau *qital* untuk menegakkan Islam dan menyebarkan Islam kepada kaum kafir.<sup>5</sup> Salah satu hasil dari persepsi yang salah oleh Imam Samudra dan kawan-kawan dalam kelompok Radikalnya yaitu *Jama'ah Islamiyah* (JI), merekalah dalang utama dalam kasus-kasus terorisme seperti Bom Bali tahun 2002, mereka mengatasnamakan aksinya dengan *jihad*. Padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip *jihad* yang diajarkan dalam Islam karena aksi yang dilakukan itu akan menyebabkan terbunuhnya banyak orang yang notabene tidak mengetahui apapun urusan kelompok-kelompok tersebut. Padahal dalam Al-Qur'an jelas melarang tentang aksi bunuh diri maupun membunuh orang lain. Maka dari itu, aksi bom bunuh diri sama sekali tidak bisa diatasnamakan dengan *jihad*. Memang *jihad* pada masa Rasulullah diartikan sebagai perang, yaitu perang melawan kaum musyrikin. Akan tetapi bukan hanya sekedar perang, macam *jihad* yang lain yaitu keteguhan Rasulullah dan sahabat dalam mempertahankan kebenaran, kesabaran dan ketekunan mereka dalam memahami alqur'an dan

---

<sup>5</sup> Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris !*, (Solo : Jazera, 2004), hlm. 108.

menerapkan hukum-hukum.<sup>6</sup> Itulah makna *jihad* yang sebenarnya harus dipahami di zaman kontemporer ini. Selain JI, masih banyak kelompok-kelompok Islam Jihadi di Indonesia, terkhusus yang radikal beberapa diantaranya, *Jama'ah Anshar al-Tauhid* (JAT) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).<sup>7</sup>

Demikian maraknya prokontra yang terjadi tentang *khilafah* dan *jihad* dalam segala bidang di Indonesia, tak terkecuali pendidikan. Dalam dunia pendidikan, guru terutama guru Pendidikan Agama Islam adalah profesi mengajar ilmu agama dimana seseorang menanamkan nilai-nilai kebajikan ke dalam jiwa manusia serta merupakan salah satu komponen pendidikan yang dituntut untuk mempunyai kompetensi sesuai dengan tugasnya. Adapun yang berkaitan dengan penelitian ini, Diantaranya Kompetensi yang ada dalam UU pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>8</sup> Kompetensi profesional yang paling menentukan keberhasilan pembelajaran, karena kompetensi ini

---

<sup>6</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Fiqh Jihad*, (Libanon : Pustaka An-Nabaa', 1993), hlm. 3.

<sup>7</sup> Anthin Lathifah, *Geneologi Fiqh Jihad*, (Semarang : Dibiayai dengan anggaran DIPa IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 56

<sup>8</sup> Wahidmurni,dkk, *Evaluasi Pembelajaran Kompetensi dan Praktik*, (Yogyakarta : Nuha Lite ra, 2018), hlm. 4.

menuntut guru untuk menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu dalam hal ini tentang konsep *khilafah* dan *jihad*, sehingga secara efektif tujuan pembelajaran akan tercapai. Karena kebanyakan guru yang gagal mengantarkan siswa mencapai KKM hampir selalu berawal dari kurang menguasai materi pelajaran yang diampu. Selain itu, kurikulum PAI beserta standar isi dan kompetensinya sangat dipengaruhi oleh kecenderungan paham yang diajarkan oleh para guru kepada para siswa. Oleh karenanya, guru dituntut dapat mengajarkan Islam dengan cara yang tidak mendorong peserta didik untuk menjadi radikal. <sup>9</sup>Akan tetapi tidak cukup hanya menguasai materi, guru juga harus bisa mentransformasikannya dengan metode yang menarik dan tidak membosankan. Artinya, guru harus menggunakan metode yang bisa membuat siswa aktif sehingga mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran.

Salah satu pengaruh maraknya pembicaraan tentang *khilafah* dan *jihad* dalam dunia pendidikan yaitu terlihat pada awal bulan Desember 2019 Menteri Agama, Fachrul Razi mewacanakan akan menghapus kedua materi tersebut karena materi tersebut dalam kurikulum mata

---

<sup>9</sup> Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 252

pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah karena dinilai akan membuat pikiran siswa menjadi rancu, meski pada akhirnya kedua materi tersebut hanya dipindahkan dari mata pelajaran Fiqih ke mata pelajaran Sejarah Islam. Dikarenakan adanya prokontra di kalangan guru agama. Ada yang berpendapat bahwa rancu tidaknya pikiran siswa tidak dipengaruhi secara penuh oleh materi pelajaran, akan tetapi bergantung pada kompetensi profesional yaitu kemampuan guru dalam menguasai materi yang diajarkan dan kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru dalam mengendalikan proses pembelajaran .

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis ingin meneliti tentang persepsi guru agama khususnya guru mata pelajaran Fiqih MA se-Kabupaten Kudus mengenai konsep *khilafah* dan *Jihad*, karena melalui persepsi akan diketahui seberapa dalam guru memahami dan mengetahui tentang materi yang diampunya. Melalui pengetahuan yang dimiliki guru, menjadi salah satu faktor penentu ketercapaiannya *transfer of knowledge* serta mengetahui kualitas pemahaman siswa akan materi tersebut. Maka penulis mengajukan skripsi ini dengan judul “Konsep *Khilafah* dan *Jihad* dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam (Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqih MA se-Kabupaten Kudus)”.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana persepsi guru mapel Fiqih MA se-Kabupaten Kudus tentang konsep *khilafah* dan *jihad* ?
2. Bagaimana metode yang diterapkan oleh guru dalam menyampaikan materi tentang konsep *khilafah* dan *jihad* dalam konstelasi pembelajaran Fiqih Politik Islam ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang diuraikan, maka tujuan penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui persepsi guru mata pelajaran Fiqih MA se-Kabupaten Kudus tentang konsep *khilafah* dan *jihad*.
- b. Untuk mengetahui metode yang diterapkan oleh guru dalam menyampaikan materi tentang konsep *khilafah* dan *jihad* dalam konstelasi pembelajaran Fiqih Politik Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan

terutama pada penelitian sekolah. Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini, antara lain :

**a. Manfaat Teoritis:**

- 1) Adanya kajian ilmiah terkait persepsi guru mata pelajaran Fiqih tentang konsep *khilafah* dan *jihad*.
- 2) Menghasilkan temuan substantif maupun formal, sehingga menambah wacana baru dalam tataran pembelajaran Fiqih Politik Islam tentang konsep *khilafah* dan *jihad* .
- 3) Memberikan informasi profetik terkait pembelajaran Fiqih Politik Islam tentang konsep *khilafah* dan *jihad*.

**b. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi guru mapel Fiqih, diharapkan menjadi bahan wacana untuk menumbuhkan motivasi dalam meningkatkan kompetensi profesional.
- 2) Bagi siswa, terhindar dari kesalahpahaman akan materi yang disampaikan oleh guru, dan tentunya siswa lebih mudah paham tentang

konsep *khilafah* dan *jihad* dalam konstelasi pembelajaran Fiqih Politik Islam.

- 3) Bagi pengelola program studi Pendidikan Agama Islam di UIN Walisongo Semarang, diharapkan sebagai bahan kajian dan sebagai wacana untuk mempersiapkan bekal keilmuan calon guru PAI agar kelak mampu memahami pembelajaran Fiqih Politik Islam tentang konsep *khilafah* dan *jihad*.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Tinjauan Tentang Fiqih Politik Islam (*Fiqh Siyasah*)**

###### **a. Pengertian Fiqih Politik Islam (*Fiqh Siyasah*)**

*Fiqh* merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang ada di Madrasah Aliyah dan menekankan pada kemampuan menganalisa serta mencerna hukum-hukum Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Secara bahasa kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan* artinya “faham yang mendalam”. Kata *fuqaha* diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali. *Fiqh* merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam, karena *Fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan

perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Ruang lingkup *Fiqh* mencakup beberapa aspek antara lain *Fiqh Ibadah* dan *Fiqh Muamalah*. Adapun *Fiqh Muamalah* masih dibagi menjadi beberapa, salah satunya yaitu *Fiqh Siyasah* dimana merupakan bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.

Ada beberapa pendapat mengenai asal kata *siyasah* di kalangan ahli *Fiqh* sebagai berikut :

- 1) Dianut al-Maqrizy yang menyatakan *siyasah* berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat ini didasarkan pada sebuah kitab UU milik Jengis Khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- 2) Dari Ibn Taghri Birdi, *Siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Kata *si* dalam bahasa

Persia artinya 30. Sedangkan *yasa* merupakan kosakata bahasa Turki dan Mongol yang berarti Larangan, tetapi bisa juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.

- 3) Dan Ibnu Manzhur juga menyatakan *siyasah* berasal dari bahasa Arab yakni bentuk *mashdar* dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara atau melatih binatang khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda, dalam bahasa Arab disebut *sa'is*.

Semakin berkembangnya zaman, juga semakin berkembang makna *siyasah*. Ketika masa khalifah Umar bin Khattab dan Dinasti Umayyah serta Abbasyiah, *siyasah* berarti cara menjalankan pemerintahan atau keahlian dan keterampilan memerintah. Selain itu makna *siyasah* secara terminologis menurut Abu al-Wafa Ibn 'aqil adalah tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat dengan kemaslahatan dan jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan

wahyu untuk mengaturnya.<sup>10</sup> Abdul Wahab Khallaf juga mendefinisikannya secara terminologis bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ilmu *Fiqh Siyasah* sering disinonimkan dengan ilmu *siyasah syar'iyah* yang didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf sebagai ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis, maka dapat ditarik benang merah bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan

---

<sup>10</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Damascus : Dar al-Qalam, 2007), hlm. 109.

yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.<sup>11</sup>

Objek kajian *Fiqh Siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Secara garis besar maka objeknya menjadi, *pertama*, peraturan dan perundang – undangan,

---

<sup>11</sup> Mujaar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Erlangga, 2008), hlm. 5-11.



*kedua*, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan *ketiga*, hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.<sup>12</sup>

#### **b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah***

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ruang lingkup *Fiqh Siyasah*, diantaranya menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang sebagai berikut :

- 1) *Siyasah Dusturiyah* (peraturan perundang-undangan)
- 2) *Siyasah Malliyah* (ekonomi dan moneter)
- 3) *Ssiyasah Qadha'iyah* (peradilan)
- 4) *Siyasah Harbiyah* (hukum perang)
- 5) *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi negara)

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada QS. An-Nisa : 58-59

---

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 30.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا  
 وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
 بَصِيرًا ﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ  
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ  
 تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ  
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ  
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S.an-Nisa'/4: 58-59 ).<sup>13</sup>

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat ke 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib maentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.<sup>14</sup> Dan dalam kitabnya tersebut Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut :

- 1) *Siyasah Qadha'iyah*
- 2) *Siyasah 'Idariyyah*
- 3) *Siyasah Malliyah*
- 4) *Siyasah Dauliyah.*

Sementara Abdul Wahhab Khallaf menyempitkan lagi menjadi tiga kajian yaitu sebagai berikut:

- 1) *Siyasah Qadla'iyah* (peradilan)

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 87.

<sup>14</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyat di Islah al-Ra'iyat*, (Beirut : dar Al-Kutub al-Arabiyyat, 1996), hlm. 4.

- 2) *Siyasah Dauliyyah* (hubungan internasional)
- 3) *Siyasah Malliyah* (keuangan negara).

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, *Hasbi Ashiddieqy*, menyatakan bahwa objek kajian *fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadhbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadhbiran ini dengan jiwa *syari'ah* yang kita peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan *syari'ah* amah yang tetap.<sup>15</sup> Dan beliau membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu :

- 1) *Siyasah            Dusturiyah            Syar'iyyah*  
(kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- 2) *Siyasah            Tasyri'iyyah            Syar'iyyah*  
(kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- 3) *Siyasah            Qadla'iyyah            Syar'iyyah*  
(kebijaksanaan peradilan)
- 4) *Siyasah            Malliyah            Syar'iyyah*  
(Kebijaksanaan ekonomi dan moneter)

---

<sup>15</sup> Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyyah*, (Yogyakarta :Madah, ), hlm. 28.

- 5) *Siyasah 'Idariyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan administrasi negara)
- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)

Menurut Sayuthi Pulungan *Fiqh Siyasah* dibagi menjadi empat bagian yaitu :

- 1) *Siyasah Dusturiyyah*
- 2) *Siyasah Malliyah*
- 3) *Siyasah Dauliyyah*
- 4) *Siyasah Harbiyyah*

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga pokok bagian yaitu sebagai berikut :

- 1) Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*) yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

- 2) Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) yang mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antar negara muslim dan negara non muslim.
- 3) Politik keuangan dan moneter (*siyasah malliyah*) yang membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>16</sup>

### **c. Sumber dan Pendekatan Kajian *Fiqh Siyasah***

Mengenai Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*, secara garis besar sumber *Fiqh Siyasah* dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber *Fiqh Siyasah* menjadi tiga bagian yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain keduanya, serta sumber-sumber

---

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Selatan : Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13-14.

peninggalan kaum muslimin terdahulu. Ahmad Sukardja mengungkapkan sumbernya berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, *Urf* atau kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pengalaman masa lalu atau aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Semua itu sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, sosial, budaya dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian *Fiqh Siyasah* menjadi sebuah studi yang dinamis antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Seperti halnya subjek utama dalam penelitian ini, yaitu tentang konsep *khilafah* dan *jihād* yang mana sampai sekarang masih berkembang dan menjadi perdebatan disemua kalangan.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa objek kajian *Fiqh Siyasah* adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Dalam suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian *Fiqh Siyasah* tentu memiliki metode dan pendekatan ilmiah. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam kajian *Fiqh*

*Siyasah* tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari Fiqih pada umumnya yaitu metode *ushul Fiqh* dan kaidah-kaidah Fiqih. Diantara metode *ushul fiqh* yaitu *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, *'adah*, *masalah mursalah* dan *istihsab*. Dalam menggunakan metode ini, tidak boleh bertentangan dengan semangat nash al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Karena *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu sosial yang selalu hidup maka pengembangan kajiannya juga harus dibantu dengan metode lainnya seperti metode historis, metode perbandingan, metode analisis isi, metode induktif, metode deduktif, metode observasi, dan metode dialektis. Selain itu, juga perlu ilmu bantu yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu ekonomi, dan tentu saja ilmu politik dan ilmu kenegaraan.<sup>17</sup>

#### **d. Kegunaan Mempelajari *Fiqh Siyasah***

Kajian *fiqh siyasah* mengusahkan atas segala kebutuhan masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat, dan pada gilirannya

---

<sup>17</sup> Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 14-21.



mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang umum atau dalil-dalil yang *kulli*. Selain itu seorang *faqih* /ahli hukum Islam diharapkan mampu memberikan responden menunjukkan jalan keluar dari setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi tanpa harus kehilangan identitasnya. Adapun identitasnya berupa Al-Qur'an dan Hadits Nabi, *maqashid al-syariah*, kaidah-kaidah *fiqhiyah kulliyah*, dan *ruh al-hukum* (semangat ajaran).

Manfaat lain yang dapat dipetik dari mempelajari *fiqh siyasah* antara lain seorang *faqih* yang mendalami *fiqh siyasah* tidak akan bingung ketika menghadapi perbedaan pendapat ulama. Ia dapat mentarjih pendapat ulama-ulama tersebut. Pentarjihannya tidak hanya dilakukan dari segi lafal (*linguistic*) dan nilai suatu dalil (*qath'i*, *dzanny*, *shohih* atau *hasan*) tetapi juga dilakukan dari sisi *siyasah*. Dalam hubungan ini, pendapat mana yang lebih mendekati dalil-dalil *kulli* dan sekaligus lebih sesuai dengan kondisi dan situasi. Singkatnya, penentuan atas pendapat

yang lebih maslahat untuk diterapkan dalam mengindahkan dan merekayasa masyarakat. Selanjutnya, dengan mempelajari *fiqh siyasah* ini, akan terbukti bahwa syariah Islamiyah itu adalah syariah yang alamiah, syariah yang universal, di samping merupakan syariah yang memenuhi tuntutan-tuntutan yang bersifat lokal dan regional.<sup>18</sup>

## **2. Tinjauan Tentang Konsep *Khilafah***

### **a. Pengertian *Khilafah***

Secara bahasa, istilah *khilafah islamiyah* memiliki beberapa pengertian yaitu perwakilan, pergantian, atau jabatan khalifah. Istilah ini sebenarnya berawal dari kata bahasa Arab “khalif” yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa.<sup>19</sup> Tak jarang juga ada yang mengartikan “mengikuti” (*takhallafa*), dan seseorang dikatakan mengikuti jika ia berada di belakang orang lain, mengikuti di belakang orang lain dan menggantikan tempatnya. Tak hanya itu,

---

<sup>18</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 39-43.

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997) Cet. Keempat, h. 361-363.

seseorang dikatakan menggantikan orang lain apabila ia melaksanakan fungsi yang diberikan orang itu kepadanya, baik bersama orang tersebut maupun sesudahnya.<sup>20</sup> Pengertian ini merujuk pada Q.S al-Zuhurf ayat 60 :

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ  
يُخَلِّفُونَ

Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun. (Q.S. al-Zuhurf/43 : 60).<sup>21</sup>

Pengertian *khilafah* yang berlaku di kalangan para ulama disinonimkan dengan istilah *al-imamah* (kepemimpinan), yakni kepemimpinan menyeluruh dalam persoalan yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan duniawi sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW. Sedangkan *imamah* menurut al-Baidhawī seperti dikutip Ali Abdul Raziq adalah “istilah

---

<sup>20</sup> Ali Abdul Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Terj, Afif Muhammad, (Bandung : Pustaka, 1985), hlm. 3.

<sup>21</sup> Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Mujamma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), hlm. 802.

yang berkenaan dengan penggantian fungsi Rasulullah oleh seseorang untuk menjalankan undang-undang syari'ah dan melestarikan ajaran-ajaran agama dalam satu garis yang mesti diikuti oleh umat".<sup>22</sup>

Dalam pandangan kaum muslimin, *khilafah* begitu juga sinonimnya : *imamah*, adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia menggantikan Rasulullah SAW. Senada dengan ini adalah penjelasan al-Baydawi bahwa *imamah* adalah ungkapan tentang penggantian seseorang atau Rasul dalam menjalankan *qanun-qanun syara'* dan menjaga *wilayah* agama, dari sisi wajibnya ia diikuti oleh seluruh umat. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Khaldun, *khilafah* adalah memerintah rakyat sesuai aturan *syara'* demi kebaikan akhirat mereka dan juga kebaikan dunia yang kembali pada kepentingan akhirat. *Khilafah* dengan demikian hakikatnya adalah menggantikan pembuat *syara'* dalam menjaga agama dan politik dunia.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ali Abdul ar-Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Terj, Afif Muhammad, (Bandung : Pustaka, 1985), hlm. 4.

<sup>23</sup> Ali Abdul ar-Raziq, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan*, (Yogyakarta : Jendela, 2002), hlm. 4-5.

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Isma'il bin Yusuf an-Nabhani<sup>24</sup> (lahir di Ijzim, Haifa pada tahun 1909 – meninggal di Beirut, Lebanon 20 Desember 1977) ulama Yerussalem menyebutkan *khilafah* merupakan satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam. Taqiyuddin mendefinisikan *khilafah* sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum *syara'*. Sistem *khilafah* sangat berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain, seperti monarki, republik, kekaisaran, maupun federasi baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar, serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek Undang-Undang Dasar yang diberlakukannya maupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara. *Khilafah* merupakan kekuatan

---

<sup>24</sup>[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Taqiyyuddin An Nabhan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Taqiyyuddin_An_Nabhan)  
i, diakses pada 8 Februari 2020 pukul. 20.40

politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam.<sup>25</sup>

Menurut pendapat sebagian ulama, khalifah adalah pengganti fungsi Rasulullah SAW yang disaat hidupnya menangani masalah – masalah keagamaan yang diterimanya dari Allah SWT, dan bertugas memelihara pelaksanaan ajaran agama dan mengurus persoalan politik keduniaan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW wafat, para khalifah pun menjadi penggantinya dalam memelihara kelestarian urusan agama dan urusan politik keduniaan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *khilafah* disini adalah sebuah sistem pemerintah Islam sebagai pengganti Rasulullah SAW dalam fungsinya menerapkan syari'at Islam dan mengurus persoalan politik keduniaan.<sup>26</sup>

#### **b. Dasar Hukum *Khilafah***

Dasar hukum yang digunakan ulama yang mewajibkan berdirinya *khilafah* dalam pengertian

---

<sup>25</sup> Taqiyuddinal-Nabhani, *Nidham al-Hukm fial-Islam*, (Beirut Libanon : Dar al-Umah, 1996), hlm. 18.

<sup>26</sup> Ali Abdul ar-Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Terj. Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 5.

*imamah* (kepemimpinan) adalah al-Qur'an, al-Hadits, Ijma', dan logika. Akan tetapi tidak ada ayat al-Qur'an yang secara rinci menjelaskan. Misalnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي  
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. al-Nisa'/4 : 59).<sup>27</sup>  
Selain itu juga

---

<sup>27</sup> Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), hlm. 59.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا  
 بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ  
 مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا  
 فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ  
 الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu) (Q.S. al-Nisa'/4 : 83).<sup>28</sup>

Kandungan kedua ayat di atas adalah tentang perlunya pemimpin untuk dijadikan tempat rujukan bagi persoalan-persoalan yang dihadapi. Tidak terdapat kandungan makna *khilafah* secara langsung dalam kedua ayat

---

<sup>28</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), hlm. 132.



tersebut, hanya saja kata *ulil amri* yang terdapat dalam ayat di atas menurut para mufassir sebagai para pemimpin kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW dan masa sesudahnya termasuk *khulafa'ur rasyidin*, hakim-hakim, para pemuka masyarakat, para ulama atau *ahl hal wa al-aqd*.<sup>29</sup>

Sedangkan hadits-hadits yang dijadikan pijakan tentang kewajiban mendirikan *khilafah* seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash yang artinya “siapa saja yang membeli’at satu imam, memberikan uluran tangan (bai’atnya) dan buah hatinya (untuk mengikuti perintahnya), maka hendaknya dia mentaatinya. Apabila datang orang lain yang ingin mengambil alih kekuasaannya, maka penggallah lehernya”(H.R. Muslim).<sup>30</sup> Hadits ini menjelaskan tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin.

Selain ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits, ulama juga mendasarkan pada Ijma’ dan logika. Ijma’ yang dijadikan pijakan adalah bahwa begitu Rasulullah wafat, para sahabat segera

---

<sup>29</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasiasian al-Qur’an*, Volume 2, (Jakarta : Lintera Hati, Cet. VIII, 2007), hlm. 484.

<sup>30</sup> Abi Husein Muslim bin al-Hajaj, *Shahih Muslim*, (Beirut Libanon : Daar Ibn Hajm, 2002), hlm. 824.

memberikan bai'atnya kepada Abu Bakar r.a dan menyerahkan persoalan mereka kepadanya. Demikian yang terjadi pada masa-masa sesudah itu, dan umat Islam tidak pernah dibiarkan kacau tanpa pemimpin meski hanya sesaat.

Menurut Taqiyuddin, ijma' sahabat telah sepakat tentang sistem *khilafah*, kesatuan negara serta ketidakbolehan berbai'at selain pada satu *khilafah*. Sistem ini telah disepakati oleh para imam mujtahid serta jumur *fuqaha*.<sup>31</sup>

Sedangkan dasar logika adalah dengan adanya fungsi seorang imam, maka perintah-perintah al-Qur'an yang berkenaan dengan urusan ummat seperti amar ma'ruf nahi munkar, yang wajibnya hukumnya dapat dilaksanakan dengan mudah. Tanpa fungsi seorang imam, kedua kewajiban itu sulit direalisasikan. Apabila tidak seorang imam, rakyat tidak mungkin dapat diorganisir, bahkan akan muncul pertentangan, merajalela kedzaliman, dekadensi, dan sikap permusuhan yang sudah menjadi watak manusia.

---

<sup>31</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Nidham al-Hukm fi al-Islam*, (Beirut Libanon : Daar al-Ummah, 1996), hlm. 35.

<sup>32</sup> Itulah dasar hukum *khilafah*, akan tetapi, hal itu masih diperdebatkan oleh para ulama tentang keterkaitannya dengan pembentukan *khilafah*.

### c. Prinsip-Prinsip yang Harus Mendasari Sistem *Khilafah*

#### 1) Kesetaraan

Prinsip ini dibangun atas iktikad bahwa seluruh manusia, laki-laki, dan perempuan adalah anak keturunan Adam. Sebagaimana dijelaskan Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ  
مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya

---

<sup>32</sup> Abu A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Terj. M. Al-Baqir, (Bandung : Mizan, 1984), hlm. 111-115.

Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S.an-Nisa'/4 : 1).<sup>33</sup>

Dengan demikian sesungguhnya manusia mempunyai derajat, kewajiban, dan hak-hak yang sama. Warna kulit, bahasa, etnis, kedudukan, keturunan, kekayaan, dan lain sebagainya tidak bisa dijadikan alasan untuk mengunggulkan sebagian manusia atas sebagiannya yang lain.

## 2) Keadilan

Prinsip ini sangat ditekankan dalam Islam. perintah berbuat adil dinyatakan berulang kali dalam al-Qur'an, salah satunya firman Allah SWT :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ  
إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

---

<sup>33</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H),hlm. 114.

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ

بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

.... Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil....(Q.S.an-Nisa'/4 : 58).<sup>34</sup>

### 3) Musyawarah

Salah satu ayat al-Qur'an yang menjadi acuan prinsip *syura* (musyawarah) dalam Islam yaitu sebagai berikut :

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

..sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka...(Q.S. asy-Syuura/42 : 38).<sup>35</sup>

### 4) Kebebasan

Kebebasan merupakan hak yang melekat dan tidak pernah lepas dari manusia sebagai makhluk yang mendapat anugerah kemuliaan (*al-Karamah* ) dari Allah SWT.

---

<sup>34</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), hlm. 128.

<sup>35</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), hlm. 789.

Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ..

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam..(Q.S.al-Isra'/17 : 70).<sup>36</sup>

Pada prinsipnya, penguasa dan negara harus memberi ruang kebebasan dalam berbagai manifestasi keagamaan, pemikiran, politik, dan budaya dengan tetap memerhatikan koridor syariat dan aturan yang berlaku.

### **5) Pengawasan Rakyat**

Dalam syariat Islam, setiap rakyat mempunyai hak atau kewajiban untuk mengawasi, mengontrol, menasihati, dan mengkritik pemimpin yang ia pilih. Kritik yang dimaksud adalah kritik yang membangun yang berorientasi pada kebaikan bersama, yaitu pemimpin dan yang dipimpin. Maka dari

---

<sup>36</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H),hlm. 435.

itu seorang pemimpin harus siap dan merasa butuh akan adanya kritik.<sup>37</sup>

#### **d. Konsep *Khilafah* dalam Lintasan Sejarah Islam**

Islam lahir di kota Makkah al-Mukarromah pada tahun 610 M, bersamaan dengan turunnya wahyu Al-Qur'an yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Selama kurang lebih 12 tahun, Nabi mendakwahkan Islam di kota ini, tapi hasil yang diharapkan dari dakwahnya di kota tersebut tidak maksimal. Sebaliknya, selama itu pula, Nabi menghadapi tantangan dan hambatan dari penduduk Quraisy ini. Berbagai cara dilakukan oleh para pembesar kaum Quraisy untuk menghambat dakwah Nabi. Mereka melakukan usaha mulai dari cara yang baik dan halus sampai ke tindakan intimidasi dan kekerasan. Karena keadaan di Makkah seperti itu, Nabi tidak dapat mengorganisasikan pengikutnya sesuai ideal Islam. Dengan begitu Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Sejak itu, nabi tidak hanya memiliki otoritas keagamaan atau spiritual,

---

<sup>37</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2017), hlm. 43-57.

sebagai seorang pemimpin agama, tetapi juga memiliki otoritas temporal, sebagai pemimpin negara. Dalam kurun waktu berikutnya, ketika Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 M, otoritas yang bersifat temporal dalam bentuk politik ini terus berlanjut.<sup>38</sup>

Sejarah Islam pun kemudian bergulir mengikuti perjalanan arus sang waktu. Begitu juga dengan sejarah kekhilafahan yang dimulai sejak Nabi Muhammad SAW wafat. Beberapa istilah mulai dimunculkan untuk sebutan kepada pemimpin umat Islam adalah : *Khilafah*, *Imam*, *Amirul Mukminin*, *Hakimul mukminin* (penguasa orang-orang mukmin), *Raisul Muminin* (Pemimpin kaum muslimin), *Sultanul Muslimin* (Penguasa kaum muslimin), dan ada juga yang menggunakan sebutan *Amir*, sementara yang lain menggunakan kata *Syah* sebagaimana yang terjadi di Iran.

Praktek kekhilafahan selama enam abad pertama Islam dapat dibagi ke dalam tiga periode utama : (1) *Khulafa' Ar-Rasyidin* di Madinah

---

<sup>38</sup> Ajat Sudrajat, “*Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Sejarah*”, *Jurnal* (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 2009), hlm. 10-11.



(632-661 M); (2) Kekhalifahan Bani Umayyah (661-750 M) di Damaskus; dan (3) kekhalifahan Bani Abbasyiah (750-1258 M) di Baghdad.<sup>39</sup> Sedangkan sisanya adalah zaman Utsmaniyyah Turki di Istanbul (1299-1924 M).

Dalam sejarah Islam tercatat yang pertama menggunakan kata *khalifah* secara resmi adalah Abu Bakar ash-Shidiq (632-634 M), tugas yang diembannya adalah penguasa temporal (dunia) dan penguasa religius (akhirat). Tugas yang sama juga dilakukan kepada Umar bin Khattab (634-644 M), Usman bin Affan (644-656 M), dan Ali bin Abi Thalib (656-661 M), yang selanjutnya dikenal sebagai *al-Khulafa al-Rasyidin*. Dimana pemilihan *khalifah* bisa dikatakan sangat demokratis untuk ukuran saat itu. Sepanjang sejarah peradaban Islam, masa kekhalifahan adalah masa kemajuan Islam. pada masa itu tidak ada sistem politik Islam yang baku. Kakhilafahan dijalankan sesuai dengan konteks situasi politik pada zaman kekhilafahan masing-masing. Hal itu

---

<sup>39</sup> John L.Esposito, *Ancaman Islam ; Mitos atau Realitas* ?, Alih Bahasa : Alwiyyah Abdurrahman, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 41.

dapat digambarkan dari perjalanan politik masing-masing khalifah.

Selama dua tahun kekuasaan yang dijalankan khalifah Abu Bakar, sebagaimana Rasulullah, bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai Khalifah sepeninggal nabi menjadi pintu besar pertama masuknya sentimen kesukuan dalam kepemimpinan umat. Akan tetapi dalam kasus Abu Bakar, meskipun beliau berasal dari suku Quraisy, sentimen kesukuan itu ternetralisasi dengan kualitas keislaman yang dimiliki beliau yaitu termasuk orang yang pertama masuk Islam, membelanjakan banyak hartanya untuk dakwah Islam, menemani Nabi hijrah, memimpin shalat selama Nabi sakit dan lain sebagainya. Menggantikan Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab memperkenalkan istilah *Amir al-Mu'minin* (komandan orang-orang beriman) menjalankan roda pemerintahan dengan memisahkan lembaga yudikatif dan lembaga

eksekutif. Untuk itu ia membentuk lembaga peradilan. Lepas dari persoalan gelarnya, Umar juga figur yang sangat kuat. Dialah yang didoakan Nabi masuk Islam, dan ketika masuk Islam, kekuatan masyarakat Muslim bertambah karena Umar seorang yang rajin baca buku, menjadi orang yang ke-51 masuk Islam dan termasuk orang yang disegani. Oleh karena itu, seperti halnya Abu Bakar, faktor suku jelas berpengaruh dalam penunjukannya sebagai *khalifah*, tetapi kualitas diri yang dimilikinya telah menetralsir ikatan kesukuannya.<sup>40</sup> Selama 10 tahun Umar melakukan ekspansi kekuasaan di sekitar jazirah Arab, Palestina, Syiria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Banyak kebijakan baru yang dijalankan seperti pengaturan administrasi. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jawatan kepolisian juga dibentuk, demikian pula jawatan pekerjaan umum. Beliau juga mendirikan *Bait al-Mal*,

---

<sup>40</sup> Komaruddin Hidayat (ed.), *Kontroversi Khilafah Islam, Negara, dan Pancasila*, (Bandung : Mizan, 2014), hlm. 30-31.

menempa mata uang dan menciptakan tahun Hijrah.<sup>41</sup>

Pada masa Usman yang terkenal lemah lembut, jasanya tampak dalam pembangunan bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dengan mengatur pembagian air ke kota. Selain itu beliau juga membangun jalan, jembatan, masjid, dan memperluas masjid Nabi di Madinah. Akan tetapi selama 12 tahun berkuasa, banyak rakyat yang kecewa pada kebijakan beliau yang mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi di pemerintahan.

Pada masa Ali bin Abi Thalib, situasi politik sedang tidak stabil. Namun beliau tetap menjalankan roda pemerintahan secara demokratis. Selama 6 tahun, beliau menghadapi banyak pergolakan politik. Karena berbeda dengan Abu Bakar-Umar, yang sesuai dengan semangat Nabi, berusaha melindungi *khilafah* dari intrusi kesukuan, Usman malah membuka lebar bagi sukuisme masuk ke sistem *khilafah* dan menguasainya. Maka dari itu, sepeninggal Usman bin Affan, menjadikan para pendukung pro-suku,

---

<sup>41</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2004), hlm. 38.

yaitu pihak Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Mu'awiyah dan pro non-suku, tak lain adalah pihak Ali bin Abi Thalib berhadapan – hadapan memperebutkan *khilafah*. Keduanya bertemu dalam perang Siffin. Kekalahan Ali adalah kemenangan semangat kesukuan mengambil alih *khilafah*. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib adalah *khilafah* yang mengakar pada kesukuan murni yaitu Dinasti Umayyah yang didirikan oleh Mu'awiyah. Selain itu terjadi juga pergeseran diantaranya, *pertama* pemilihan *khalifah* tidak lagi melalui cara yang “demokratis”, *kedua*, khalifah lebih terfokus pada masalah politik, sementara masalah agama diserahkan kepada ulama yang menguasai masalah-masalah agama. Berbeda dengan khalifah sebelumnya yang ahli dalam agama dan menetapkan hukum berdasarkan ijtihad sendiri maupun bersama-sama. Sistem pemerintahannya pun menjadi monarki sejak Mu'awiyah mengangkat putranya Yazid bin Mu'awiyah. Setelah jatuhnya kekuasaan Dinasti Umayyah, mucullah Dinasti Abbasiyah yang semakin menjelaskan kooptasi kesukuan terhadap

*khilafah*. Tak beda jauh dari Dinasti sebelumnya, peranan *khalifah* semakin mengalami penurunan di samping meneruskan ciri monarki absolut dan diperparah dengan penambahan kata yang dimaksud untuk “meninggikan” derajat seorang *khilafah*. Seperti ketika masa sultan Buwaihi (945-1055 M), Saljuk (1063-1194 M), Khawarizme (1199-1258 M) atas Dinasti Abbasiyah, peranan *khalifah* lebih menurun drastis. Pada masa itu, peranan *khalifah* lebih bersifat boneka atau simbol saja karena kekuatan dan kekuasaan sultan dapat memaksakan segala kehendaknya kepada *khalifah*.

Setelah Abbasiyah hancur, muncullah kerajaan Usmani yang kemudian dikenal dengan *Khilafah Usmaniyyah*. Pendirinya yaitu bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Ketika telah mencapai puncak kejayaan, muncul kerajaan Syafawi di Persia yang dalam perkembangannya sering mengalami bentrok dengan kerajaan Turki Utsmani yang dilatarbelakangi oleh kerajaan Syafawi yang menyatakan Syi'ah sebagai madzhab negara dan setelah seperempat abad berdirinya kerajaan Syafawi, berdiri juga kerajaan

Mughal di India. Dinasti Usmaniyah berkuasan kurang lebih 6 abad dan pernah disegani Eropa akan tetapi mendapatkan pukulan yang mematikan dari Kemal Attaturk dengan mendirikan Republik Turki pada tahun 1923 M dan menghapus jabatan *Khalifah* pada tanggal 3 Maret 1924 M dengan demikian gelar kekhalifahan dalam arti politik hilang dari percaturan internasional. Di samping itu, runtuhnya kekhalifahan di Turki juga disebut-sebut karena sifat munafik kaum muslimin itu sendiri. Kekhalifahan dianggap harus ditaati oleh semua kaum muslimin tetapi pada kenyataannya hanya orang-orang Turki sajalah yang setia kepadanya, dalam hal ini Mustafa Kemal mengemukakan beberapa saat sebelum dihapuskan kekhalifahan. Kejengkelan inilah yang menjadi penyebab dihapusnya kekhalifahan.

42

Demikianlah masa-masa kejayaan Islam di bawah pemerintahan Islam yang berbentuk *Khilafah Islamiyah* telah runtuh oleh berbagai

---

<sup>42</sup> Hamid Enayat, *Modern Islamic Thought : The respon of the Syi'i and Sunni Muslim to the Twentieth Century* (terj.) Asep Hikmah, (Bandung : Pustaka, 1998), hlm. 82-83.

faktor baik internal maupun eksternal. Namun masih banyak yang mengenang romantisme kejayaan Islam di masa lalu itu dan berusaha untuk mewujudkan kembali sistem tersebut dengan berbagai cara. Akan tetapi hal tersebut banyak menimbulkan perdebatan, pertentangan, ancaman bahkan intimidasi dari berbagai pihak di tanah air diantaranya oleh ormas Islam yang bisa dikatakan cukup besar pengikutnya, Nahdlatul Ulama (NU) melalui musyawarah nasional, bahwa Inti dari Musyawarah Nasional Alim Ulama pada tahun 2014, NU mengatakan bahwa NKRI adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini, maka dari itu jika muncul gerakan yang mengancam keutuhan NKRI (pembentukan *khilafah*) wajib ditangkal, sebab akan menimbulkan mafsadah yang besar dan perpecahan umat.<sup>43</sup>

**e. Konsep *khilafah* dalam Kurikulum *Fiqh Siyasah***

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Fiqih Politik Islam (*Fiqh Siyasah*) merupakan salah satu aspek dari lingkup

---

<sup>43</sup> Komaruddin Hidayat (ed), *Kontroversi Khilafah Islam, Negara, dan Pancasila*, (Bandung : Mizan, 2014), h;m. 149-150.



*Fiqh Muamalah* yang membicarakan tentang segala hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Dalam hal ini, yaitu tentang konsep *khilafah*. Konsep ini masuk dalam *Fiqh Siyasah Syar'iyah*, dimana mencakup tentang ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.<sup>44</sup>

Dalam pembelajaran Fiqih Politik Islam, materi tentang *khilafah* memiliki kompetensi dasar sebagai berikut :

- 1) Menghayati konsep *khilafah* dalam Islam.
- 2) Memiliki perilaku jujur, disiplin, dan tanggungjawab sebagai implementasi dari materi *khilafah*.
- 3) Mendeskripsikan ketentuan Islam tentang pemerintahan *khilafah*.
- 4) Menunjukkan contoh penerapan dasar-dasar *khilafah*.

Dalam bab ini diuraikan tentang *khilafah*, sejarah timbulnya, dasar *khilafah*, tujuan *khilafah*, cara pemilihan khalifah, dan sikap kekhalifahan terhadap muslim. Selain itu, terkait dengan

---

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 5.

masalah *khilafah*, juga akan dibahas mengenai Majelis Syuro dan Ahlul Halli Wal Aqdi yang besar perannya dalam membentuk suatu *khilafah*. Berikut penjelasannya :

### **1) Pengertian *Khilafah***

Secara bahasa berasal dari bahasa Arab *khalafa*, *yakhlifu*, *khilafatan* yang artinya menggantikan. Dalam konteks sejarah Islam, *khilafah* adalah proses menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW, dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Pada masa sekarang istilah *khilafah* sama artinya dengan suksesi yang juga berarti proses penggantian kepemimpinan.

Sedangkan menurut istilah *khilafah* berarti pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. *khilafah* bersifat umum, meliputi kepemimpinan yang mengurus bidang keagamaan dan kenegaraan sebagai pengganti Rasulullah. *Khilafah* disebut pula *Imamah* atau *Imarah*. Pemegang kekuasaan *Khilafah* adalah *Khalifah*. Pemegang kekuasaan *Imamah* disebut *Imam*, dan

pemegang kekuasaan *Imarah* adalah *Amir*. Dijelaskan pula tentang pembahasan ketiga istilah tersebut walau banyak versi dan sudut pandang. Istilah *khilafah* pertama muncul pada masa Abu Bakar Ash-Shidiq. Pada masa Umar bin Khattab gelar *khalifah* malah digantinya dengan *Amir*. Sedangkan masa pemerintahan Abbasyiah, gelar *khalifah* tidak sekedar bermakna pengganti Rasul tetapi pengganti Allah di muka bumi. *Amir* pada masa itu untuk gelar seorang gubernur atau kepala daerah. Gelar *Imam* digunakan oleh kaum Syi'ah untuk menyebut jabatan seorang kepada negara. Sama artinya dengan *khalifah* yang sering digunakan oleh kaum Sunni.

Melanjutkan sejarah timbulnya *khilafah* sejak terpilihnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib selanjutnya pada generasi Dinasti Umayyah di Damascus yang ada 14 *khalifah*, Dinasti Abbasyiah di Baghdad ada 37 *khalifah*, Dinasti Umayyah di Spanyol ada 18 *khalifah*, Dinasti Fatimiyah di Mesir ada

14 *khalifah*, Dinasti Turi Usmani di Istanbul sebagai 39 *khalifah*, Kerajaan Syafawi di Persia ada 18 Syah/Raja, Kerajaan Mughal di India ada 15 raja dan dinasti-dinasti kecil lainnya. Dinasti-dinasti tersebut memakai gelar *khalifah*. Tetapi berbeda pelaksanaannya dengan *khulafa' ar-Rasyidin*. Jika *khulafa' ar-Rasyidin* secara musyawarah, maka dinasti-dinasti tersebut menerapkan tradisi pengangkatan raja secara turun-temurun.

## **2) Tujuan *Khilafah*.**

Secara umum tujuannya untuk memelihara agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan umat manusia agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Allah SWT. Adapun tujuan *khilafah* secara spesifik adalah :

- a) Melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat (bukan pengganti sebagai Nabi).
- b) Berupaya memelihara keamanan dan ketahanan negara dan agama.

- c) Mengupayakan kesejahteraan lahir dan batin dalam rangka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
- d) Mewujudkan dasar-dasar *khilafah* yang adil dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam.

### 3) **Dasar-Dasar *Khilafah*.**

Menurut Sulaiman Rasjid, dapat diketahui dengan jelas bahwa *khilafah* atau pemerintahan yang dijalankan *khulafa' ar-Rasyidin* berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

#### a) **Kejujuran, Keikhlasan, dan Tanggung jawab.**

Pemerintahan harus dijalankan dengan tulus demi tanggung jawab mengemban amanat rakyat dengan tidak membedakan bangsa dan warna kulit. Hal ini dapat dilakukan dengan berpedoman pada Firman Allah SWT :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى  
وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. al-Hujurat/ 49 : 13).<sup>45</sup>

#### b) Keadilan

Firman Allah dalam QS. An-Nahl :  
90 hendanya keadilan ditegakkan terhadap  
seluruh rakyat dalam segala urusannya :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي  
الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran

---

<sup>45</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), hlm. 847.

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

### c) Tauhid (Mengesakan Allah)

Firman Allah SWT,

وَاللَّهُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۚ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ  
الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang (Q.S. al-Baqarah/2 : 163).<sup>46</sup>

Tauhid merupakan sikap tunduk dan patuh secara total hanya kepada Allah. Tak ada sesuatupun yang layak dipatuhi selain Allah. Konsekuensi dari sikap bertauhid ini akan membuat tiap-tiap orang, termasuk para pemimpin, merasa merdeka dan menghargai kemerdekaan orang lain, terhindar dari kesewenang-wenangan, dan pada akhirnya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang egaliter serta terhindar dari otoritarianisme.

### d) Kedaulatan Rakyat

---

<sup>46</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), hlm. 40.

Masalah kedaulatan rakyat ini dapat dipahami dari perintah Allah yang mewajibkan kita taat kepada ulil amri (para wakil rakyat atau pemegang pemerintahan). Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ.....

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu (Q.S. an-Nisa' /4 : 59).<sup>47</sup>

#### 4) Hukum Membentuk *Khilafah*

Berdasarkan pendapat yang diikuti mayoritas umat Islam (mu'tabar), hukum mendirikan *khilafah* adalah Fardhu Kifayah dengan alasan sebagai berikut :

##### a) *Ijma' Sahabat*

Ketika Rasulullah wafat, saat itu juga terdengar di kalangan para sahabat yang membicarakan masalah pengganti beliau. Bahkan pembicaraan itu sempat mengarah ke perselisihan di antara kaum Anshar dan Muhajirin. Dalam

---

<sup>47</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), hlm. 128.



suasana demikian maka disepakati untuk dilaksanakan musyawarah antara perwakilan dari kedua kaum tersebut. Sementara sebagian lainnya tetap mengurus jenazah Rasulullah. Adapun hasil musyawarah akhirnya menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah/ pengganti Rasulullah.

**b) Demi Menyempurnakan Kewajiban**

*Khilafah* harus didirikan demi menjamin kelancaran atau kesempurnaan dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya dalam hal pemenuhan kewajiban sebagai umat beragama, menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kesejahteraan bersama, menegakan keadilan, dan lain sebagainya. Semua urusan ini tidak bisa sepenuhnya dibebaskan untuk diurus oleh perseorangan tetapi perlu ada pihak yang berwenang mengelolanya. Sudah barang tentu hal ini atas mandat dari rakyat.

### c) **Memenuhi Janji Allah**

Allah berjanji akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sebagai penguasa di muka bumi. Setelah sebelumnya mereka mengalami ketakutan. Kegelisahan, dan penderitaan akibat kezaliman. Tetapi mereka tetap berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah yang memungkinkan terbukanya peluang untuk memenuhi janji Allah yang akan menjadikan kita sebagai penguasa di muka bumi. Mengemban amanat kekhilafahan atau pemerintahan demi kehidupan yang sejahtera, aman, sentosa, dan tetap dalam ketundukan terhadap Allah semata.

### 5) **Hikmah *Khilafah***

*Khilafah* yang ditegakkan dengan tujuan yang jelas dan dasar-dasar yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan bersama pada akhirnya akan membuat masyarakatnya hidup tenang, nyaman, dan aman di satu pihak. Di pihak lain justru akan

membuat *khilafah* semakin kuat dan stabil karena adanya kepercayaan dari masyarakat luas.

Upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah dengan disertai pemenuhan aspirasi rakyat dapat melahirkan kesadaran bersama untuk mencapai persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga keragaman, baik suku, agama, dan ras, sebagai anugerah Allah.

## **6) Khalifah**

*Khalifah* berarti pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan pimpinan agama. Adapun syarat-syarat *khalifah* sebagai berikut :

### **a) Berpengetahuan Luas**

Seorang khalifah harus memiliki pengetahuan luas dalam arti yang sebenarnya. Tak cukup hanya memiliki latar belakang pendidikan akademik tinggi.

### **b) Adil dalam Arti Luas**

Seorang *khalifah* mampu menjalankan segala kewajiban dan menjauhi larangan serta menjaga kehormatan dirinya. Khalifah juga wajib mengawasi segala hukum dan peraturan yang dijalankan oleh para wakil dan bawahannya.

c) Kompeten (kifayah)

Seorang khalifah harus memiliki kompetensi berupa tanggung jawab, teguh, kuat, dan cakap menjalankan pemerintahan, memajukan negara, dan agama.

d) Sehat Jasmani-Rohani

Seorang khalifah harus memiliki pancaindera dan anggota tubuh lainnya yang bebas dari gangguan yang bisa mengurangi kemampuan berpikir dan kekuatan jasmani atau tenaganya.

Sedangkan dalam catatan sejarah *Khulafa al-Rasyidin*, terdapat beberapa contoh pengangkatan khalifah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) Dipilih langsung oleh umat Islam

- b) Diusulkan oleh Khalifah yang sedang menjabat
- c) Dipilih melalui perwakilan
- d) Dipilih oleh perwakilan sebagian besar umat Islam.<sup>48</sup>

### 3. Tinjauan Tentang Konsep Jihad

#### a. Pengertian Jihad

*Jihad*, secara bahasa berasal dari kata *jahada*, *yajhadu*, *jihadan* yang artinya bersungguh-sungguh ataupun dapat pula diartikan perjuangan. Secara istilah, makna *jihad* sebagaimana diungkapkan madzhab Hanafiyah adalah mengerahkan segala kesempatan dan tenaga untuk berpangan di jalan Allah dengan jiwa, harta, dan lisan atau lain sebagainya. Sedangkan menurut madzhab Syafi'iyah sesuatu yang diteladani yang ditafsirkan sebagai sejarah hidup Rasulullah SAW. Malikiyyah memaknai sebagai peperangan orang muslim terhadap orang kafir tanpa suatu perjanjian untuk

---

<sup>48</sup> Amari Ma'ruf, dkk, *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2016), hlm. 7-16.

menegakkan kalimat Allah SWT. Sedangkan menurut ulama Hanabillah *jihad* yaitu memerangi orang-orang kafir secara khusus yang selain orang-orang muslim yang membangkang, perompak dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

Menurut Maulana Muhammad Ali sebagaimana dikutip Iskandar Zulkarnaen, konsep *jihad* dalam Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu ; *pertama, jihad akbar* (jihad terbesar), yakni *jihad* melawan syaitan dan hawa nafsu yang setiap saat menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus sebagaimana Hadits Nabi yang menceritakan “kita kembali dari *jihad asghar* ke *jihad akbar* (jihad terbesar) yakni melawan hawa nafsu. *Kedua, jihad kabir* (jihad besar), yakni menyebarluaskan ajaran al-Qur'an kepada kaum kafir dan musyrik. *Jihad* ini dielaborasi dari QS. 25 ayat 52 dan dalam hadits Nabi Muhammad yang

---

<sup>49</sup> Anthin Lathifah, *Geneologi Fiqh Jihad Studi Komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian*, (Semarang : Anggarap DIPA IAIN Walisongo, 2012), hlm. 23.

menyebutkan semua kegiatan dakwah Islam dipandang sebagai *Jihad*. *Jihad* model ini disebut juga dengan *jihad bi al-lisan* dan *jihad bi al-kitabah*. Ketiga, *jihad asghar* (jihad terkecil), yakni *jihad* temporer yang terikat oleh situasi yang menuntutnya, yaitu perang dengan senjata untuk mempertahankan agama.<sup>50</sup>

#### **b. Dasar-Dasar *Jihad***

*Jihad* merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa awal-awal muslim hingga masa kontemporer. Pembicaraan tentang *Jihad* dan konsep-konsepnya yang dikemukakan sedikit atau banyak mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungan masing-masing pemikir. Demikian sentralnya *jihad* dalam Islam hingga cukup beralasan kalau *jihad* ditafsirkan berbeda-beda menurut para ahli tafsir.

Kata *jihad* di al-Qur'an disebut dalam 31 ayat, baik mendeskripsikan secara luas

---

<sup>50</sup> Anthin Lathifah, *Geneologi Fiqh Jihad Studi Komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian*, (Semarang : Anggarap DIPA IAIN Walisongo, 2012), hlm. 28-29.

maupun secara sempit. Berikut Firman Allah yang menjelaskan *jihad* secara sempit :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (Q.S. al-Baqarah/2 : 190).<sup>51</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, ayat ini membicarakan bolehnya berperang, bolehnya membunuh orang yang membunuh orang Islam. Ayat ini mengandung multitafsir, bahkan tak sedikit orang salah paham dalam memahami ayat ini. Seperti contoh sosok di Indonesia yang biasa dikenal dengan sebutan Imam Samudra, salah satu anggota kelompok radikal Jama'ah Islamiyah (JI) yang banyak terlibat kasus-kasus terorisme, dia menganggap pentingnya *Jihad Qital*. Sebagai contoh aksi bom bunuh

---

<sup>51</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), hlm. 46.



diri yang dilakukan di Bali, bom Sarinah dan lain sebagainya dengan mengatasnamakan *Jihad Fi Sabilillah*. Selain itu ada Kelompok Islam Radikal lainnya yang bersifat lokal seperti FPI Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, Front Jihad Islam (FJI) di Yogyakarta, Laskar Bismillah, laskar Hizbullah, Laskar Hisbah dan lain sebagainya dimana mereka menempatkan *jihad* sebagai sarana utama perjuangan mereka dalam menegakkan syari'at Islam.<sup>52</sup>

Makna *jihad* yang seharusnya dipahami di zaman kontemporer ini sebagaimana diungkapkan oleh M. Quraish Shihab, *jihad* yang beraneka ragam seperti memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit adalah *jihad* yang tidak kurang pentingnya dari yang mengangkat senjata. Tak bisa jika *jihad* hanya diartikan sebagai perang fisik semata, karena lebih dari itu. Seperti ilmuwan yang berjihad dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan bekerja dengan baik, guru dengan

---

<sup>52</sup> Anthin Lathifah, *Geneologi Fiqh Jihad Studi Komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian*, (Semarang : Anggarap DIPA IAIN Walisongo, 2012), hlm. 47-56.

pendidikan yang sempurna, pemimpin dengan keadilannya, penguasa dengan kejujurannya, dan seterusnya.<sup>53</sup>

**c. Konsep *Jihad* dalam Kurikulum *Fiqh Siyasa***

*Jihad*, masuk dalam lingkup Fiqh Politik Islam (*Fiqh Siyasa*). Dari mulai pengertian, dasar-dasar *jihad*, makna *jihad*, macam-macam *jihad*, tujuan *jihad* dan hukum *jihad*. Berikut ini akan dipaparkan satu per satu.

**1) Pengertian *Jihad***

Kata *Jihad* berasal dari kata *jahada-yujahidu- wa mujahadatan*. Asal katanya adalah *jahada-yajhadu-jahdan/juhdan* yang berarti kekuatan (*al-thaqah*) dan upaya jerih payah. Secara bahasa *jihad* berarti mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Sedangkan menurut istilah ulama fiqh, *jihad*

---

<sup>53</sup> Muhammad Chirzin, *kontroversi Jihad di Indonesia Modernis Vs Fundamental*, (Yogyakarta : Nuansa Aksara, 2006), hlm. 11.

adalah perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya agama Islam. *Jihad* juga dapat berarti mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan. Pelaku *jihad* disebut *mujahid*. Dari akar yang sama lahir dari kata *ijtihad* yang berarti upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan sebuah hukum dari teks-teks keagamaan.

Dengan demikian *jihad* berarti sebuah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang Muslim dalam melawan kejahatan dan kebatilan, mulai dari yang terdapat dalam jiwa akibat bisikan dan godaan setan, sampai pada upaya memberantas kejahatan dan kemungkaran dalam masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui kerja hati berupa kebulatan tekad dan niat untuk berdakwah, kerja

lisan berupa argumentasi dan penjelasan tentang hakikat kebenaran ajaran Islam, kerja akal berupa perencanaan yang matang, dan kerja badan yang berupa perang atau lainnya. Oleh sebab itu *jihad* tidak selalu diidentikkan dengan perang fisik.

## 2) **Dasar-dasar *Jihad* dalam Al-Qur'an dan Hadits**

### **Al - Qur'an**

Sebenarnya *jihad* merupakan kesungguhan untuk melaksanakan perintah Allah. Misalnya bersungguh-sungguh mendirikan shalat, membayar zakat dan menegakkan persatuan-kesatuan. Allah berfirman :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ  
أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ  
مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ  
سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا  
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا  
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

الزَّكَاةَ وَأَعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ  
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٥٤﴾

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong (Q.S. al-Hajj/22 : 78).<sup>54</sup>

Melawan segala bentuk pemaksaan membutuhkan keberanian untuk menolaknya. Apalagi pemaksaan yang terkait dengan masalah keyakinan. Meskipun demikian, kita tetap harus menjaga hubungan baik dengan mereka dalam

---

<sup>54</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), hlm. 523.

pergaulan sehari-hari. Allah berfirman  
:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ  
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي  
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ  
ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S. Luqman/31 : 15).<sup>55</sup>

### Hadits

*Jihad* merupakan sikap dan tindakan tegas dalam memegang keyakinan terhadap keesaan Allah hingga tak ada celah sedikitpun untuk

---

<sup>55</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), hlm. 654.

bersikap yang berpotensi merusak keimanan itu. Bahkan dalam konteks tertentu kita dilarang untuk menyerupai mereka yang tidak beriman akan keesaan Allah. Rasulullah bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الدِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ  
(رواه احمد وابن ابى شيبة)

*Dari Ibn 'Umar, Rasulullah SAW bersabda, " saya diutus dengan pedang, hingga Allah disembah tiada serikat bagi-Nya, dan rezkiku dijadikan di bawah naungan tombak, kehinaan bagi siapa yang menyalahi perintahku, dan siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk pada kaum tersebut." (HR.Ahmad)*

### 3) Macam-Macam Jihad

Pakar bahasa al-Qur'an, Raghīb al-Ashfahani, menyebutkan tiga

bentuk *jihad* , yaitu *jihad* melawan musuh yang nyata, *jihad* melawan setan, *jihad* melawan hawa nafsu. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 4 tingkatan yakni , *jihad* melawan hawa nafsu, *jihad* melawan setan, *jihad* melawan orang-orang kafir, dan *jihad* melawan orang-orang munafik.

Berikut penjelasannya :

a) *Jihad* melawan hawa nafsu

*Jihad* melawan hawa nafsu penting dilakukan, sebab jiwa manusia memiliki kecenderungan kepada keburukan yang dapat merusak kebahagiaan seseorang, dan itu tidak mudah dilakukan, sebab hawa nafsu ibarat musuh dalam selimut. *Jihad* melawan hawa nafsu dapat dilakukan dengan, *pertama*, mempelajari petunjuk-petunjuk agama yang dapat mengantarkan jiwa kepada keberuntungan dan kebahagiaan,



*kedua*, mengamalkan apa yang ia telah ketahui, *ketiga*, mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk agama dan *keempat*, bersabar dan menahan diri dari berbagai cobaan dalam menjalankan dakwah.

b) *Jihad* melawan setan

*Jihad* ini berupaya menolak segala bentuk keraguan yang menerpa keimanan seseorang dan menolak segala bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu. Keduanya dapat dilakukan dengan berbekal pada keyakinan yang teguh dan kesabaran.

c) *Jihad* melawan orang-orang kafir dan orang munafik

Sumber segala kejahatan adalah setan yang sering memanfaatkan kelemahan nafsu manusia. Jika manusia tergoda oleh setan, dia bisa menjadi kafir, munafik, dan menderita berbagai macam

penyakit hati. Akibatnya bahkan manusia itu sendiri akan menjadi setan.

#### **4) Tujuan *Jihad***

Tujuan *jihad* dalam Islam untuk mempertahankan dan membela serta meninggikan agama Islam. Itulah tujuan pokok perang dalam Islam. selain itu tujuan lebih rincinya yaitu mempertahankan hak-hak umat Islam dari perampasan pihak lain, memberantas segala macam fitnah, memberantas kemusyrikan demi meluruskan tauhid, serta melindungi manusia dari segala bentuk kedzaliman dan ketidakadilan

#### **5) Hukum *Jihad***

Hukum *jihad* untuk mempertahankan dan memelihara agama dan umat Islam (serta negara) hukumnya wajib atau fardhu. Baik fardhu ain maupun fardhu kifayah.

- a) Sebagian ulama sepakat *jihad* hukumnya fardhu ain

Firman Allah SWT :

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا  
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿٩١﴾

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. at-Taubah/ 9 : 41).<sup>56</sup>

- b) Sebagian ulama sepakat *jihad* hukumnya fardhu kifayah
- c) Hukum *jihad* bisa berubah menjadi fardhu 'ain bagi orang yang telah bergabung dalam barisan perang. Begitu juga bagi setiap individu jika musuh telah mengepung kaum muslimin dengan syarat *pertama*, jika jumlah orang-orang kafir tidak

---

<sup>56</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), hlm. 285.

melebihi 2x lebih besar dibandingkan kaum muslimin dengan penambahan pasukan yang dapat diperhitungkan. *Kedua*, tidak ditemukan udzur baik sakit maupun tidak ada senjata dan kendaraan perang. *Ketiga*, *jihad* tidak bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Jika salah satu dari ketiganya ada yang tidak terpenuhi, maka boleh meninggalkan peperangan.<sup>57</sup>

Makna *jihad* yang seharusnya dipahami di zaman kontemporer ini sebagaimana diungkapkan oleh M. Quraish Shihab, *jihad* yang beraneka ragam seperti memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit adalah *jihad* yang tidak kurang pentingnya dari yang mengangkat senjata. Tak bisa jika *jihad* hanya diartikan sebagai perang fisik semata, karena lebih dari itu. Seperti ilmuwan yang berjihad dengan

---

<sup>57</sup> Amari Ma'ruf, dkk, *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2016), hlm. 34-47.

memanfaatkan ilmunya, karyawan bekerja dengan baik, guru dengan pendidikan yang sempurna, pemimpin dengan keadilannya, penguasa dengan kejujurannya, dan seterusnya.<sup>58</sup>

*Jihad* sering dimaknai dengan perang, perang disini adalah perang kaum muslimin dalam melawan kaum quraisy yang membangkang pada Islam di zaman Rasulullah SAW. Untuk itu dalam pembelajaran *Fiqh Siyasah* dijelaskan didalamnya tentang syarat-syarat perang sekaligus etika perang dalam Islam. Adapun syarat-syarat perang yaitu Islam, dewasa, berakal sehat, merdeka, laki-laki, sehat badannya, tidak mempunyai hutang, mempunyai bekal yang cukup, dan mendapat izin dari orang tua. Sedangkan untuk etika perang dalam Islam sebagai berikut :

- 1) Tidak boleh memerangi orang yang memusuhi islam dan umat islam sebelum diberi peringatan.

---

<sup>58</sup> Muhammad Chirzin, *kontroversi Jihad di Indonesia Modernis Vs Fundamentalis*, (Yogyakarta : Nuansa Aksara, 2006), hlm. 11.

- 2) Tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua (yang tidak ikut perang).
- 3) Tidak boleh membuat kerusakan harta.
- 4) Tidak boleh mengganggu apalagi membunuh utusan yang dikirim musuh secara resmi.
- 5) Tidak boleh membunuh musuh yang menyatakan menyerah.<sup>59</sup>

#### **4. Tinjauan Tentang Profil Guru Fiqih**

##### **a. Pengertian Guru Fiqih**

Guru atau pendidik adalah figur yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Dipertegas oleh J.Delors (1998 : 141) menyatakan bahwa guru adalah *agent of change*. Asmani dalam *tips menjadi guru inspiratif, kreatif dan inovatif* (2009 : 21) menyatakan bahwa guru adalah sebuah profesi yang sangat mulia. Dalam UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru, menyatakan bahwa guru

---

<sup>59</sup> Guru Fiqh MAN 2 Kudus, *Materi Ajar Mapar Fiqih Kelas XII Jurusan Keagamaan*, (Kudus : MAN 2 Kudus, 2015), hlm.11

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

*Fiqh* adalah salah satu mata pelajaran pendidikan Agama Islam yang menjelaskan tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat Amaliyah yang digali dari dalil-dalinya yang rinci (tafsili).<sup>60</sup> Selain itu Fiqih merupakan salah satu bidang ilmu dalam syari'at Islam yang secara khusus membahas tentang hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan tuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Guru mata pelajaran Fiqih adalah seseorang yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dan mengajarkan pada peserta didik

---

<sup>60</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama , 2007), hlm. 3.

tentang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas tentang hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan tuhan.

Guru mata pelajaran Fiqih merupakan tenaga pendidik yang khusus hanya mengajarkan tentang hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Tidak semua sekolah memiliki guru mata pelajaran Fiqih. Hanya terdapat di Madrasah saja, baik Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah. Hal tersebut dikarenakan di Madrasah berbeda dengan sekolah pada umumnya. Di Madrasah terdapat mata pelajaran seperti Fiqih, Akidah Akhlak, Qur'an Hadits, dan SKI. Guru mata pelajaran Fiqih, sebagian besar adalah lulusan sarjana fakultas keguruan dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Bahkan tak jarang ada yang berasal dari fakultas Syariah dan Hukum tepatnya program studi Hukum Siyash



Jinayah dan setelah itu dilanjut dengan mengikuti program sertifikasi guru.

Guru terutama guru mata pelajaran Fiqih, merupakan faktor yang sangat dominan dan penting pada pendidikan formal pada umumnya. Bagi peserta didik, guru sering dijadikan teladan, bahkan menjadi sosok yang menjadi subjek identifikasi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin (Mulyasa, 2010 : 37).

Sebagai pendidik, guru juga dituntut untuk memiliki kemampuan dasar yakni membimbing dan mengajar. Hal ini tercermin dalam kompetensi guru. Berkualitas tidaknya proses pendidikan di sekolah bergantung pada kreativitas guru sebagai perencana, pelaksana, sekaligus sebagai evaluator pembelajaran di kelas, juga pada peserta didik sebagai subjek yang terlibat langsung dalam proses pendidikan. Itulah Betapa pentingnya posisi guru dalam

dunia pendidikan.<sup>61</sup> Oleh sebab itu, Guru terutama guru mata pelajaran Fiqih memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Tanpa kelas, gedung, peralatan, dan sebagainya proses pendidikan masih dapat berjalan walaupun dalam keadaan darurat, tetapi tanpa guru proses pendidikan hampir tidak mungkin dapat berjalan. Selain itu, secanggih dan sebagus apapun kurikulum pendidikan itu dirancang, tetapi guru sebagai pelaku utama tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan, maka kurikulum itu akan mubadzir. Maka akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan pendidikan, dan pada akhirnya peserta didik akan gagal atau tidak berhasil dalam pendidikannya.<sup>62</sup>

#### **b. Kompetensi Guru Mata Pelajaran Fiqih**

Dalam PP No.74 tahun 2008, menyebutkan bahwa guru wajib memiliki

---

<sup>61</sup> Eko Setiawan, *Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru PAUD dan SD/MI*, (Jakarta : Esensi, 2018), hlm. 3-4.

<sup>62</sup> Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 251.

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Salah satunya harus memiliki kompetensi, karena dengan kompetensi yang dimiliki setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dari perbuatan secara profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru.

Untuk menjadi sosok guru yang utuh dan profesional, setiap guru harus mampu mengintegrasikan semua kompetensi dalam dirinya. Hal ini tidak hanya dilakukan di dalam proses pembelajaran melainkan juga dalam kehidupan guru. Hal ini perlu dilakukan karena “guru profesional yang sejati adalah guru yang tidak pernah berhenti untuk belajar”.<sup>63</sup>

Dalam pendidikan Islam, untuk menjadi guru dibutuhkan persyaratan yang tidak mudah. Menurut Munir Mursi (1977)

---

<sup>63</sup> Eko Setiawan, *Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru PAUD dan SD/MI*, (Jakarta : Esensi, 2018), hlm. 6.

untuk menjadi guru dibutuhkan persyaratan, diantaranya : (1) umur sudah harus dewasa, (2) harus sehat jasmani dan rohani, (3) harus menguasai bidang ilmu yang diajarkan dan menguasai ilmu mendidik; dan (4) harus berkepribadian muslim.<sup>64</sup>

Kompetensi pedagogik menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru. Adapun kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.<sup>65</sup> Kompetensi pedagogik ini mempunyai 10 indikator, satu diantaranya yaitu guru harus bisa menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran yang mendidik yang bisa dilakukan dengan menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik

---

<sup>64</sup> Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 115.

<sup>65</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 75

pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.<sup>66</sup> Untuk penggunaan dalam setiap materi tentunya harus diperhatikan dan disesuaikan agar siswa dapat menyerap dengan mudah pengalaman belajarnya yang diperoleh dari sang guru.

Dalam pembelajaran, terdapat banyak metode dan strategi yang bisa digunakan oleh guru ketika menyelenggarakan proses pembelajaran. Salah satunya metode pembelajaran yang paling populer di Indonesia bahkan di negara-negara lainnya adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah metode memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah siswa pada waktu dan tempat tertentu. Metode ini hanya mengandalkan indera pendengaran sebagai alat belajar yang paling dominan. Dalam metode ini, yang perlu diperhatikan adalah, hendaknya ceramah yang diberikan guru

---

<sup>66</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007, *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2009), hlm. 164

mudah dimengerti oleh siswa, mudah diterima serta mampu menstimulasi pendengar untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis membidik kompetensi pedagogik serta kompetensi profesional yang dimiliki guru terutama guru mata pelajaran Fiqih. Dalam kompetensi pedagogik, guru dituntut untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menarik, artinya guru harus bisa memilih, menetapkan dan melaksanakan berbagai macam metode dalam pendidikan dengan tujuan agar siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran dan tentunya akan tercipta proses belajar mengajar yang aktif dan efektif. Sebelum menyiapkan metode, seorang guru harus memahami secara mendalam tentang materi yang akan diajarkan, karena hal tersebut merupakan kompetensi profesional yang harus dimiliki setiap guru. Di mana hal tersebut sangat mempengaruhi berhasil tidaknya proses

---

<sup>67</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.138

pembelajaran dan tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Objek utama penelitian ini adalah persepsi guru mata pelajaran Fiqih tentang konsep *Khilafah* dan *Jihad* dalam konstelasi pembelajaran Fiqih Politik Islam.

## **B. Kajian Pustaka Relevan**

Adanya penelitian terdahulu sebagai perbandingan terhadap penelitian yang ada baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang sebelumnya. Disamping itu hasil penelitian terdahulu juga mempunyai manfaat besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada kaitannya dengan judul yang akan kita teliti. Beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis paparkan antara lain, sebagai berikut :

1. Skripsi dari Miftahul Ilmi, IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah, dengan judul skripsi "Persepsi Ulama NU tentang Sistem *Khilafah* (Studi Kasus Ulama NU Kota Semarang)".<sup>68</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi ulama NU kota Semarang terhadap sistem *khilafah*, mengetahui

---

<sup>68</sup> Miftahul Ilmi, "*Persepsi Ulama NU tentang Sistem Kilafah (Studi Kasus Ulama NU Kota Semarang)*", *Skripsi* (Semarang: Program Sarjana Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, 2008 ) dalam [library.walisongo.ac.id](http://library.walisongo.ac.id), di akses pada 16 Januari 2020.

nalar epistemologi yang digunakan ulama NU Kota Semarang dalam menolak sistem *khilafah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut ulama NU kota Semarang *khilafah* merupakan sistem pemerintahan yang bersifat universal yang meliputi seluruh dunia Islam yang mengintegrasikan agama dan politik. Sistem *khilafah* tidak pas diterapkan di Indonesia terutama untuk kondisi sekarang. Sebab negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas muslim sudah mapan dengan *nation state*. Menurut ulama NU Islam tidak mewajibkan untuk menerapkan sistem *khilafah* , tidak terdapat satupun ayat Al-quran maupun hadits yang mewajibkannya. Sedangkan nalar epistemologi yang digunakan ulama NU kota Semarang dalam menolak didirikannya sistem *Khilafah Islamiyah* bahwa dalam menjalankan ajaran Islam yang lebih dipentingkan adalah melihat tujuan umum *syari'ah* (*maqhashid al-Syari'ah*), daripada ketentuan-ketentuan harfiah syari'at Islam. Adapun relevansi antara hasil penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah, tentang subjek pembahasannya yaitu konsep *khilafah*, hasil dari penelitiannya yang mengatakan bahwa konsep



*khilafah* tidak tepat di Indonesia terutama dengan kondisi Indonesia di masa sekarang dengan salah satu alasan yang sama yaitu tidak adanya salil al-Qur'an maupun Hadits yang mewajibkan. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Penelitian di atas objek yang diteliti adalah persepsi ulama NU di kota Semarang, sedangkan penelitian ini objeknya persepsi Guru mapel Fiqih Ma di Kabupaten Kudus. Selain itu, dalam penelitian di atas subjek pembahasannya hanya tentang *khilafah* sedangkan dalam penelitian ini subjek pembahasannya yaitu konsep *khilafah* dan *jihad*.

2. Tesis dari Ali Imron, STAIN Salatiga, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dengan judul tesis “Konsep *Jihad* dan Implementasinya terhadap Pembelajaran di Madrasah (Studi Kasus pada Madrasah se-Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak 2014)”.<sup>69</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru tentang pembelajaran *jihad* di Madrasah, bagaimana guru mengimplementasikan

---

<sup>69</sup> Ali Imron, “*Konsep Jihad dan Implementasinya terhadap Pembelajaran di Madrasah (Studi Kasus pada Madrasah se-Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak*”, Tesis (Salatiga : Program Pascasarjana STAIN Salatiga, 2014) dalam [e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id](http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id), diakses pada 16 Januari 2020.

konsep *jihad* di madrasah-madrasah se-Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini yaitu konsep *jihad* menurut guru-guru di Madrasah Nurul Huda dan Madrasah Al-Khoiriyah mempunyai banyak makna yang mencakup sejak berjuang mengangkat senjata dalam peperangan sampai berjuang melawan hawa nafsu. Akan tetapi pemahaman para guru tentang *jihad* yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memerangi kebodohan atau suatu seruan kepada agama yang hak dan benar-benar harus diamalkan. Dalam mengimplementasikan konsep *jihad* di madrasah-madrasah dengan cara guru harus beriman kepada Allah, guru harus menjalankan proses pembelajaran dengan baik, menjalankan disiplin waktu dalam mengajar, dan juga mempunyai sifat yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi atau mengajar peserta didik. Adapun relevansi antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah tentang subjek pembahasan yaitu konsep *jihad*, dan hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman guru tentang *jihad*, khususnya yang tepat di masa sekarang. Untuk perbedaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu guru di Madrasah-

madrasah di Demak, sedangkan pada penelitian ini objek yang diteliti dispesifikkan pada guru mapel Fiqih MA di Kabupaten Kudus. selain itu, subjek pembahasannya dalam penelitian yang penulis lakukan tidak hanya tentang konsep *jihad*, melainkan dengan konsep *khilafah*.

3. Jurnal Pemikiran Islam dari Suparta Suparta, STAIN Syekh Abdurrahman Siddik Kepulauan Bangka Belitung dengan judul jurnal “Persepsi Ulama Bangka Belitung tentang Teori *Khilafah* dan Implikasinya terhadap *Ukhuwah Islamiyah* dan *Ukhuwah Basyariyah* dalam Keutuhan NKRI di Bangka Belitung”.<sup>70</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi ulama Bangka Belitung tentang Teori *Khilafah* dan Implikasinya terhadap *Ukhuwah Islamiyah* dan *Ukhuwah Basyariyah* dalam keutuhan NKRI di Bangka Belitung. Hasil dari penelitian ini yaitu ulama Bangka Belitung memiliki persepsi yang mayoritas sama terhadap penegakan *khilafah Islamiyah* yaitu *khilafah* di Indonesia masih belum

---

<sup>70</sup> Suparta Suparta, “*Persepsi Ulama Bangka Belitung tentang Teori Khilafah dan Implikasinya terhadap Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Basyariyah dalam Keutuhan NKRI di Bangka Belitung*”, Jurnal (Bangka Belitung : STAIN Syekh Abdurrahman Siddik Kepulauan Bangka Belitung, 2018) dalam [e-journal.metrouniv.ac.id](http://e-journal.metrouniv.ac.id), diakses pada 16 Januari 2020.

bisa ditegakkan karena setiap ulama berbeda paham tentang *khilafah*, disebabkan para ulama belum ada kesepakatan dan kesepahaman tentang *khilafah*. Implikasi penegakannya akan menimbulkan perpecahan persaudaraan diantara kaum muslimin. Jika dipaksakan tegak maka akan menjadi konflik antar umat islam sendiri dan konflik antar umat beragama yang menjadikan image umat Islam dianggap intoleran di mata Indonesia dan Internasional. Ada juga konflik vertikal yakni adanya konflik antara umat Islam yang menegakkan khilafah dengan pemerintah Indonesia dan para tokoh nasional dan ulama yang beragama Islam yang belum pro terhadap *Khilafah*. Adapun relevansi antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada subjek pembahasan tentang konsep *khilafah*, serta hasil dari penelitian yang mengatakan bahwa *khilafah* tidak bisa diterapkan di Indonesia karena akan menyebabkan terjadinya perpecahan antar warga. Sedangkan letak perbedaan terdapat pada objek yang diteliti yaitu ulama-ulama di Bangka Belitung. Subjek pembahasan dalam penelitian yang penulis buat tidak

hanya tentang konsep *khilafah* tetapi juga konsep *jihad*.

4. Skripsi dari Abi Chusna, UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi “Konsep *Jihad* Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Inonesia (MMI) : Studi Perbandingan”<sup>71</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia dalam memaknai *jihad*, apa perbedaan dan persamaannya serta bagaimana konsep *jihad* dalam Al-quran dan Hadits. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam pandangan HTI *jihad* lebih diartikan secara istilah, sehingga *jihad* dalam ideologi kelompok ini lebih condong terhadap peperangan demi tegaknya sebuah *khilafah* Islam. sedangkan dalam pandangan MMI lebih diartikan sebagai upaya untuk memberlakukan syari’at Islam secara *kaffah* tanpa adanya suatu kekerasan ataupun peperangan. Sedangkan menurut al-Quran dan as-Sunnah *jihad* mempunyai dua bagian bentuk yang dikenal dengan *jihad ashgar* dan *akbar*, yang

---

<sup>71</sup> Abi Chusna, “Konsep *Jihad* Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Inonesia (MMI) : Studi Perbandingan”, Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2014), dalam [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id), diakses pada 16 Januari 2020.

keduanya memiliki implikasi pada posisi yang berbeda. Begitu juga Islam melarang keras dalam menegakkan *jihad fi sabilillah* dengan menggunakan kekerasan ataupun melampaui batas yang telah ditentukan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Adapun mengenai relevansi antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada subjek pembahasan tentang konsep *jihad*. Untuk perbedaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu HTI dan MMI lalu dibandingkan antara keduanya. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan penulis objeknya adalah persepsi guru mapel Fiqih MA di Kabupaten Kudus.

Dapat ditarik benang merah, bahwa dari beberapa penelitian di atas belum ada yang meneliti tentang konsep *khilafah* sekaligus dengan konsep *jihad* khususnya dalam konstelasi pembelajaran Fiqih melalui persepsi guru mapel. Maka dari itu, Berbeda dari penelitian-penelitian di atas, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui persepsi guru mapel Fiqih MA se-Kabupaten Kudus tentang konsep *khilafah* dan *jihad* dalam konstelasi pembelajaran Fiqih Politik Islam.

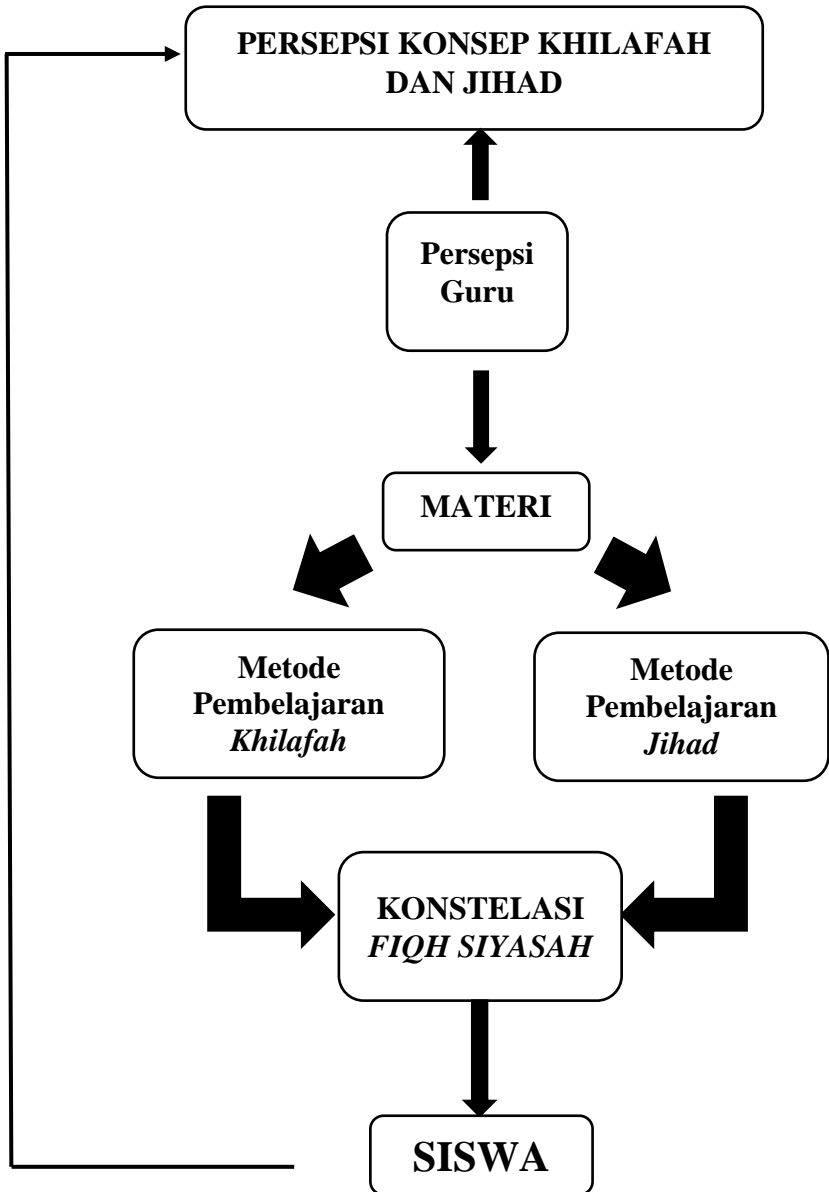
### C. Kerangka Berpikir

Konsep *Khilafah* dan *Jihad* tak pernah berhenti diperbincangkan di semua aspek kehidupan, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Bagi mereka yang pro terhadap *khilafah* dan *jihad*, mereka akan melakukan cara apa saja untuk menegakkan keduanya. Cara mereka yang tidak sesuai dengan syari'at, maka akan mengarah pada aksi radikalisme. Pendidikan, dijadikan oleh mereka menjadi salah satu gerbang dalam mengaktualisasikan cara mereka agar dapat menegakkan *Khilafah* dan *Jihad* menurut versi oknum tertentu baik melalui organisasi, pendidik, dan materi pelajaran yang ada di sekolah. *Khilafah* dan *Jihad* masuk sebagai materi pelajaran Fiqih Politik Islam di Madrasah Aliyah. Untuk mengantisipasi adanya aksi radikalisme, serta kerancuan dalam proses belajar mengajar tentang kedua materi kontroversial ini, maka harus diperhatikan kompetensi profesional guru yaitu dalam penguasaan dan pemahaman mendalam tentang materi tersebut. Untuk mengetahui seberapa dalam guru menguasai materi yang diampu, dapat dilihat melalui persepsi guru terhadap keduanya. Selain pemahaman dan penguasaan materi yang akan kita dapatkan dari hasil persepsi guru, juga akan terlihat cara guru

menyajikan pembelajaran tentang *khilafah* dan *jihad* dalam konstelasi pembelajaran Fiqih Politik Islam. Artinya, penerapan metode yang digunakan oleh guru selama proses belajar mengajar. Jika persepsi guru tentang *khilafah* dan *jihad* benar dan sesuai syariat Islam, maka proses penyampaian materi akan lebih efektif, dan tersampaikan secara objektif. Artinya, tidak berpihak mana kelompok manapun. Dengan begitu, siswa pun tidak akan terjerumus, paham dan pikirannya tidak rancu dalam memahami tentang konsep *khilafah* dan *jihad*.



Berikut kerangka berfikir dari uraian di atas :



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses – proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.<sup>72</sup> Menggunakan riset lapangan, riset lapangan adalah penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dari responden atau narasumber. Pada umumnya alasan menggunakan penelitian kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistic, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti test, dan kuesioner. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, ( Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1997), hlm. 11.

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 399.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif. Menurut Fuchan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, analisis data yang diperoleh berupa : kata-kata, gambar, perilaku dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau gambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.<sup>74</sup>

Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif karena ingin mendapatkan data langsung dari objek yang diteliti yaitu Guru Fiqih MA se-Kabupaten Kudus, peneliti melakukan penelitian langsung dengan cara wawancara terhadap pihak-pihak terkait tentang persepsi konsep *khilafah* dan *jihad* dalam konstelasi pembelajaran Fiqih Politik Islam.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kudus dengan objek utama yaitu guru-guru mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah (MA) se-Kabupaten Kudus. Adapun guru yang menjadi

---

<sup>74</sup> S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), Cet. 2, hlm. 39

narasumber berjumlah ada 6 guru mapel Fiqih dengan 4 madrasah yang peneliti pilih berdasarkan pertimbangan kualitas madrasah dan efektivitas letak jangkauan madrasah. Berikut guru yang menjadi narasumber penelitian ini :

- a. Is'adur Rofiq, S.Ag., di MAN 2 Kudus
- b. Ali Musta'in, S.Pd.I., di MAN 2 Kudus
- c. H. Subhan, M.Pd.I., di MA NU Banat Kudus
- d. H. Hartono, S.Ag., S.Pd.I., di MA Muhammadiyah Kudus.
- e. Riyadi, S.Pd.I., di MA Muhammadiyah Kudus
- f. Ali Mahmudi, Lc., di MA Ma'ahid Kudus

## **2. Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 3 sampai tanggal 16 maret 2020. Untuk jam, menyesuaikan permintaan narasumber.

## **C. Sumber Data**

Sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan penelitian karena sumber data merupakan sumber informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer data sekunder.

Sedangkan yang dimaksud sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.<sup>75</sup>

Data primer merupakan sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.<sup>76</sup> Data ini diperoleh secara langsung dari tokoh atau narasumber yang dianggap membantu dalam penyelesaian penelitian, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan beberapa guru mapel Fiqih MA yang telah ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dalam lingkup se-Kabupaten Kudus

---

<sup>75</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), Cet. XIII, hlm. 107.

<sup>76</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 89 dan 152

Adapun data sekunder merupakan sumber data tambahan yang menurut peneliti sebagai penunjang data pokok, data sekunder dapat berupa dokumentasi, buku-buku maupun arsip-arsip resmi.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini adalah persepsi guru Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah se-Kabupaten Kudus dikarenakan Guru Fiqih dituntut untuk menguasai secara mendalam segala macam materi pelajaran yang dia ampu, dan melalui persepsi bisa diketahui seberapa mendalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru, dimana pada penelitian ini menitik beratkan pada materi tentang konsep *khilafah* dan *jihad* dalam konstelasi pembelajaran Fiqih Politik Islam. Dalam pembahasan mengenai konsep *khilafah* lebih difokuskan pada konsep, pelaksanaan maupun efek dari *khilafah*. Begitu pula dengan *jihad* lebih difokuskan dalam hal konsep, pelaksanaan, serta efek dari *jihad*.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi tetap dipertontonkan penggunaannya.<sup>77</sup>

Data hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Wawancara**

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>78</sup> Dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam dan terstruktur. Dimana dalam melakukan

---

<sup>77</sup> Suharsimi Arikunto

<sup>78</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 111.

wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.<sup>79</sup> Dengan wawancara terstruktur ini setiap informan diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.<sup>80</sup>

Pemilihan atau penentuan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas Subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Dengan demikian penentuan informan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar

---

<sup>79</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), Cet, XII, hlm. 203

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 233.



kriteria-kriteria tertentu, berdasarkan tujuan penelitian. Informan yang relevan dan memenuhi kriteria sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah guru mata pelajaran Fiqih MA se- Kabupaten Kudus yang dituntut untuk mempunyai kompetensi profesional, sehingga persepsinya akan konsep *khilafah* dan *jihad* sangat penting sebagai penentu keberhasilan proses belajar mengajar. Sedangkan orang-orang lain yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dijadikan informan.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan dan bahan referensi lain yang ada di lokasi penelitian. Mengumpulkan atau bukti-bukti yang mendukung proses penelitian tentang Persepsi tentang Konsep *Khilafah* dan *Jihad* dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqh Politik Islam Studi atas Guru Mapel Fiqh MA se- Kabupaten Kudus.

## **3. Studi Kepustakaan**

Dalam mengumpulkan data-data atau teori dalam penelitian ini maka peneliti memanfaatkan berbagai macam data dan teori yang dikumpulkan melalui berbagai tinjauan pustaka penunjang dengan

tujuan melengkapi data yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

## **F. Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara:

### **1. Triangulasi**

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi segai tehnik pemeriksaan keabsahan data, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu, alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Misalnya membandingkan data hasil studi pustaka dengan wawancara. Hal ini dilakukan oleh peneliti sendiri.
- b. Triangulasi Metode, terdapat dua strategi, yaitu:
  - (1) pengecekan derajat kepercayaan penempatan hasil penelitian dari beberapa pengumpulan data,
  - (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Triangulasi ini untuk metode yang digunakan dalam memperoleh data penelitian yaitu membandingkan hasil wawancara dengan hasil dari studi pustaka.

c. Triangulasi dengan Jalan

Memanfaatkan guru mata pelajaran untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

d. Triangulasi Teori, bahwa data itu tidak dapat di cek dengan satu teori tetapi membutuhkan banyak teori. Dimana teori-teori tersebut akan mendukung dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.<sup>81</sup> Teori yang akan ditriangulasi adalah tentang konsep *khilafah* dan *jihad* beserta pelaksanaannya. Adapun triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teori karena keabsahan data yang digunakan dalam hal ini, peneliti banyak mengambil rujukan dari buku-buku referensi dan mengadopsi teori-teori para ahli di bidangnya.

2. Menggunakan Bahan Referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah

---

<sup>81</sup> Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1996), hlm. 75.

ditemukan oleh peneliti. Misal hasil wawancara didukung dengan rekaman wawancara.<sup>82</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>83</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengupulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Menurut Miles and Huberman (1984) yang dikutip Sugiono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan

---

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 366-375.

<sup>83</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 209.

*conclusion drawing/verification*. Penjabarannya sebagai berikut:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.<sup>84</sup> Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Proses reduksi data ini tidak dilakukan pada akhir penelitian saja, tetapi dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung karena merupakan bagian dari proses analisis data itu sendiri. Jadi penulis perlu mereduksi data untuk memilih dan merangkum data-data yang masuk melalui wawancara dengan beberapa narasumber. Penulis perlu memilah antara data-data yang fokus mengenai persepsi konsep *khilafah* dan *jihad* dalam konstelasi pembelajaran Fiqih Politik Islam.

2. Data *Display* (penyajian Data)

---

<sup>84</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data adalah penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.

### 3. *Conclusion Drawing / verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Setelah data disimpulkan terdapat hasil penelitian berupa temuan-temuan baru berupa deskripsi, sehingga masalah dalam penelitian menjadi lebih jelas. Temuan tersebut adalah persepsi guru mapel Fiqih tentang konsep *khilafah* dan *jihad* dalam konstelasi pembelaran Fiqih Politik Islam.

Ketiga komponen tersebut yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi harus saling berinteraksi sampai mendapat kesimpulan yang benar. Dimulai dari mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber, kemudian data tersebut dipilih data-data yang penting dan sesuai dengan permasalahan, membuat kategori dan membuang data yang tidak dibutuhkan. Setelah itu data disusun secara sistematis, sehingga mudah dipahami. Setelah melalui semua proses tersebut barulah peneliti menyimpulkan data. Oleh karena itu, analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara ketiga

komponen dan merupakan suatu siklus sampai aktifitas penelitian selesai.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 337-345.



## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data Konsep *Khilafah* dan *Jihad* dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam (Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqih MA Se-Kabupaten Kudus)**

Materi tentang konsep *khilafah* dan *jihad* dalam pembelajaran Fiqih politik Islam memang menjadi sorotan bagi banyak pihak karena substansi yang multitafsir dan tentunya banyak menyebabkan perdebatan. Begitupun dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa guru Fiqih di jenjang pendidikan madrasah aliyah yang memiliki beragam persepsi, sehingga metode dan strategi yang diterapkan ketika penyampaian materi pun juga beragam. Adapun persepsi dan metode yang digunakan para guru Fiqih sebagai berikut :

1. *Khilafah* diartikan hanya sebagai sistem pemerintahan, kecuali jika ditambah dengan Islamiyah maka menjadi sistem pemerintahan Islam. Bagi narasumber, sistem pemerintahan tersebut tidak cocok untuk diterapk di negara Indonesia karena menurutnya dalam kompetensi dasar (KD) dari materi Fiqih Politik Islam tidak ada tuntutan yang mengharuskan untuk

mendirikan sistem pemerintahan *khilafah* akan tetapi cukup dengan menelaah saja. Secara pribadi juga disampaikan alasan ketidaksetujuan atas sistem pemerintahan *khilafah* yang akan kembali diterapkan di Indonesia, *pertama*, karena persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah negara Islam itu tidak mudah. *Kedua*, Beliau juga mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki Pancasila yang dirasa lebih bisa menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan di negara ini dibanding harus mendirikan negara Islam di Indonesia, serta *ketiga* jika diperhatikan kelima sila dalam Pancasila sudah sesuai dengan dasar dalam pemerintahan Islam. Oleh karena itu, narasumber juga mendukung aksi pemerintah dalam membubarkan ormas radikal yang menginginkan kembali tegaknya *khilafah* sebagaimana *khilafah* dalam lintas sejarah Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan lain sebagainya karena mereka sangat berbahaya kalau dibiarkan. Selanjutnya, narasumber menyampaikan pemahamannya tentang konsep *jihad* yaitu secara bahasa bersungguh-sungguh ketika menjalankan sesuatu, intinya berusaha bersungguh-sungguh melawan musuh Islam bukan hanya orang kafir saja akan tetapi juga setan, hawa nafsu dan memberantas

segala kemaksiatan akan tetapi dengan cara-cara yang benar dan dianjurkan oleh Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

Dalam Hadits di atas dijelaskan tentang cara yang dilakukan ketika kita melihat kemunkaran atau kemaksiatan yaitu melalui tangan atau kekuasaan jika tidak bisa maka dengan lisan atau nasihat bisa berupa ceramah dan jika masih tidak bisa maka dengan hatinya. Tidak boleh serta merta dengan memeranginya, membunuhnya atau bahkan ada yang melakukan bom bunuh diri dan mengatasnamakan sebagai *jihad*. Itu hanyalah pemikiran para teroris. Mereka tidak paham arti *jihad* secara luas. Oleh karena itulah, ketika memaknai *jihad* sebagai aksi dalam memberantas kemaksiatan, harus diperhatikan juga makna maksiat yang digunakan. Jangan seperti kebanyakan orang yang mengartikan *jihad* dengan memandang orang non-muslim itu kafir dan segala hal yang dilakukannya dinilai sebagai maksiat dan harus diperangi. Makna kafir pun juga demikian ada pembagiannya, tidak semua kafir harus dibunuh. Yang

boleh dibunuh ketika jaman Rasulullah SAW hanyalah kafir *harbi*. Akan tetapi di zaman sekarang sudah tidak ada seperti itu. Oleh karena itu bagi orang-orang zaman sekarang yang hanya mengartikan *jihad* sebagai perang dan kekerasan itu bisa dikatakan kurang benar. Karena *jihad* yang seperti itu hanya ada pada masa Rasulullah SAW. Demikian halnya ketika proses pembelajaran, narasumber selaku guru pengampu Fiqih, mempunyai berbagai cara dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan khususnya materi *khilafah* dan *jihad*. Metode yang diterapkan oleh beliau ketika menyampaikan materi *khilafah* yaitu dengan metode ceramah. Adapun isi dari ceramahnya berupa penekanan tentang makna *khilafah* yang sesuai dengan ajaran Islam, selain itu beliau juga menggunakan metode perbandingan, membandingkan antara dasar pemerintahan Islam dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Beliau jabarkan satu persatu dari mulai sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, dipadukan dan dibandingkan dengan dasar dari pemerintah Islam yang juga menyebutkan Ketauhidan dalam dasarnya sampai seterusnya sila kelima. Beliau mengatakan bahwa secara tidak langsung Indonesia sudah menggunakan Undang-Undang Islam, seperti

pernikahan, haji, zakat dan lain sebagainya. Itu yang disampaikan kepada siswa. Bila ada siswa yang memiliki pendapat sendiri yang melenceng, narasumber menyikapi dengan memberikan arahan, bimbingan terkait pemikirannya yang salah serta meluruskannya kembali dari pemikiran radikalisme kepada pemikiran yang benar. Hal inilah yang ditakutkan oleh narasumber ketika tidak berhati-hati dalam menyampaikan materi ini. Demikian juga dengan metode yang digunakan dalam menyampaikan materi *jihad*. Narasumber menjelaskan makna *jihad* secara luas baik umum maupun khusus. Beliau menjelaskan *jihad* yang diartikan perang, kekerasan itu hanya ada di masa Rasulullah SAW, karena masa itu ada orang yang diperangi dan benar-benar orang yang salah dan memusuhi orang Islam. Sedangkan untuk masa sekarang dijelaskan *jihad* yang tepat yaitu berjuang melawan hawa nafsu, setan, menegakkan agama Allah, mencari Ilmu dan sebagainya itulah *jihad* untuk masa sekarang. Adapun evaluasi yang diterapkan oleh narasumber yaitu dengan tanya jawab dan ujian tertulis yang soalnya disesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator yang sudah dibuat.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Is'adur Rofiq (Guru

2. *Khilafah* dipahami sebagai pemerintahan Islam yang berdasarkan Al-qur'an dan Hadits sebagai Undang-Undang-nya. Pemahaman itulah yang membuat narasumber sangat menentang para ormas garis keras yang ingin menegakkan kembali pemerintahan Islam ini khususnya di Indonesia. Beliau menilai mereka termakan oleh ajaran *khilafah* di Suriah atau yang biasa disebut dengan ISIS. Karena dalam suatu pemerintahan, sistem dan dasar yang akan digunakannya harus disesuaikan dengan keadaan bangsa dan negaranya sendiri, dan di Indonesia sudah pas dan sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila disusun oleh para leluhur serta disesuaikan dengan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia. Bila diterapkan *khilafah* akan menyebabkan adanya pertengkar, karena dalam pemerintahan *khilafah* itu semua aspek kehidupannya harus sesuai dengan Al-qur'an dan Hadits, sedangkan di Indonesia tidak hanya mengakui agama Islam saja. Jadi, jika diterapkan maka akan terjadi proses pemaksaan kepada agama lain, padahal dikatakan bahwa dalam Islam tidak ada istilah pemaksaan. Maka dari itu, sangatlah tidak memungkinkan jika sistem ini diterapkan di negara

kita, karena pemerintah harus mengurus dan menyejahterakan rakyat yang berasal dari berbagai suku dan agama. Demikian juga beliau memberikan pemahamannya tentang *jihad*. Narasumber menjelaskan *jihad* dalam negara *khilafah* yaitu *jihad qital* melawan orang kafir. Dengan tidak mengabaikan makna kafir yang dimaksud. Dan *jihad* seperti itu tidak untuk di negara Indonesia. Kalau di Indonesia *jihad* nya yaitu melawan hawa nafsu, setan, dan segala kemaksiatan. Intinya narasumber memaknai *jihad* sebagai suatu hal yang berkaitan dengan *khilafah*. Narasumber memandang para oknum yang memaknai *jihad* hanya sekedar perang dan kekerasan, mereka terdoktrin oleh organisasi yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, dalam kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan dalam menyampaikan materi *khilafah* dan *jihad* yaitu ceramah, menjelaskan bahwa di Indonesia mempunyai dasar yaitu Pancasila, dan dalam pemerintahan Islam pun mempunyai dasar juga. Keduanya dipadukan dan dibandingkan dengan menjabarkan satu persatu seperti sila pertama dalam Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan pada dasar *khilafah* yaitu Penegakan Tauhid, keduanya sama tentang ketuhanan. Sila ke dua Pancasila yaitu

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sedangkan dalam dasar *khilafah* yaitu Ukhuwah Islamiyah, prinsip persaudaraan, masing-masing membicarakan tentang manusia semua itu bersaudara, adil tidak ada pilih kasih dan seterusnya sampai sila ke 5 itu sama dan hampir tidak ada perbedaan. Begitu pula *jihad*, narasumber menjelaskan makna *jihad* bukan sekadar perang melainkan memaknainya sebagai *jihad* nafsu, melawan hawa nafsu, memberantas kebodohan dan sebagainya. *Jihad* disini diartikan sebagai semangat. Beliau lebih memilih untuk tidak menjelaskan kepada siswa tentang *jihad qital*. Karena tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Dengan begitu, bila ada siswa yang mempunyai pendapat berbeda, narasumber mempunyai cara sendiri yaitu selain dengan meluruskan kesalahan pemikirannya juga menanamkan istilah “menang tak mungkin, mati sudah barang tentu” karena dengan cara itu membuat siswa berfikir ulang dan akan sadar bahwa pemahamannya itu salah. Untuk evaluasinya melalui penugasan yang diberikan oleh narasumber kepada siswa serta ujian tertulis yang diberikan ketika UTS maupun UAS.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subhan (Guru Fiqih) MA NU Banat Kudus pada hari Rabu tanggal, 4 Maret 2020



3. *Khilafah* dipersepsikan sebagai sebuah pemerintahan dalam Islam atau sistem pemerintahan yang ada di suatu negara. Tentang penerapannya, dikatakan bahwa secara tidak langsung sistem pemerintahan *khilafah* sudah diterapkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, termasuk Indonesia karena dalam *khilafah* pemerintahannya itu sesuai dengan syariat Islam, maka bisa dikatakan bahwa Indonesia dan negara lainnya yang mayoritas penduduknya muslim sudah mengikuti *khilafah*. Tetapi yang dimaksud disini adalah mengikuti dalam beberapa segi dan sebagian saja seperti syariatnya, pemerintahannya dan segala kegiatan politiknya. Jadi tidak secara keseluruhan satu negara menjadi *khilafah*. Beliau juga mengatakan bahwa dalam buku Fiqih disebutkan tentang tujuan *khilafah* salah satunya untuk mewujudkan dasar-dasar *khilafah*. Adapun dalam hal ini antara dasar *khilafah* dengan dasar negara Indonesia sudah sama persis. Itulah alasan narasumber mengungkapkan bahwa Indonesia sudah sesuai dan mengikuti *khilafah*. Akan tetapi memang hanya sebagian saja karena mengingat negara ini mengakui 6 agama sedangkan *khilafah* harus dijalankan sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, bagi oknum seperti

organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI) dan lain sebagainya, mereka yang menginginkan *khilafah* diterapkan kembali di negara Indonesia tidak akan mungkin terealisasi meskipun dipaksakan karena mereka para oknum tidak bisa melakukan toleransi antar umat beragama. Mereka seakan memaksa untuk mengislamkan Indonesia. Padahal dalam Islam sendiri segala hal yang kaitannya dengan paksaan itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana Firman Allah SWT,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ....

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).....(Q.S. al-Baqarah/2 : 256).<sup>88</sup>

Begitupun mengenai materi *jihad*, narasumber memaknai *jihad* dengan membedakan antara *jihad* di masa Rasulullah SAW, dan di masa kontemporer ini. Di masa Rasulullah SAW *jihad* jelas diartikan sebagai perang dengan kekerasan karena memang ada yang patut diperangi yaitu betul-betul orang yang salah. Sedangkan di masa sekarang, tidak ada yang akan kita perangi melainkan sebuah nafsu setan, kemaksiatan,

---

<sup>88</sup> Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), hlm. 63.

serta kebodohan lah yang harus diperangi. Seperti itulah pemahaman *jihad* yang harus dipahami untuk masa sekarang. Untuk metode yang dipilih oleh narasumber yaitu dengan mauidhoh hasanah atau ceramah. Beliau menjelaskan makna *khilafah* dan khalifah sejelas-jelasnya agar siswa tidak salah paham. Menyampaikan tentang sejarah *khilafah* dari mulai masa Rasulullah SAW sampai setelahnya. Menyampaikan bahwa antara dasar pemerintahan *khilafah* dan dasar pemerintahan Indonesia itu sama. Jadi Indonesia sebagian sudah mengikuti *khilafah*, bukan secara keseluruhan karena Indonesia bukan negara Islam dan mengakui 6 agama. Jadi sistem tersebut sangat tidak tepat diterapkan di negara ini. Serta tak lupa menekankan bahwa *khilafah* bukanlah suatu sistem yang menyuruh mengganti kepada syariat Islam secara keseluruhan akan tetapi cukup sesuai dengan syariat Islam. Begitupun dengan *jihad*, metode yang beliau gunakan yaitu tanya jawab di awal pembelajaran lalu beliau menjelaskan. Jikalau nanti dalam proses pembelajaran terdapat siswa yang kurang benar dalam memahami dan berpendapat, maka narasumber langsung meluruskan, memberikan pemahaman sedetail-detailnya dan menyisipkan

contoh di dalam penjelasannya sehingga membuat siswa lebih mudah paham. Adanya metode pembelajaran tentu adanya evaluasi yang diterapkan oleh narasumber untuk melihat seberapa efektif metode yang diterapkan dan seberapa mendalam pemahaman yang dimiliki siswa. Adapun evaluasi yang diterapkan yaitu melalui tes lisan berupa tanya jawab sebagaimana yang dilakukannya di awal pembelajaran, serta tes tertulis melalui UTS dan UAS.<sup>89</sup>

4. Narasumber lebih memaknai arti *khilafah* sebagai sebuah organisasi sebagaimana Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya. Beliau menyebut bahwa Muhammadiyah adalah *khilafah*. *Khilafah* di sini bukanlah mengubah negara Pancasila menjadi negara Islam, karena jika hal tersebut dilakukan harus melalui *jihad* terlebih dahulu, dalam hal ini yaitu *jihad qital*. Oleh karena itu narasumber lebih setuju jika Muhammadiyah itu disebut dengan *khilafah* versi perserikatan karena menurutnya Muhammadiyah sudah sesuai dan bisa menjalankan segala hal berdasarkan syariat Islam, dari mulai segi amaliyah dan ibadahnya sudah sesuai dengan *khilafah*. Akan

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali Musta'in (Guru Fiqih) MAN 2 Kudus pada hari Sabtu tanggal, 7 Maret 2020

tetapi memang tentang hukum pembunuhan, zina, minum-minuman keras belum mengikuti aturan *khilafah* zaman Rasulullah SAW. Jadi bagi oknum-oknum yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara *khilafah*, hal tersebut merupakan pemaksaan bagi mereka yang non muslim. Jika tetap dipaksakan maka akan menyebabkan perpecahan di negara ini dan perang saudara antar rakyat Indonesia. Di dalam sumber hukum orang Islam yaitu Al-qur'an dan Hadits tidak disebutkan tentang wajib tidaknya penegakan *khilafah* di suatu negara. Oleh sebab itulah, narasumber sangat menolak gagasan HTI dan ormas radikal lainnya karena negara ini sudah memiliki Pancasila yang telah dibentuk selama bertahun-tahun silam oleh para leluhur tokoh kemerdekaan dengan menyesuaikan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia. Isi dari Pancasila pun jika dipahami sudah mengikuti sebagaimana dasar dari *khilafah*. Misalnya sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa sedangkan dasar *khilafah* yaitu Penegakan Tauhid, keduanya sama-sama membicarakan tentang ketuhanan atau ketauhidan. Selain itu, sila ke empat Pancasila yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan

Perwakilan, sedangkan dalam dasar *khilafah* yaitu Musyawarah untuk Mufakat, keduanya membicarakan perihal musyawarah mufakat. Sila yang lain juga demikian. Kesimpulannya, narasumber lebih setuju dengan *khilafah* dalam bentuk perserikatan, bukan *khilafah* secara keseluruhan artinya mengubah negara ini menjadi negara *khilafah* sebagaimana lintas sejarah Islam. Begitupun tentang *jihad*, beliau memaknainya seperti makna yang ada dalam pelajaran Fiqih yaitu bersungguh-sungguh, artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu ibadah dan melaksanakan segala sesuatu yang disesuaikan dengan ajaran di Al-qur'an dan Hadits. Dalam Fiqih juga menyebutkan tentang *jihad qital* atau perang dan kekerasan. *Jihad* yang seperti ini hanya ada di masa Rasulullah SAW, yaitu *jihad* melawan orang kafir yang melawan Rasulullah SAW. Sedangkan di masa sekarang bukan lagi perang dalam kekerasan tetapi perang dalam memerangi hawa nafsu, godaan setan, kebodohan, kemiskinan dan memerangi kemaksiatan dengan cara yang ditentukan oleh syariat Islam tentunya. Narasumber memandang para teroris sudah melakukan hal yang dilarang oleh agama, mereka memberantas kemaksiatan tetapi dengan cara yang tidak dibenarkan

dalam syariat yaitu bom bunuh diri. Cara mereka tidak sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

Maksud dari hadits di atas, jika ada kemunkaran atau kemaksiatan maka rubahlah dengan kekuasaanmu, contohnya seperti pihak berwajib yang lebih berwenang. Jika tidak bisa dengan lisan atau dengan nasihat atau ceramah tetapi jika tetap tidak bisa maka dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya Iman. Adapun metode ketika menjelaskan materi *khilafah*, narasumber tidak secara langsung menjelaskan apa itu *khilafah* akan tetapi beliau menanamkan dan memperkuat tentang aqidah dalam diri tiap siswa seperti pikiran dalam berislam atau bermuhammadiyyin. Menerapkan jiwa keagamaan yang baik dengan tujuan hal tersebut membentengi siswa dari segala ancaman kelompok radikal. Sebagaimana materi *khilafah*, narasumber menanamkan arti *jihād* kepada siswa yaitu bersungguh-sungguh dan berjuang. Beliau memberikan contoh yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari siswa sebagai realisasi *jihād* di masa

sekarang dengan tujuan metode tersebut akan lebih mudah dipahami. Misalnya mencontohkan ketika siswa belajar, mendirikan sholat merupakan bagian dari *jihad* karena dilakukan untuk melawan kebodohan dan kemunkaran. Jika ada siswa yang hanya memiliki pemahaman bahwa *jihad* itu berperang, maka beliau akan memberikan penjelasan bahwa perang yang dimaksudkan di masa Rasulullah SAW untuk melawan orang kafir harbi. Atau bahkan ada siswa yang sudah telanjur terdoktrin dan terjerumus oleh kelompok radikal, narasumber akan menegurnya, mengingatkannya agar kembali pada ajaran Al-qur'an dan Hadits sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن  
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Jadi dalam ayat tersebut jelas dikatakan bila terjadi perbedaan pendapat maka kembalilah kepada Alquran dan Hadits maka semuanya akan aman dan baik-baik saja, dalam hal apapun itu. Jangan sampai dikembalikan pada nafsu karena akan menyebabkan pertengakaran. Dalam hal ini untuk melihat seberapa



dalam pemahaman siswa, evaluasi yang narasumber terapkan yaitu melalui ulangan harian, UTS maupun UAS dengan alasan tes tertulis akan membantu siswa mengembangkan kemampuan berbahasa dan kemampuan memecahkan masalah dan tentunya aspek kognitif siswa akan maksimal.<sup>90</sup>

5. *Khilafah* diartikan seperti yang terdapat dalam buku Fiqih MA yaitu berasal dari kata *khalafa*, artinya pengganti. Sedangkan menurut istilah adalah suatu sistem pemerintahan yang pelaksanaannya diatur dengan syariat Islam dan pemimpinnya disebut khalifah. Menurut beliau *khilafah* merupakan tujuan diciptakannya manusia yaitu sebagai *khalifah fil ardh*, pemimpin di muka bumi ini. Berkaitan dengan setuju tidaknya tentang penegakan kembali *khilafah* khususnya di Indonesia yang digemborkan oleh ormas radikal seperti HTI, beliau tidak memberikan pernyataan secara langsung setuju atau tidak, akan tetapi beliau lebih melihat dari sisi realita di Indonesia yang tidak hanya mengakui agama Islam saja. Beliau pun hanya mengatakan jika diberi pilihan tentang hukum yang akan beliau ikuti, beliau lebih

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono (Guru Fiqih) MA Muhammadiyah Kudusl pada hari Kamis tanggal, 12 Maret 2020

memilih untuk mengikuti hukum Islam murni daripada kompilasi hukum Islam (KHI) karena menurut beliau hukum Islam murni lebih lengkap. Narasumber berpendapat soal perdebatan *khilafah*, bahwa sebelum menuju pada penegakan kembali *khilafah*, alangkah baiknya memperbaiki tauhid dan aqidah bagi tiap pribadi seseorang dan itu narasumber lakukan sebagai tenaga pendidik dengan cara dakwah. Karena jika tauhid dan aqidah belum terbentuk sempurna dalam diri seorang muslim maka sangat tidak mungkin akan berdiri *khilafah*. Oleh karena itu narasumber menekankan pentingnya mengutamakan istilah dalam dakwah yaitu, *aulyat* yang artinya mengutamakan dari sisi apa, jangan hanya menggembarkan *khilafah*. Menurut beliau, Sangat percuma jika orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji tapi menggembarkan tentang *khilafah*. Jadi, bagi mereka organisasi-organisasi radikal yang ingin mengislamkan Indonesia dengan mendirikan *khilafah*, perlu diperhatikan dulu mengislamkan yang bagaimana, jika kaitannya mengislamkan dengan mengenalkan orang-orang Indonesia yang belum mengenal tentang syariat Islam saya setuju, akan tetapi jika yang dimaksud mengislamkan dalam arti

pemaksaan itu perlu dikoreksi lagi karena jelas Allah SWT telah berfirman :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ....

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).....(Q.S. al-Baqarah/2 : 256).<sup>91</sup>

Pemahaman tentang *jihad* juga diberikan oleh narasumber. Beliau mengartikan *jihad* yaitu berjuang. Sedangkan dalam buku Fiqih dijelaskan tentang *jihad qital*, berjuangya dilakukan dengan berperang. Pengertian inilah yang dipahami oleh oknum yang kurang belajar ilmu agama khususnya ilmu sejarah Islam. *Jihad* perang hanya ada ketikan zaman Rasulullah SAW karena di zaman tersebut terdapat orang kafir yang memerangi dan patut untuk diperangi. Karena dalam Islam tidak ada istilah kita yang memerangi terlebih dahulu, kita akan berperang jika ada yang memerangi. Selain itu, penetapan istilah kafir pun perlu diperhatikan. Tidak semua orang kafir di zaman tersebut diperangi dan boleh dibunuh, hanya kafir *harbi* yang boleh diperangi karena mereka mengancam keselamatan orang Islam pada masa itu. *Jihad* tentang peperangan tidak untuk diterapkan di

---

<sup>91</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), hlm. 63

zaman sekarang karena masa sekarang tidak ada lagi sebutan orang kafir dan tidak ada pula orang yang memerangi. Meskipun demikian, tetap ada orang yang menyalah artikan makna *jihad*, *jihad* memang memberantas kemaksiatan tetapi perlu diperhatikan maksiat yang seperti apa dan cara yang digunakan dalam memberantas juga di sesuaikan dengan anjuran syariat. Mereka para teroris yang dangkal ilmunya, hanya belajar agama pada satu sumber saja dan fanatik sehingga melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat yaitu memberantas kemaksiatan melalui aksi bom bunuh diri. Mereka salah dalam memahami makna *jihad* yang luas sehingga cara yang digunakannya pun tidak benar. Adapun dalam hal penerapan metode ketika menyampaikan materi *khilafah* dan *jihad* dalam proses pembelajaran yaitu, dengan memberikan himbauan terlebih dahulu sebelum masuk dalam materi pokok. Himbauan agar tidak mudah terprovokasi, terdoktrin oleh gerakan-gerakan yang radikal dan mengatasnamakan aksinya dengan *jihad* karena tidak mudah memahami tentang *khilafah* dan *jihad* yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai bergabung dalam kelompok-kelompok radikal yang suka melakukan aksi bom bunuh diri

serta yang suka menggembar-gemborkan tentang penegakan *khilafah* padahal mereka tidak paham dengan seluk-beluk *khilafah*. Setelah masuk ke materi, beliau menjelaskan dengan menggunakan metode berdakwah, menyampaikan bahwa *jihad* yang tepat untuk masa sekarang adalah dengan harta. Memberikan contoh yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari misalnya di organisasi Muhammadiyah yang melakukan *jihad amwal* atau harta dan tidak semata-mata dengan perang. Meskipun begitu, terkadang ada siswa yang memiliki pendapat berbeda bahkan melenceng dari apa yang narasumber ajarkan. Cara narasumber menyikapi yaitu dengan mendengarkan pendapat siswa sampai selesai, lalu beliau jelaskan bahwa pemahaman mereka itu kurang benar, beliau menunjukkan dalil tentang larangan membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang benar bagi mereka yang setuju dengan aksi bom bunuh diri. Selain itu beliau kembali menekankan dengan sedetail-detailnya tentang makna *khilafah* dan *jihad* beserta sejarah pelaksanaannya dari mulai masa Rasulullah SAW sampai sekarang. Menjelaskan tentang keadaan negara ini agar menggiring opininya tentang pantas tidaknya *khilafah* diterapkan di

Indonesia. Narasumber menyampaikan semuanya dengan pelan agar siswa mau mendengarkan dan tidak terkesan dihakimi. Dengan metode yang diterapkan oleh narasumber, maka evaluasinya melalui penugasan kepada siswa seperti mencari kitab yang isinya tentang *khilafah* dan *jihad* lalu menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.<sup>92</sup>

6. Berdasarkan pengetahuan pribadi maupun yang sesuai dalam pembelajaran Fiqih Politik Islam, Narasumber mengartikan *khilafah* secara teori itu baik karena merupakan sistem pemerintahan yang sudah disesuaikan dengan zaman Rasulullah SAW dan setelahnya. Sehingga sistem tersebut dapat dikatakan sebagai sistem yang sangat sesuai dengan Islam pada konteks waktu itu dan hal tersebut juga dihimpun dalam kitab-kitab Fiqih di masa sekarang. Akan tetapi kesesuaian sistem tersebut tidak untuk konteks sekarang khususnya di negara Indonesia meskipun dipaksakan. Mengingat Indonesia adalah negara kesatuan berdasarkan pada konstitusi UUD 1945 dan dasar negaranya Pancasila. Sehingga ketika ada orang yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riyadi (Guru Fiqih) MA Muhammadiyah Kudus pada hari Kamis tanggal, 12 Maret 2020

dengan sistem pemerintahan *khilafah* berarti bertentangan dengan cita-cita pendiri negara kita. Sebagaimana gerakan-gerakan radikal seperti HTI, FPI, mereka mencapai tujuannya dengan instan yaitu seketika mengubah, mengganti, bahkan membuang apa yang sudah jadi jerih payah para pendiri negara kita diganti menjadi *khilafah* menurut versi mereka. Narasumber berkali-kali menekankan bahwa *Khilafah* untuk konteks NKRI tidak pas. Menurut beliau mereka para kelompok radikal ingin membuat negara Indonesia menjadi *khilafah* versi pemahaman mereka. Mereka tidak mengakui cara yang legal dalam pemerintahan kita. Seperti adanya partai politik, mereka tidak mengakui bahkan mengharamkan untuk terjun di dunia politik, padahal mereka di dunia politik. Mereka ingin berkuasa tapi tidak menempuh cara-cara yang diakui di negara Indonesia. Selanjutnya narasumber juga mempersepsikan *jihad* secara bahasa yaitu bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah dibagi menjadi dua pengertian, secara umum dan secara khusus. Adapun secara umum beliau mengartikan sebagai setiap usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dalam rangka melaksanakan, membela, memperjuangkan agama

Islam, baik dengan tenaga, pikiran, harta bahkan nyawa. Misalnya orang ketika ibadah dia bersungguh-sungguh, siswa yang sekolah dengan bersungguh-sungguh, memberi harta pada kaum yg membutuhkan dan masih banyak lagi. Adapun *jihad* secara khusus yaitu *jihad qital* atau *jihad* dengan angkat senjata. *Jihad* ini ada cara-caranya, dan tata aturanya. Tidak seketika memutuskan akan berperang. Bagi mereka kelompok radikal hanya mengartikan *jihad* sebagai perang sebagaimana para teroris yang melakukan aksi bom bunuh diri dan mengatasnamakannya dengan berjihad. Menurut narasumber, mereka masuk kategori *jihad* ke tiga yaitu melawan orang dzolim akan tetapi bagi masyarakat sipil ini dibatasi kewenangannya oleh perundang-undangan, bila yang bukan aparat tidak bisa melakukan suatu hal yang semauanya seperti menghakimi pelaku. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

Itulah hadits tentang cara mengubah kemunkaran dalam arti *jihad* ketika ada kefasikan atau kedzoliman



tetapi caranya harus benar. Bukan seperti jihadnya orang radikal, dengan menghancurkan wilayah yang menurutnya mereka tempat kemaksiatan. Seperti melakukan bom bunuh diri di gereja. Jelas hal itu sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia yang mengakui beberapa negara, tidak adanya toleransi pada diri mereka. Sehingga mereka menganggap itu maksiat. Padahal bunuh diri saja sudah dilarang sama Allah SWT apalagi dengan melibatkan orang sekitar yang tidak tau apa-apa, sama saja dengan membunuh banyak orang. Padahal jelas dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ  
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ  
إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Ayat di atas mengatakan bahwa janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar kalau seperti itu berarti mereka melakukan larangan Allah SWT, jadi mereka melakukan pelanggaran. Dan tentunya balasan yang diperoleh adalah dosa. Narasumber memaparkan tentang pengetahuannya bahwa mereka menggunakan cara seperti itu, untuk membela kaum muslimin, agar orang-orang Kristen takut kepada kaum muslimin.

Akan tetapi kenyataannya, bukannya takut malah memperburuk citra Islam. Mereka menggunakan segala cara untuk *jihad* menurut persepsi sempit mereka. Persepsi yang dimiliki oleh narasumber tersebutlah yang akhirnya membuat Narasumber lebih memilih menerapkan metode ceramah yaitu dengan menyampaikan apa adanya kepada siswa sesuai teori yang diajarkan dalam Islam dari mulai definisi, dasar hukum, prinsip-prinsip yang mendasari sampai dengan sejarah pelaksanaan *khilafah* di masa Rasulullah Muhammad SAW dan setelahnya, serta tak lupa menjelaskan se detail-detailnya bahwa secara khusus konteks *khilafah* yang ada pada zaman Rasulullah SAW untuk saat ini belum bisa diterapkan, karena belum sesuai dengan cita-cita para pendiri negara ini. Beliau menekankan bahwa negara ini memutuskan menjadi negara kesatuan RI bukan negara *khilafah*. Karena negara kita ini mengakui tidak hanya satu agama melainkan ada 6 agama. Dikatakan bahwa *khilafah* yang sesuai dengan sejarah Islam tidak pas di Indonesia apalagi *khilafah* versi oknum tertentu. Begitupun dengan materi *jihad*, narasumber menjelaskan pengertiannya secara gamblang dan jelas sekaligus memaparkan macam-macam *jihad* disertai

contoh agar memudahkan siswa dalam memahami. Bila ada siswa yang pahamnya hanya *jihad qital*, narasumber menjelaskan, membenarkan sekaligus meluruskan kalau *jihad qital* tidak bisa diterapkan untuk zaman sekarang terutama di negara tercinta ini. Begitupun dengan penyampaian materi *khilafah*, bila ada siswa yang berbeda pandangan bahkan setuju dengan penegakan kembali *khilafah* di Indonesia maka narasumber akan mengatakan bahwa pandangannya salah, konteks beragama dan bernegara tidak bisa dipisahkan dan jika dilakukan itu namanya pemaksaan. Narasumber menanamkan dan memberikan penekanan bahwa teori atau konsep *khilafah* itu tidak salah, hanya saja jika diterapkan di Indonesia belum bisa karena tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita. Untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman siswa tentang konsep *khilafah* dan *jihad*, beliau menerapkan evaluasi dalam bentuk kuis lisan yang diadakan setiap selesai satu bab, lalu penugasan dengan meminta siswa mencari perbedaan *jihad* secara umum dan khusus.<sup>93</sup>

Oleh karena itu, dari deskripsi hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa inti dari persepsi

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mahmudi (Guru Fiqih) MA Ma'ahid Kudus pada hari Senin tanggal, 16 Maret 2020

yang disampaikan oleh narasumber tentang konsep *khilafah* adalah sebuah sistem pemerintahan yang pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu dalam penerapannya tidak cocok diterapkan di Indonesia dengan alasan Indonesia adalah negara yang mengakui enam agama, jika diterapkan maka akan terjadi adanya perpecahan, pertengakaran antar warga Indonesia yang justru hal tersebut sangat bertentangan dengan dasar negara Indonesia yang telah disusun oleh para tokoh leluhur kemerdekaan. Adapun pemahaman *jiha*d yaitu bersungguh-sungguh, berjuang melawan setan, hawa nafsu dan kemaksiatan. Bagi oknum yang menyalahartikan makna *khilafah* maupun *jiha*d, dianggap sebagai kelompok kurang akan pengetahuan agama dan hanya fanatik pada satu sumber saja sehingga hal tersebut membuat mereka mudah terdoktrin dan tercuci otaknya.

Demikian halnya dalam proses pembelajaran Fiqih, metode yang dipilih yaitu mauidhoh hasanah atau ceramah. Guru yang menjadi objek utama dalam kegiatan pembelajaran dikarenakan materi ini sangat rentan disalahpahaman dan jika kegiatan belajar mengajarnya berpusat pada siswa nantinya malah akan menimbulkan dampak buruk untuk siswa. Beberapa

narasumber juga memberikan himbauan diawal proses pembelajaran seperti jangan sampai terpengaruh dengan kelompok radikal, perbanyak pengetahuan agama agar tidak mudah terdoktrin dan lain sebagainya. Untuk evaluasinya, para guru menggunakan tes tertulis baik melalui ulangan harian per bab, penugasan maupun ketika ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

**B. Analisis Konsep *Khilafah* dan *Jihad* dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam (Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqh MA Se-Kabupaten Kudus)**

**1. Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqih MA Tentang Konsep *Khilafah* dan *Jihad* dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam**

**a. Persepsi Tentang Konsep *Khilafah* dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam**

Berdasarkan deskripsi hasil dari wawancara dengan para Guru Mapel Fiqih di Madarasah Aliyah bahwasanya secara umum persepsi yang mereka sampaikan terkait dengan *khilafah* ditinjau dari segi bahasa *khalafa*, yaitu pengganti. Sedangkan bila diartikan secara istilah

*Khilafah* maknanya sudah masyhur yaitu sistem pemerintahan yang pelaksanaannya diatur dengan syari'at Islam atau suatu sistem pemerintahan Islam yang ketika menjalankannya harus sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits serta merupakan sistem pemerintahan yang sudah disesuaikan dan diterapkan ketika masa Rasulullah Muhammad SAW dan setelahnya.<sup>94</sup> Adapun teori ini selaras dengan teori yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun, bahwa *khilafah* adalah memerintah rakyat sesuai aturan syariat Islam demi kebaikan akhirat mereka dan juga kebaikan dunia yang kembali pada kepentingan akhirat.<sup>95</sup> Selain itu semakna juga dengan pendapat sebagian ulama yang mengungkapkan bahwa khalifah adalah pengganti fungsi Rasulullah Muhammad SAW yang disaat hidupnya menangani masalah-masalah

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subhan, Bapak Riyadi, dan Bapak Ali Mahmudi (Guru Fiqih) MA NU Banat, MA Muhammadiyah, dan MA Ma'ahid Kudus pada tanggal, 4-16 Maret 2020

<sup>95</sup> Ali Abdul ar-Raziq, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan*, (Yogyakarta : Jendela, 2002), hlm. 4-5.

keagamaan yang diterimanya dari Allah SWT, dan bertugas memelihara pelaksanaan ajaran agama sekaligus mengurus persoalan politik keduniaan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW wafat, para khalifah pun menjadi penggantinya dalam memelihara kelestarian urusan agama dan urusan politik keduniaan. Maka, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *khilafah* disini adalah sebuah sistem pemerintah Islam sebagai pengganti Rasulullah SAW dalam fungsinya menerapkan syari'at Islam dan mengurus persoalan politik keduniaan.<sup>96</sup>

Eksistensi *khilafah* dalam lintas sejarah Islam telah runtuh oleh berbagai faktor, namun banyak kalangan yang masih mengenang romantisme kejayaan Islam di masa lalu dan berusaha untuk mewujudkan kembali konsep tersebut dengan berbagai cara. Para narasumber menyampaikan ketidaksetujuannya atas

---

<sup>96</sup> Ali Abdul ar-Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Terj. Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 5.

wacana terwujudnya kembali sistem *khilafah* terkhusus untuk diterapkan di Indonesia. Ketidaksetujuan mereka dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yaitu ketiadaan dalil di dalam al-Qur'an maupun Hadits yang mewajibkan tentang penegakan *khilafah* di suatu negara.<sup>97</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. an-Nisa'/4 : 59).

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono (Guru Fiqih) MA Muhammadiyah Kudusl pada hari Kamis tanggal, 12 Maret 2020



وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا  
بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ  
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ  
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا  
قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu) (Q.S. an-Nisa'/4 : 83).<sup>98</sup>

Kandungan kedua ayat di atas adalah tentang perlunya pemimpin untuk dijadikan tempat rujukan bagi persoalan-persoalan yang dihadapi. Tidak sama sekali terdapat kandungan makna *khilafah* secara langsung dalam kedua ayat

---

<sup>98</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), hlm. 132.

tersebut.<sup>99</sup> Mengenai awal mula gagasan penegakan kembali *khilafah* muncul dari kalangan yang tergabung dalam sebuah organisasi ekstrem seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI) dan sebagainya. Para narasumber memandang HTI maupun organisasi lainnya yang menginginkan tegaknya kembali *khilafah* di Indonesia hanya akan mewujudkan perpecahan di negara ini karena banyak terjadi perdebatan, saling sindir, bahkan saling menjatuhkan satu sama lain. Oleh karena itu mereka seluruhnya sepakat untuk menentang sekaligus mengecam para organisasi tersebut, bagi mereka organisasi tersebut hanyalah ormas yang termakan oleh ajaran *khilafah* di Suriah atau biasa dikenal dengan ISIS.<sup>100</sup> Jelas yang mereka inginkan tidak akan terwujud di negara ini dengan melihat kenyataan yang ada bahwa

---

<sup>99</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasiasian al-Qur'an*, Volume 2, (Jakarta : Lintera Hati, Cet. VIII, 2007), hlm. 484.

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subhan (Guru Fiqih) MA NU Banat Kudus pada hari Rabu tanggal, 4 Maret 2020

negara ini tidak hanya mengakui satu agama saja. Terdapat 5 agama yang lain. Dalam agama Islam pun tidak pernah mengajarkan tentang pemaksaan dan kekerasan. Jika negara ini diubah pasti akan terjadi perang saudara antar rakyat Indonesia.<sup>101</sup> Bentuk kecaman dari narasumber diwujudkan dengan mendukung pihak pemerintah yang membubarkan ormas radikal yang terus menggembar-gemborkan perihal tegaknya *khilafah* yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).<sup>102</sup>

Umumnya, penolakan yang dikatakan narasumber tentang penegakan *khilafah* disampaikan dengan alasan bahwa Indonesia sudah pas dengan hasil perjuangan pahlawan kemerdekaan atas terbentuknya dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, karena kelima sila yang terdapat didalamnya telah disusun dan disesuaikan

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono (Guru Fiqih) MA Muhammadiyah Kudus pada hari Kamis tanggal, 12 Maret 2020

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Is'adur Rofiq (Guru Fiqih) MAN 2 Kudus pada hari Selasa tanggal, 3 Maret 2020

dengan kepribadian dan cita-cita bangsa ini. Tidak bisa diubah-ubah lagi meskipun dipaksakan. Perlu diingat jika ingin mengubah menjadi sebuah negara Islam dengan sistem pemerintahan *khilafah* terkhusus *khilafah* sebagaimana lintas sejarah Islam, sungguh tidak mudah syarat yang harus dipenuhi karena jika kita menengok kembali pada pengertian *khilafah* yaitu suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan Al-qur'an dan Hadits. Sedangkan di negara tercinta ini mengakui 6 agama, tidak hanya Islam saja. Maka bila Indonesia diubah menjadi *khilafah*, hal tersebut akan menjadi suatu aksi pemaksaan bagi non muslim padahal dalam Islam itu damai dan dilarang adanya pemaksaan.

Dengan pemaksaan hanya akan memicu adanya perang saudara. Oleh sebab itulah di negara ini sangatlah tidak memungkinkan jika diubah sepenuhnya menjadi negara dengan sistem

*kekhilafahan*.<sup>103</sup> Karena hal tersebut bertentangan dengan cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana sejalan dengan teori yang dipaparkan melalui musyawarah nasional, bahwa Inti dari Musyawarah Nasional Alim Ulama pada tahun 2014, NU mengatakan bahwa NKRI adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini, maka dari itu jika muncul gerakan yang mengancam keutuhan NKRI (pembentukan *khilafah*) wajib ditangkal, sebab akan menimbulkan *mafsadah* yang besar dan perpecahan umat.<sup>104</sup> Sama halnya yang dikatakan oleh salah satu narasumber yang berasal dari ormas Muhammadiyah bahwa sebelum menuju ke *khilafahnya*, harus membangun tauhidnya dulu. Menurut narasumber, jika tauhid dan aqidah belum terbentuk sempurna dalam diri seorang muslim maka sangat tidak mungkin akan berdiri suatu

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono (Guru Fiqih) MA Muhammadiyah Kudusl pada hari Kamis tanggal, 12 Maret 2020

<sup>104</sup> Komaruddin Hidayat (ed), *Kontroversi Khilafah Islam, Negara, dan Pancasila*, (Bandung : Mizan, 2014), h;m. 149-150.

sistem *khilafah*. Narasumber mengatakan tentang pentingnya mengutamakan istilah dalam dakwah yaitu, *aulyat* yang artinya mengutamakan dari sisi apa, jangan hanya menggembarkan-gemborkan *khilafah*. Sangat percuma jika orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji tapi menggembarkan-gemborkan tentang *khilafah*. Meskipun demikian jika kita cermati kembali, mengenai tujuan didirikannya *khilafah* yaitu menegakkan prinsip-prinsip atau dasar *khilafah*<sup>105</sup>, sedangkan antara dasar *khilafah* itu dengan dasar negara Indonesia tidak jauh berbeda bahkan bisa dikatakan sama persis dari mulai sila pertama yaitu ketuhanan begitu pula dengan dasar *khilafah* yang pertama yaitu ketauhidan atau sama juga dengan ketuhanan. Begitupun seterusnya sampai sila ke 5.<sup>106</sup> Oleh karena itu, para

---

<sup>105</sup> Amari Ma'ruf, dkk, *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2016), hlm. 8

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono (Guru Fiqih) MA Muhammadiyah Kudusl pada hari Kamis tanggal, 12 Maret 2020

narasumber mengatakan bahwa negara ini sudah sesuai dengan konsep *khilafah* dari segi prinsip yang mendasarinya.

**b. Persepsi Tentang Konsep *Jihad* dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam**

Pembahasan *khilafah* tentu tak bisa dipisahkan dengan pembahasan *jihad* karena keduanya sering dikaitkan oleh para HTI yaitu bagi mereka yang tidak setuju dengan adanya penegakan *khilafah* maka mereka harus diperangi, dan perang itulah yang tak jarang diatasmakan dengan *jihad* di jalan Allah. Karena bagi mereka para teroris, *jihad* itu adalah memberantas kemunkaran, akan tetapi makna kemunkaran yang mereka maksud hanyalah makna subjektif semata yang berasal dari sudut pandang mereka bukan berdasarkan syariat Islam. *Jihad* yang seperti itu sangat bertentangan dengan *jihad* yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu ketika proses wawancara, para narasumber memaparkan tentang konsep *jihad* yang berasal dari

bahasa Arab *jahada-yujahidu* yang artinya berjuang, bersungguh-sungguh dalam segala hal.<sup>107</sup> Sedangkan secara istilah dibagi menjadi 2 yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian umum yaitu setiap usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dalam rangka melaksanakan, membela sekaligus memperjuangkan agama Islam serta menegakkan kalimat Allah SWT.<sup>108</sup> Teori yang dikemukakan oleh narasumber, senada dengan makna yang diberikan oleh Malikiyyah baik dengan tenaga, pikiran, harta bahkan nyawa. Misalnya orang ketika ibadah dia bersungguh-sungguh, siswa yang sekolah dengan bersungguh-sungguh, memberi harta pada kaum yg membutuhkan dan lain sebagainya. Adapun *jihad* secara khusus yaitu *jihad qital* atau *jihad* dengan angkat senjata. Hal ini sejalan dengan teori dari madzhab

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Is'adur Rofiq (Guru Fiqih) MAN 2 Kudus pada hari Selasa tanggal, 3 Maret 2020

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mahmudi (Guru Fiqih) MA Ma'ahid Kudus pada hari Senin tanggal, 16 Maret 2020



Syafi'iyah mengartikan *jihad* merupakan sesuatu yang diteladani yang ditafsirkan sebagai sejarah hidup Rasulullah SAW.<sup>109</sup> Karena memang *jihad* yang diartikan sebagai perang hanya ada di masa Rasulullah SAW. *Jihad qital* ada cara-caranya, dan tata aturannya. Tidak seketika memutuskan akan berperang. Makna khusus inilah yang sering disalah persespsikan oleh banyak orang dalam mengartikan *jihad*.

Pada masa Rasulullah SAW, *jihad* memang banyak diartikan dengan perang karena memang ada yang diperangi dan betul-betul orang yang salah dan melanggar syariat Islam yaitu orang kafir atau orang-orang yang melawan Rasulullah SAW. Akan tetapi di masa beliau tidak semua kafir mereka perangi karena terminologi kafir dalam ilmu Fiqih sangat beragam; ada kafir *harbi*, kafir *dzimmi*, kafir *musta'man*, dan kafir *mu'ahhad*.

---

<sup>109</sup> Anthin Lathifah, *Geneologi Fiqh Jihad Studi Komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian*, (Semarang : Anggarap DIPA IAIN Walisongo, 2012), hlm. 23

Yang boleh dibunuh ketika zaman Rasulullah SAW yaitu kafir *harbi*, karena mereka mengintimidasi kehidupan orang Islam, mendzolimi dan mengganggu orang Islam beribadah. Oleh sebab itu *jihad* yang hanya diartikan sebagai perang tidak bisa diterapkan untuk masa sekarang khususnya di negara Indonesia karena sudah tidak ada lagi sebutan orang kafir serta tidak ada pula yang mulai memerangi. Jadi tidak mungkin ada *jihad* yang diartikan perang berupa kekerasan di negara Indonesia, melainkan *jihad* untuk masa sekarang diartikan bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu, godaan syaitan dan melawan segala bentuk kemunkaran atau kemaksiatan.<sup>110</sup> Akan tetapi kemaksiatan di sini juga perlu diperhatikan terlebih dahulu, apakah memang sebuah kemaksiatan yang dilarang oleh syariat agama Islam atau hanya sebuah kemaksiatan menurut persepsi subjektif dari pihak tertentu saja. Seperti teori yang

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subhan (Guru Fiqih) MA NU Banat Kudus pada hari Rabu tanggal, 4 Maret 2020

diungkapkan oleh Prof. M.Quraish Shihab bahwa *jihad* yang seharusnya dipahami di masa kontemporer ini sangat beraneka ragam misalnya memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit adalah *jihad* yang tidak kurang pentingnya dari yang mengangkat senjata. Tak bisa jika *jihad* hanya diartikan sebagai perang fisik semata, karena lebih dari itu. Seperti ilmuwan yang berjihad dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan bekerja dengan baik, guru dengan pendidikan yang sempurna, pemimpin dengan keadilannya, penguasa dengan kejujurannya, dan seterusnya.<sup>111</sup>

Sebagaimana para teroris menurut pandangan narasumber, mereka kurang dalam mempelajari ilmu agama, fanatik dalam satu ilmu saja sehingga tidak faham betul tentang luasnya makna *jihad* dan tentunya mudah terdoktrin oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.

---

<sup>111</sup> Muhammad Chirzin, *kontroversi Jihad di Indonesia Modernis Vs Fundamentalis*, (Yogyakarta : Nuansa Aksara, 2006), hlm. 11.

Para teroris memandang non muslim sebagai orang kafir yang harus di perangi. Karena mereka hanya paham *jihad* itu ya melawan orang kafir saja seperti *jihad* ketika zaman Rasulullah SAW. Adapun cara mereka memerangnya dengan melakukan aksi bom bunuh diri dan mirisnya hal tersebut diatasnamakan dengan *jihad fisabilillah*. Padahal dalam Islam ada cara-cara ketika menyikapi suatu kemaksiatan yang benar-benar dilarang oleh syariat Islam tidak serta merta dengan memerangnya melalui bom bunuh diri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْرِضْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

Dari Abu Sa'id Al Khudri radiallyallahu anhu berkata : Saya mendengar Rasulullah shallallohu 'alaihi wa sallam bersabda : Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. (H.R Muslim)

Dalam hadits tersebut jelas disebutkan tentang tata cara ketika ada kemunkaran atau kemaksiatan yaitu pertama dengan tangan atau kekuasaan seperti pihak berwajib yang lebih berwenang atau yang lainnya bila belum bisa maka dengan mulut atau dengan nasihat, ceramah akan tetapi jika tetap tidak bisa yang terakhir dengan hati. Itulah selemah-lemahnya Iman.<sup>112</sup>

Para narasumber menekankan bahwa bukan *khilafah* atau *jihad* yang salah akan tetapi para oknumlah yang salah dalam memahami keduanya, sehingga segala cara, perbuatan, dan aksi yang mereka tempuh akan sejalan dengan pemahamannya tersebut. Dalam dunia pendidikan, Narasumber berpendapat bahwa *Khilafah Islamiyah* dan *Jihad* merupakan bagian dari materi pembelajaran keislaman yang harus

---

<sup>112</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasiasian al-Qur'an*, Volume 2, (Jakarta : Lintera Hati, Cet. VIII, 2007), hlm. 484.

diketahui oleh siswa baik sejarah, konsep maupun proses pelaksanaannya dengan lengkap dan jelas. Dengan begitu, siswa tidak akan mudah terdoktrin dan terjerumus dalam organisasi yang ekstrem.<sup>113</sup> Selain itu dengan mengetahui sejarah, konsep, maupun proses pelaksanaan dari *khilafah* maupun *jihad* sama saja kita belajar dan menambah wawasan tentang *fiqih siyasah*, dimana *fiqih siyasah* mempunyai manfaat yang bisa dipetik diantaranya yaitu seorang *faqih* yang mendalami *fiqh siyasah* tidak akan bingung ketika menghadapi perbedaan pendapat ulama. Dalam hal ini *faqih* yaitu siswa. Ia dapat mentarjih pendapat ulama-ulama tersebut. Pentarjihannya tidak hanya dilakukan dari segi lafal (*linguistic*) dan nilai suatu dalil (*qath'i*, *dzanny*, *shohih* atau *hasan*) tetapi juga dilakukan dari sisi *siyasah*. Dalam

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riyadi (Guru Fiqih) MA Muhammadiyah Kudus pada hari Kamis tanggal, 12 Maret 2020

hubungan ini, pendapat mana yang lebih mendekati dalil-dalil *kulli* dan sekaligus lebih sesuai dengan kondisi dan situasi. Singkatnya, penentuan atas pendapat yang lebih maslahat untuk diterapkan dalam mengindahkan dan merekayasa masyarakat. Selanjutnya, dengan mempelajari *fiqh siyasah* ini, akan terbukti bahwa syariah Islamiyah itu adalah syariah yang alamiah, syariah yang universal, di samping merupakan syariah yang memenuhi tuntutan-tuntutan yang bersifat lokal dan regional.<sup>114</sup>

## **2. Metode yang Digunakan Guru Fiqih MA Ketika Menyampaikan Materi Kepada Siswa Tentang Konsep *Khilafah* dan *Jihad*.**

### **a. Metode yang Digunakan Guru Fiqih MA Ketika Menyampaikan Materi Kepada Siswa Tentang Konsep *Khilafah* dan *Jihad*.**

Adapun hasil dari wawancara, metode yang digunakan oleh para

---

<sup>114</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 43.

narasumber ketika menyampaikan yaitu metode ceramah dan sebagian ada yang divariasi dengan tanya jawab serta diskusi. Akan tetapi sebagian besar guru lebih memilih hanya menggunakan metode ceramah saja.<sup>115</sup> Metode ini merupakan metode yang paling populer. Metode ini bersifat memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah siswa pada waktu dan tempat tertentu. Metode ini memungkinkan banyak materi yang disampaikan, adanya kesempatan bagi guru untuk menekankan bagian yang penting.<sup>116</sup> Teori tersebut sejalan dengan yang dilakukan para guru yaitu menjelaskan materi dengan lengkap dan se jelas-jelasnya, dalam hal ini tentang konsep *khilafah* dan *jihad*. Guru memaparkan tentang konsep *khilafah* baik mulai definisi, sejarah sampai proses pelaksanaannya yang disesuaikan dengan lintas sejarah Islam. Di samping itu, ada

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Guru Fiqih MA di Kabupaten Kudus pada tanggal, 3-16 Maret 2020.

<sup>116</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.138.



narasumber yang memberikan motivasi dan himbauan di awal proses pembelajaran agar siswa tidak mudah terpengaruh, terdoktrin atau bahkan terjerumus oleh ajaran kelompok-kelompok radikal. Adapun definisi *khilafah* yang disampaikan guru Fiqih yaitu secara bahasa berasal dari kata *khalafa* artinya pengganti.<sup>117</sup> Sedangkan secara istilah yaitu suatu sistem pemerintahan negara yang berdasarkan dengan Al-qur'an dan Hadits. Selain definisi, narasumber juga menjelaskan tentang dasar hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari *khilafah* sekaligus memadukan dan membandingkan dengan dasar negara Indonesia, lalu menyampaikan apa adanya tentang sejarah pelaksanaan sistem *khilafah* dari mulai masa Rasulullah SAW dan setelahnya. Serta tak lupa menjelaskan se detail-detailnya bahwa secara khusus konteks *khilafah* yang ada pada zaman

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riyadi (Guru Fiqih) MA Muhammadiyah Kudus pada hari Kamis tanggal, 12 Maret 2020.

Rasulullah SAW untuk saat ini belum bisa diterapkan sepenuhnya, karena belum sesuai dengan cita-cita para pendiri negara ini. Narasumber menekankan bahwa negara ini memutuskan menjadi negara kesatuan RI bukan negara *khilafah*. Karena negara kita ini mengakui tidak hanya satu agama melainkan ada 6 agama. Bila tetap ada siswa yang memiliki pendapat bahwa Indonesia harus ditegakkan *khilafah*, maka narasumber akan mengatakan bahwa pemahaman siswa itu keliru, dan tentunya meluruskannya kembali dengan memberikan penjelasan tentang kondisi di Indonesia yang tidak tepat dengan adanya penegakan *khilafah*. Begitu pula dengan konsep *jiha*d. Guru menjelaskan tentang makna *jiha*d yang luas yaitu *jiha*d secara umum maupun khusus bukan hanya sekadar *jiha*d *qital*.<sup>118</sup> Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar siswa memiliki khazanah ilmu pengetahuan yang

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mahmudi (Guru Fiqih) MA Ma'ahid Kudus pada hari Senin tanggal, 16 Maret 2020.

luas, tidak hanya fanatik pada satu sumber saja dan tentunya tidak mudah terdoktrin oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Memberikan contoh *jihad* yang tepat untuk masa sekarang khususnya di negara Indonesia. Guru juga mengelaborasi contoh dengan aktivitas sehari-hari siswa sehingga hal tersebut akan lebih efektif dan membuat siswa mudah dalam menangkap sekaligus memahami penjelasan dari guru. Misalnya siswa belajar bisa dikatakan sebagai *jihad*, yaitu bersungguh-sungguh melawan kebodohan dan lain sebagainya. Bila ada siswa yang memiliki pendapat yang berbeda, guru memilih untuk tidak langsung memotong pendapatnya dan menyalahkannya, akan tetapi guru lebih mendengarkan terlebih dahulu pendapat siswa, lalu guru meluruskan pendapat siswa dengan bahasa yang baik. Artinya disini seorang guru benar-benar diuji apakah dia dapat berkomunikasi dengan baik atau tidak dengan siswa.

Disamping menjelaskan dari sisi historis dan proses pelaksanaan *khilafah* dan *jihad*, guru dalam menjelaskan juga menggunakan metode analisis dan metode perbandingan. Karena kedua materi yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini, merupakan bagian dari Fiqih Siyasah yang termasuk ilmu sosial dan selalu hidup maka dalam pengembangan kajiannya harus dibantu dengan metode lainnya.<sup>119</sup> Guru menganalisis makna dan konsep *khilafah* yang sesuai dengan syariat Islam, bukan makna dari oknum tertentu serta menganalisis makna *jihad* yang tepat untuk masa kontemporer ini. Sedangkan metode perbandingan yang digunakan oleh guru yaitu dengan membandingkan antara dasar-dasar *khilafah* dengan dasar-dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, misalnya isi dari dasar negara Indonesia sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, begitupun dengan dasar *khilafah* yang salah satunya

---

<sup>119</sup> Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 21.

yaitu tauhid atau mengesakan Allah SWT. Keduanya sama-sama merupakan sikap tunduk dan patuh secara total hanya kepada Allah SWT.<sup>120</sup>

#### **b. Kegiatan Evaluasi**

Adanya metode yang digunakan ketika penyampaian materi, tentu dibutuhkan suatu evaluasi untuk menjadi tolok ukur tentang keefektifan metode tersebut sekaligus untuk melihat seberapa dalam siswa memahami materi tersebut. Setiap narasumber memiliki beragam cara untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Dari hasil wawancara, mayoritas para guru Fiqih menggunakan tes tertulis baik ketika ulangan harian maupun UTS dan UAS dengan alasan jika menggunakan tes tertulis yang bersifat uraian akan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berbahasanya dan kemampuan memecahkan masalah. Sedangkan tes tertulis yang pilihan ganda juga memiliki

---

<sup>120</sup> Amari Ma'ruf, dkk, *Buku Siswa Fiqih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2016), hlm. 7-16.

keunggulan dapat mengukur aspek kognitif siswa yang lebih maksimal.<sup>121</sup> Alasan yang diungkapkan tersebut selaras dengan teori tentang keunggulan dari tes tertulis bentuk uraian non objektif yaitu (a) Mengukur aspek kognitif yang lebih tinggi. (b) Melatih kemampuan berfikir teratur pada peserta didik. (c) Mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. (d) Mengembangkan kemampuan berbahasa bagi peserta didik. (e) Penyusunan soal tidak membutuhkan waktu yang lama. (f) Menghindari sifat terkaan pada diri peserta didik.<sup>122</sup> Guru juga menggunakan teknik penugasan sebagai salah satu langkah untuk mengevaluasi. Tugas yang diberikan oleh guru sebagian diantaranya seperti meminta siswa untuk mencari dasar *khilafah* dari berbagai sumber yang berbeda seperti kitab gandel atau buku-

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono (Guru Fiqih) MA Muhammadiyah Kudus pada hari Kamis tanggal, 12 Maret 2020

<sup>122</sup> Kunandar, *Penilaian Autentik Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 213.

buku para tokoh terdahulu, lalu diidentifikasi perbedaan dan persamaannya. Sedangkan dalam materi *jihad*, guru meminta siswa membuat contoh tentang *jihad* yang relevan untuk masa sekarang seperti belajar untuk melawan kebodohan, bekerja untuk melawan kemiskinan dan lain sebagainya.<sup>123</sup> Selain itu, ketika maraknya aksi bom bunuh diri yang ada di Bali dan tempat lainnya, guru memberikan tugas untuk mencari berita mengenai hal tersebut lalu menganalisisnya setelah itu, guru membahas dan menjelaskan kembali ketika pembelajaran di kelas.<sup>124</sup>

### **C. Keterbatasan Penulis**

Adapun hasil penelitian yang ditemukan merupakan usaha maksimal, namun tetap disadari tidak ada yang sempurna di dunia ini dan akhirnya

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Is'adur Rofiq (Guru Fiqih) MAN 2 Kudus pada hari Selasa tanggal, 3 Maret 2020

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mahmudi (Guru Fiqih) MA Ma'ahid Kudus pada hari Senin tanggal, 16 Maret 2020

semua ada keterbatasannya. Maka, diyakini bahwa hasil penelitian yang diperoleh tetap dapat dijasikan pacuan awal bagi penelitian selanjutnya, dalam hal ini ada yang perlu dijelaskan tentang keterbatasan penelitian yang dimaksud antara lain :

1. Keterbatasan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di kota Kudus dengan subjek penelitian yaitu Guru mapel Fiqih MA se-Kabupaten Kudus. Jarak yang jauh antar satu madrasah dengan madrasah yang lain membuat narasumber hanya mengambil sampel madrasah berdasarkan lokasi yang mudah dijangkau.

2. Keterbatasan Kemampuan

Penelitian tidak bisa lepas dari teori, oleh karena itu disadari adanya keterbatasan kemampuan khususnya pengetahuan ilmiah dan ilmu tentang metodologi penelitian.

3. Keterbatasan Waktu

Penelitian yang dilakukan dibatasi oleh waktu, karena waktu yang tersedia untuk penelitian sangat terbatas. Maka peneliti hanya



memiliki waktu sesuai kemampuan yang berhubungan dengan peneliti saja. Walaupun waktu yang tersedia cukup singkat akan tetapi bisa memenuhi syarat-syarat dalam prosedur penelitian. Selain itu penelitian ini dilakukan pada waktu terjadinya pandemi corona jadi peneliti dalam melakukan penelitian ini terhambat oleh batas waktu yang tidak ditentukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis teliti tentang Konsep *Khilafah* dan *Jihad* dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam (Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqih MA se-Kabupaten Kudus), persepsi yang guru sampaikan secara umum sudah benar, hal ini dapat terlihat dari pemahaman yang disampaikannya melalui proses wawancara. Umumnya, pendapat yang dikemukakan oleh guru sesuai dengan pendapat para tokoh yang dijadikan sebagai landasan teori. Selain itu apa yang guru katakan tidak bergeser sedikitpun dengan buku pedoman Fiqih yang terbukti ketika guru mengajar, disesuaikan dengan kurikulum yang berdasarkan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), artinya di dalam proses pembelajaran, guru sedikitpun tidak ada unsur mendoktrin siswa. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi guru Fiqih MA tentang konsep *khilafah* dan *jihad* dalam konstelasi pembelajaran Fiqih Politik Islam.

Pada umumnya narasumber memberikan pemahaman tentang *khilafah* ditinjau dari segi bahasa *khalafa*, yaitu pengganti. Sedangkan secara istilah *Khilafah* yaitu sistem pemerintahan yang pelaksanaannya diatur dengan syari'at Islam atau

suatu sistem pemerintahan Islam yang ketika menjalankannya harus sesuai dengan Al-qur'an dan Hadits.

Dalam hal penerapannya, secara umum narasumber sepakat tidak menyetujui dan mengecam kelompok-kelompok yang ingin mendirikan kembali bahkan mengubah Indonesia menjadi negara dengan sistem *khilafah* yang pelaksanaannya sebagaimana *khilafah* dalam lintas sejarah Islam, dengan alasan jika *khilafah* tegak di Indonesia maka akan menyebabkan perang saudara karena di Indonesia tidak hanya mengakui agama Islam saja melainkan ada lima agama yang lain. Selain itu, dikatakan bahwa Indonesia sudah pas dengan hasil perjuangan pahlawan kemerdekaan atas terbentuknya dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, karena kelima sila yang terdapat didalamnya telah disusun dan disesuaikan dengan kepribadian dan cita-cita bangsa ini. Adapun bentuk kecaman para narasumber diwujudkan dengan mendukung aksi pemerintah yang membubarkan salah satu organisasi masyarakat yang menginginkan tegaknya kembali kekhilafahan di Indonesia yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Begitupula dengan pemahaman konsep *jihad* yaitu berasal dari bahasa Arab *jahada-yujahidu* yang artinya berjuang, bersungguh-sungguh dalam segala hal. Sedangkan secara istilah dibagi menjadi 2 yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian umum yaitu setiap usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dalam rangka melaksanakan, membela, memperjuangkan agama Islam serta menegakkan kalimat Allah SWT. Sedangkan pengertian khususnya yaitu *jihad qital*, *jihad* dengan peperangan, berjuang dengan cara kekerasan. Bagi mereka yang hanya mengartikan *jihad* sekadar dengan peperangan atau kekerasan maka mereka termasuk golongan orang-orang yang dangkal akan pengetahuan agama dan fanatik dengan satu sumber saja.

2. Metode yang digunakan guru Fiqih MA ketika menyampaikan materi kepada siswa tentang konsep *khilafah* dan *jihad*.

Metode yang dipilih ketika menyampaikan materi kepada siswa tentang konsep *khilafah* dan *jihad* yaitu dengan menggunakan metode ceramah yang terkadang juga diberi imbuhan metode tanya jawab sederhana. Materi yang disampaikan sangat

rentan akan kesalahpahaman jika kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa, oleh sebab itulah menjadi penyebab dipilihnya metode tersebut karena proses pembelajarannya secara keseluruhan berpusat dan dikendalikan oleh guru.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Konsep *Khilafah* dan *Jihad* dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam (Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqih MA se-Kabupaten Kudus), penulis memiliki saran untuk pihak tertentu diantaranya :

### **1. Bagi Guru**

Guru Fiqih sudah baik dalam menyampaikan materi di kelas, tetapi untuk metode yang digunakan hendaknya lebih dikembangkan lagi atau dikolaborasikan dengan metode-metode yang efektif lainnya agar membuat siswa lebih tertarik dalam mendengarkan, memperhatikan dan tentunya akan lebih mudah dalam memahami materi khususnya tentang konsep *khilafah* dan *jihad*.

### **2. Bagi Siswa**

Siswa-siswi biasanya sering mengabaikan penjelasan materi oleh guru. Oleh karena itu, hendaknya siswa mendengarkan dengan khidmat, apabila ada yang belum faham segera ditanyakan. Apalagi mengenai materi tentang konsep *khilafah* dan *jihad* yang rentan akan kesalahpahaman.

### **C. Kata Penutup**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan suatu karya yang sangat sederhana dan masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran bagi setiap pembaca sangat penulis harapkan untuk memperbaiki karya selanjutnya. Meskipun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain yang membacanya. Aamiin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Amin, Ainur Rofiq. 2015. *Proyek Khilafah HTI*. Yogyakarta : Lkis Pelangi Aksara.

- Al-Buthy, Muhammad Sa'id Ramadhan. 1993. *Fiqh Jihad*. Libanon : Pustaka An-Nabaa' .
- Al-Hajaj, Abi Husein. 2002. *Shahih Muslim*. Beirut Libanon : Daar Ibn Hajm.
- Al-Maududi, Abu A'la. 1984. *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Terj. M. Al-Baqir. Bandung : Mizan.
- Al-Nabhani, Taqiuddin. 1996. *Nidham al-Hukm fial-Islam*. Beirut Libanon : Dar al-Umah.
- Al-Raziq, Ali Abdul. 2002. *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan*. Yogyakarta : Jendela.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Siyasaah Syar'iiyyah*. Yogyakarta : Madah.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Chirzin, Muhammad. 2006. *kontroversi Jihad di Indonesia Modernis Vs Fundamentalis*. Yogyakarta : Nuansa Aksara.
- Chusna, Abi. 2014. "Konsep Jihad Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Inonesia

(MMI) : *Studi Perbandingan*”. skripsi dalam digilib.uinsby.ac.id, diakses 16 Januari 2020.

Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Bandung : CV Penerbit Diponegoro.

Djamarah, Syaiful Bahri. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Djazuli. 2007. *Fiqh Siyasah*. Damascus : Dar al-Qalam.

Djazuli. 2009. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta : Kencana.

Enayat, Hamid. 1998. *Modern Islamic Thought : The respon of the Syi'i and Sunni Muslim to the Twentieth Century* (terj.) Asep Hikmah. Bandung : Pustaka.

Esposito, John L. 1996. *Ancaman Islam ; Mitos atau Realitas ?*, Alih Bahasa : Alwiyyah Abdurrahman. Bandung : Mizan.

Fanani, Ardian. 2018. Ma'ruf Amin Nilai Khilafah Tak Cocok di Indonesia, Ini Alasannya” DetikNews

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Guru Fiqh MAN 2 Kudus. 2015. *Materi Ajar Mapper Fiqih Kelas XII Jurusan Keagamaan*. Kudus : MAN 2 Kudus.

Hadi, Sutrisna. 1997. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM.



Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mahmudi (Guru Fiqih) MA Ma'ahid Kudus pada hari Senin tanggal, 16 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Ali Musta'in (Guru Fiqih) MAN 2 Kudus pada hari Sabtu tanggal, 7 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Is'adur Rofiq (Guru Fiqih) MAN 2 Kudus pada hari Selasa tanggal, 3 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Riyadi (Guru Fiqih) MA Muhammadiyah Kudus pada hari Kamis tanggal, 12 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Subhan (Guru Fiqih) MA NU Banat Kudus pada hari Rabu tanggal, 4 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono (Guru Fiqih) MA Muhammadiyah Kudus pada hari Kamis tanggal, 12 Maret 2020

Hidayat, Komaruddin. 2014. *Kontroversi Khilafah Islam, Negara, dan Pancasila*. Bandung : Mizan.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Taqiyyuddin\\_An\\_Nabhani](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Taqiyyuddin_An_Nabhani)  
, diakses pada 8 Februari 2020 pukul. 20.40

Ilmi, Miftahul. 2008. “*Persepsi Ulama NU tentang Sistem Kilafah (Studi Kasus Ulama NU Kota Semarang 2008)*”, Skripsi dalam.library.walisongo.ac.id, diakses 16 Januari 2020.

- Imron, Ali. 2014. "*Konsep Jihad dan Implementasinya terhadap Pembelajaran di Madrasah (Studi Kasus pada Madrasah se-Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak 2014)*" Tesis dalam .e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id, diakses 16 Januari 2020.
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta Selatan : Gaya Media Pratama.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Junaedi, Mahfud. 2017. *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*. Depok : Kencana.
- Kunandar. 2013. *Penilaian Autentik Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lathifah, Anthin. 2012. *Geneologi Fiqh Jihad*. Semarang : Dibiayai dengan anggaran DIPa IAIN Walisongo Semarang.
- Ma'ruf, Amari dkk. 2016. *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*. Jakarta : Kementerian Agama RI.
- Madjid, Nurcholish. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

- Majid, Abdul. 2009. *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Margono, S. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhajir, Afifuddin. 2017. *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta : IRCiSoD.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : PT. Bayu Indra Grafika.
- Mulyasa, E. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progressif.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007. 2019. *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Bandung : CV. Nuansa Aulia.
- Rasyid, Makmun. 2016. *Gagal-Paham Khilafah*. Tangerang : Pustaka Compass.
- Raziq, Ali Abdul. 1985. *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Terj, Afif Muhammad. Bandung : Pustaka.
- Samudra, Imam. 2004. *Aku Melawan Teroris !*. Solo : Jazera.
- Setiawan, Eko. 2018. *Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru PAUD dan SD/MI*. Jakarta : Esensi.

- Shihab, M.Quraish. Cet.VIII,2007. *Tafsir Al-Misbah Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasiasian al-Qur'an, Volume 2*. Jakarta : Lintera Hati .
- Sudrajat, Ajat. 2009. “*Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Sejarah*”, *Jurnal*. Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas ilmu Sosial dan Ekonomi.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparta, Suparta. 2018. “*Persepsi Ulama Bangka Belitung tentang Teori Khilafah dan Implikasinya terhadap Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Basyariyah dalam Keutuhan NKRI di Bangka Belitung*”. *Jurnal dalam e-journal.metrouniv.ac.id*, diakses 16 Januari 2020.
- Syarif, Mujaer Ibnu dan Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyasah*. Jakarta : Erlangga.
- Taimiyah, Ibnu. 1996. *Al-Siyasah al-Syar'iyat di Islah al-Ra'iyat*. Beirut : dar Al-Kutub al-Arabiyyat.
- Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an. 1418 H. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah : Muja'mma' al Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif.
- Wahidmurni,dkk. 2018. *Evaluasi Pembelajaran Kompetensi dan Praktik*. Yogyakarta : Nuha Lite ra.

Yatim, Badri. 2004. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta :  
Rajawali Press.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran I : Pedoman Wawancara**

#### **INSTRUMEN PENELITIAN**

##### **Pedoman Wawancara untuk Guru Fiqh MA**

**Nama Sekolah :**

**Alamat Sekolah :**

**Nama Guru Fiqh :**

**Hari/Tgl Wawancara :**

**Tempat :**

#### **KHILAFAH**

1. Bagaimana konsep *khilafah* yang sesuai dengan ajaran Islam dalam pelajaran *Fiqh Siyasah* ?
2. Apakah ada keharusan bagi sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam menerapkan sistem pemerintahan *khilafah* yang pelaksanaannya sebagaimana *khilafah* dalam lintasan sejarah Islam ?  
Apa alasannya.
3. Bagaimana pandangan Bp/Ibu tentang munculnya gerakan-gerakan di Indonesia yang berusaha mendirikan sistem *khilafah* yang pelaksanaannya sebagaimana *khilafah* dalam lintasan sejarah Islam?

4. Setujukan Bp/Ibu jika Indonesia menerapkan sistem *khilafah* yang pelaksanaannya sebagaimana *khilafah* sesuai lintasan sejarah Islam dalam pemerintahannya ? apa alasannya.
5. Bagaimana metode Bp/Ibu ketika menjelaskan materi *khilafah* dalam mata pelajaran *Fiqh Siyash* di hadapan para siswa ?
6. Apa yang akan Bp/Ibu lakukan bila ada siswa yang memiliki pendapat bahwa pelaksanaan *khilafah* yang sebagaimana *khilafah* di zaman setelah Rasulullah perlu diterapkan dalam pemerintahan Indonesia ?
7. Apa yang akan Bp/Ibu lakukan bila ternyata ada siswa yang telah bergabung dalam gerakan pro-*khilafah* yang konsepnya sebagaimana diungkapkan oleh oknum yang ingin mendirikan *khilafah* di Indonesia ?
8. Bagaimana pendapat Bp/Ibu tentang munculnya pendakwah di sosial media yang menggiring ke arah pendirian pelaksanaan sistem *khilafah* yang sesuai dalam lintasan sejarah Islam maupun sesuai *khilafah*-nya para oknum tertentu di Indonesia ?
9. Isi ceramah salah satu da'i terkemuka di Indonesia menyampaikan bahwa “solusi negara adalah *khilafah* . Bagaimana pendapat Bp/Ibu tentang hal tersebut ?

## **JIHAD**

1. Bagaimana penjelasan mengenai konsep maupun pelaksanaan *Jihad* dalam mata pelajaran *Fiqh Siyasah* ?
2. Bagaimana penjelasan *jihad* dari segi konsep dan pelaksanaannya menurut pemahaman Bp/Ibu ?
3. Metode apa yang Bp/Ibu terapkan ketika menjelaskan materi *Jihad* dalam pelajaran *Fiqh Siyasah* kepada para siswa ?
4. Bagaimana cara Bp/Ibu dalam menghadapi siswa yang mengikuti gerakan-gerakan radikal yang mengatasnamakan agama Islam ?
5. Di era sekarang ini banyak orang yang menyalah artikan makna *jihad* hanya semata-mata memberantas kemaksiatan, bagaimana pendapat Bp/Ibu mengenai hal tersebut ?
6. Bagaimana pendapat Bp/Ibu tentang munculnya peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh oknum tertentu di berbagai tempat yang dianggap sebagai tempat kemaksiatan dengan mengatasnamakan aksinya sebagai *jihad* ?
7. Bila ada siswa yang memiliki pemahaman bahwasannya dengan bom bunuh diri di tempat yang dianggap maksiat adalah sebuah *jihad* dan akan mendapatkan balasan surga. Apa yang akan dilakukan oleh Bp/Ibu ?



8. Bagaimana evaluasi yang diterapkan dalam materi *khilafah* dan *jihad* pak?
9. Bagaimana pendapat Bp/Ibu tentang WNI yang bergabung di ISIS dan minta dipulangkan ke tanah air ?
10. Bagaimana pendapat Bp/Ibu tentang wacana penghapusan materi *khilafah* dan *jihad* di sekolah oleh Kementerian Agama ?
11. Seberapa pentingkah materi *khilafah* dan *Jihad* untuk dipelajari para siswa ?
12. Pesan apa yang ingin Bp/Ibu sampaikan kepada para pendidik terkhusus guru mata pelajaran *Fiqh Siyasah* tentang materi *khilafah* dan *jihad* ?

## **Lampiran II : Narasi Hasil Wawancara**

### **NARASI WAWANCARA NARASUMBER 1**

<b>Nama</b>	<b>: Is'adur Rofiq, S.Ag.</b>
<b>TTL</b>	<b>: Kudus, 20 Januari 1974</b>
<b>Alamat</b>	<b>: Kaliputu, Gg. VII Rt.04/Rw. II no. 134 Kota Kudus</b>
<b>Pendidikan Akhir</b>	<b>: S1 / Sarjana</b>
<b>Jabatan</b>	<b>: Guru Fiqih MAN 2 Kudus</b>
<b>Waktu Wawancara</b>	<b>: Selasa, 3 Maret 2020, pukul. 09.15 – 10.30</b>
<b>Tempat Wawancara</b>	<b>: Perpustakaan MAN 2 Kudus</b>

*Khilafah* dalam materi Fiqih diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan. Berbeda jika ditambah dengan kata islamiyah maka menjadi pemerintahan Islam. Dalam Kompetensi Dasar materi *khilafah*, tidak disebutkan mengenai tuntutan untuk mendirikan negara Islam, oleh karena itulah jika ada oknum bahkan organisasi yang ingin kembali menegakkan *khilafah* khususnya di Indonesia, maka harus ditangkal, dikecam dan dibubarkan karena mereka sangat berbahaya jika tidak segera disikapi. Sebagaimana kasus WNI yang mantan anggota ISIS yang meminta kepada pemerintah untuk dipulangkan. Seharusnya pemerintah mengambil langkah untuk tidak memulangkannya karena hal tersebut akan menjadi bagaikan virus yang akan menginfeksi orang sekitar. Walaupun mereka nantinya dihukum tetap ada

celah bagi mereka yang mempunyai jaringan-jaringan untuk mendoktrin generasi muda dalam melanjutkan misinya. Oleh karena itulah, apapun alasan mereka untuk mendirikan kembali kekhilafahan di negara ini, tetap tidak akan tercapai dikarenakan persyaratan dalam mendirikan negara Islam sangat banyak dan tidak mudah. Selain itu, negara ini sudah sangat pas dengan Pancasila. Karena dirasa kelima silanya lebih bisa menjamin dalam menegakkan persatuan dan kesatuan dibanding kalau harus mendirikan negara Islam di Indonesia. Oknum tak bertanggung jawab tak akan berhenti begitu saja, mereka tetap akan melancarkan aksinya dalam mencari dukungan untuk menegakkan kembali *khilafah*. Jalur Pendidikan menjadi salah satu sasarannya. Mereka bisa masuk melalui cara apapun, bahkan salah satunya tak dipungkiri bisa melalui pendidik maupun materi yang dipelajari di sebuah lembaga pendidikan. Untuk itulah dibutuhkan seorang pendidik yang benar-benar tepat sekaligus maksimal dalam menguasai materi khususnya tentang *khilafah* dan *jihad*. Selain menguasai materi tentunya juga mahir dalam menyampaikannya. Untuk itulah dalam hal ini metode yang dipilih yaitu konvensional. Meski merupakan metode tradisional, namun metode ini dianggap lebih efektif daripada metode yang proses pembelajarannya berpusat pada siswa. Metode konvensional dengan ceramah

menjadi sarana dalam menyampaikan kedua materi ini dengan mengajarkan bagaimana pemerintahan Islam itu, membandingkan dengan pemerintahan Indonesia yang sudah berjalan. Membandingkan antara dasar pemerintahan Islam dan dasar negara ini yaitu Pancasila. Menjabarkan satu persatu. Karena mengingat perumus Pancasila itu para ulama yang sudah tau kaitannya dengan pemerintahan Islam. Jadi dalam proses pembelajaran jangan pernah memberikan doktrin pada anak-anak agar nanti bisa mendirikan negara Islam di Indonesia. Jika dilihat di lain sisi, Indonesia pun sudah menggunakan UU Islam, seperti pernikahan, haji, zakat dan masih banyak lagi. Walaupun memang banyak oknum-oknum yang lain yang masih kurang puas dengan pemerintahan Indonesia. Karena mereka inginnya semua hal berdasarkan syariat Islam padahal jika seperti itu malah tidak bisa membuat negara ini hidup aman sejahtera.

Cara lain yang dilakukan oleh oknum yang ingin kembali mendirikan *khilafah* yaitu melalui ceramah-ceramah oleh beberapa da'i yang termasuk oknum terkait yang dilakukan di social media maupun di televisi. Segala yang mereka sampaikan hanya berasal dari ilmu-ilmu yang ada di google dan hendaknya pemerintah segera menyikapi para da'i yang tidak berkompeten seperti itu dengan

memaksimalkan berlakunya sertifikasi untuk da'i agar tidak secara semena-mena mendoktrin generasi muda bangsa ini.

Pembahasan tentang *khilafah* hampir tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan tentang *jihad*. *Jihad* memiliki arti bersungguh-sungguh dalam menjalankan sesuatu seperti ketika melawan musuh Islam yang bukan hanya orang kafir tetapi juga syaitan, hawa nafsu itupun juga musuh Islam. Di samping itu, *jihad* juga memberantas kemaksiatan akan tetapi ada cara yang harus diperhatikan dalam menyikapi suatu kemunkaran sebagaimana dalam Hadits Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

Hadits di atas menjelaskan tentang cara yang dilakukan ketika kita melihat kemunkaran atau kemaksiatan yaitu melalui tangan atau kekuasaan jika tidak bisa maka dengan lisan atau nasihat bisa berupa ceramah dan jika masih tidak bisa maka dengan hatinya. Jadi, tidak langsung dengan memeranginya bahkan sampai membunuhnya. Di samping itu, juga harus diperhatikan maksiat yang seperti apa, bagi kebanyakan orang yang mengartikan *jihad* seperti itu mereka memandang orang non-muslim itu kafir dan segala hal yang dilakukannya dinilai sebagai maksiat dan harus diperangi.

Padahal, kafir sendiri itu kan ada pembagiannya, tidak semua kafir harus dibunuh. Yang boleh dibunuh ketika jaman Rasulullah SAW hanyalah kafir harbi. Akan tetapi di zaman sekarang sudah tidak ada seperti itu. Oleh karena itu bagi orang-orang zaman sekarang yang hanya mengartikan *jihad* sebagai perang itu bisa dikatakan kurang benar dan kurang pengetahuan. Sebagaimana orang-orang yang melakukan aksi bom bunih diri dan menyebutkan sebagai *jihad fi sabilillah*, mereka tidak paham bahwa *jihad* perang hanya ada pada jaman Rasulullah SAW. Karena pada zaman itu ada orang kafir harbi yang harus diperangi karena mereka mengintimidasi kehidupan orang Islam, mendzolomi dan mengganggu orang Islam beribadah. Oleh sebab itulah pentingnya memperdalam dan memperluas ilmu agama agar tidak mudah terdoktrin dengan hal-hal yang tidak sesuai syariat Islam. Mengenai pemilihan metode pun sama dengan proses penyampaian materi *khilafah*. Namun apabila terdapat siswa yang memiliki pemahaman yang salah karena terdoktrin oleh kelompok radikal, baik tentang *khilafah* maupun *jihad*, yang dilakukan seorang guru adalah mendengarkan apapun pendapat siswa, meluruskan jika ada yang melenceng pendapatnya dan tentunya menyampaikan kembali kedua materi tersebut yang sesuai dengan ajaran Islam dan disesuaikan dengan kondisi di masa sekarang.

Sedangkan untuk mengetahui keberhasilan metode yang diterapkan seorang guru tersebut adalah dengan evaluasi yaitu melalui ujian lisan dalam bentuk tanya jawab maupun ujian tertulis dalam bentuk penugasan, UTS maupun UAS. *Khilafah* dan *jihad* memang menjadi dua hal yang sangat rentan di salahpahami, oleh karena itulah sebaiknya tidak untuk dipelajari oleh generasi bangsa di Indonesia karena dikhawatirkan jika materi itu diajarkan oleh seorang pendidik yang termasuk kelompok radikal nantinya malah akan menorehkan generasi-generasi yang berfikir radikal. Hal ini bisa disebut dengan senjata makan tuan karena di saat pemerintah susah dalam memberantas HTI, akan tetapi justru dalam Fiqih yang kaitannya dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersifat amaliyah diberikan materi itu, jadi hal tersebut mengkhawatirkan juga bagi guru yang tidak bisa menerapkan sistem pembelajaran pada materi itu.

## NARASI WAWANCARA NARASUMBER II

**Nama** : Drs. Subhan, M.Pd.I.  
**TTL** : Kudus, 13 Mei 1966  
**Alamat** : Karangdowo, Kec. Bae, Kab. Kudus.  
**Pendidikan Akhir** : S2 / Magister  
**Jabatan** : Guru Fiqih MA NU BANAT Kudus  
**Waktu Wawancara** : Rabu, 4 Maret 2020, pukul. 10.25 – 11.35  
**Tempat Wawancara** : Ruang BPPMNU MA NU BANAT Kudus

*Khilafah* merupakan sebuah pemerintahan Islam yang berdasarkan Al-qur'an dan Hadits. oleh sebab itulah tidak ada kewajiban dalam hal penerapannya meskipun itu di sebuah negara yang mayoritas muslim termasuk Indonesia. Mengapa demikian, karena suatu negara yang memiliki mayoritas maka juga memiliki minoritas. Dan suatu pemerintahan yang baik, tidak mungkin membedakan kaum mayoritas maupun minoritas. Jadi, jika *khilafah* ditegakkan itu sama saja dengan melakukan pemaksaan kepada kaum minoritas yaitu orang non-muslim yang dipaksa untuk mengikuti sumber hukumnya orang Islam. padahal dalam sumber hukum orang Islam pun tidak ada perintah untuk mendirikan *khilafah* melainkan yang ada hanya tentang Allah yang menjadikan setiap individu sebagai khalifah artinya khalifah untuk dirinya sendiri bukan



untuk suatu kekhilafahan. Seperti contoh negara Indonesia dengan Pancasila yang lebih bisa mengayomi seluruh rakyat dengan 6 agama yang diakuinya daripada harus didirikan kembali kekhilafahan. Karena jelas dalam suatu negara dengan sistem *khilafah*, seluruh kebijakan di dalamnya harus didasarkan hanya pada Al-qur'an dan Hadits. Selain itu, jika menggunakan sistem *khilafah* di negara ini, maka akan ada istilah kafir dan mukmin. Apabila seseorang bukan mukmin berarti kafir dan harus di perangi, inilah kaitannya dengan *jihad*. Maka dari itu, sangatlah tidak memungkinkan jika sistem ini diterapkan di negara kita, karena pemerintah harus mengurus dan menyejahterakan rakyat yang berasal dari berbagai suku dan agama.

Bagi mereka oknum garis keras yang beraliran radikal seperti HTI, FPI dan semacamnya, mereka termakan oleh ajaran *khilafah* di Suriah. Yang sebelumnya sejarah munculnya mereka karena faktor kekhawatiran orang barat, antara lain melalui gerakan *khilafah*. Jikalau orang Islam sampai bisa dalam satu kesatuan, maka mereka tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Maka dari itu dari orang Islam mendirikan partai atau kelompok-kelompok yang ingin mendirikan *khilafah islamiyah*. Mereka mulai menyebar ke berbagai negara ya untuk melancarkan misinya

itu. Dan cara yang mereka gunakan sparatis, membuat keonaran. Seperti jika ada orang maksiat mereka langsung memerangnya. Padahal Islam itu *rahmatan lilalamin*, segala hal yang dilakukan oleh orang islam, pasti harus adanya sebab akibat, tidak mungkin kita memerangi orang-orang yang tidak salah. Dan dalam Islam pun mengatur etika dalam menyikapi adanya kemaksiatan sebagaimana hadits Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

Dijelaskan dalam Hadits tersebut, jika kita menyaksikan suatu kemaksiatan maka sikapi dengan melalui tangan atau kekuasaan jika tidak bisa maka dengan lisannya atau dengan nasihat berupa ceramah dan jika masih tidak bisa dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya Iman.

Begitupun ketika ada seorang dai yang berceramah seakan mendoktrin pendengarnya untuk mau menegakkan *khilafah*, dai tersebut terkena doktrin dan iming-iming adanya pendanaan berupa didirikannya sebuah tempat dakwah, perihal gaji, makanan dan lain sebagainya oleh oknum yang mendoktrin. Di samping itu, dangkalnya pengetahuan juga mempengaruhi mudahnya mereka terdoktrin. Mereka hanya mengartikan *khilafah* dalam satu

sisi tanpa memerhatikan sisi yang lain lalu langsung diterima dan disebarkan dan akan membuat mereka membabi buta karena kefanatikannya.

*Khilafah* juga berkaitan dengan *jihad*, karena bagi siapa saja yang dianggap tidak mau mendukung untuk mendirikan *khilafah* maka akan diperangi, dan perang itulah yang mereka sebut dengan *jihad*. Adapun *jihad* yang seperti itu hanya dipahami oleh orang yang dangkal ilmu agamanya, orang yang tidak mau belajar lebih padahal ilmu pengetahuan selalu berkembang. *Jihad* bukan hanya sebuah perang dengan kekerasan. *Jihad* yang semacam itu hanya ada pada masa Rasulullah SAW karena *jihad* mas itu melawan orang kafir harbi yang mengancam orang Islam. berbeda dengan *jihad* di masa dan kondisi sekarang, yaitu *jihad* melawan hawa nafsu, godaan syetan, segala keburukan dan melawan segala perbuatan maksiat. Melawan perbuatan maksiat disini bukan seperti oknum-oknum yang melakukan aksi bom bunuh diri mengatasnamakan *jihad* dengan alasan memberantas kemaksiatan. Selain karena mereka terdoktrin, mereka juga lemah aqidahnya. Kalau zaman Rasulullah SAW *jihad* perang itu menjadi mati syahid, kalao dijamin sekarang itu jelas dilarang dalam Alquran, maka matinya malah mati sangit. Serta akibat dari doktrin tadi, apalagi jika mereka sudah diberi satu motivasi berupa permasalahan,

maka dengan gampang mereka melakukan aksi seperti itu. Sebagaimana kasus yang lagi ramai yaitu WNI mantan ISIS yang meminta kepada pemerintah untuk dipulangkan, lebih baik tidak dipulangkan karena kembali lagi diingat, menangkap mereka saja susah, tapi mengapa itu dilepaskan begitu saja, pasti ada niat terselubung tak lain adalah mencari pasukan untuk dicuci otaknya.

Dalam bidang pendidikan, *khilafah* dan *jihad* menjadi materi dalam mapel Fiqih. Seorang guru harus berhati-hati ketika menjelaskan dan menyampaikan kepada siswa tentang materi tersebut. Metode yang dipilih harus efektif dan memahami siswa. Metode konvensional dengan ceramah menjadi pilihan guru karena dirasa lebih efektif dari metode yang lain. Guru menjadi objek utama dalam proses pembelajaran. Karena guru menyampaikan dengan detail tentang konsep *khilafah* dan menerapkan, bahwa di Indonesia ada Pancasila, di *khilafah* ada dasarnya juga, lalu guru padukan keduanya, dijabarkan satu persatu seperti sila pertama dalam Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan pada dasar *khilafah* yaitu Penegakan Tauhid, keduanya sama tentang ketuhanan. Sila ke dua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sedangkan dalam Dasar *khilafah* yaitu Ukhuwah Islamiyah, prinsip persaudaraan, masing-masing membicarakan tentang

manusia semua itu bersaudara, adil tidak ada pilih kasih dan seterusnya sampai sila ke 5. *Jihad* juga disampaikan secara lengkap dari memberikan pengertian *jihad* yang tidak dalam perang. Seperti *jihad* nafsu, *jihad* melawan kebodohan dan banyak lainnya. Karena *jihad* dalam materi ini lebih diartikan dengan semangat dan tidak menyinggung tentang *jihad* qital tetapi lebih ke *jihad* sesuai dengan keadaan Indonesia di masa sekarang. Tak memungkiri juga terkadang ada siswa yang memiliki pendapat berbeda, bahkan ada yang sudah terdoktrin. Guru menyikapinya dengan mengeluarkan pernyataan “menang tak mungkin, mati sudah barang tentu” dengan tujuan agar membuat siswa tersebut berfikir ulang dan sadar bahwa pemahamannya itu ternyata salah.

*Khilafah* memang tidak tepat untuk Indonesia, *jihad* yang diartikan sebagai perang pun harus di kaji lagi dan dipahami lebih dalam. Meskipun demikian, keduanya adalah materi keislaman yang harus di ketahui oleh muslim generasi bangsa walau itu hanya sejarahnya saja dan penyampaian *jihad* hendaknya yang tepat untuk zaman sekaligus kondisi sekarang di Indonesia. Jadi jika ada wacana tentang wacana dihapusnya materi itu, sebaiknya tidak direalisasikan.

### NARASI WAWANCARA NARASUMBER III

**Nama** : Ali Mustain, S.Pd.I.  
**TTL** : Kudus, 22 Juni 1982  
**Alamat** : Kedungsari, Rt. 02 / Rw. II,  
Kec. Gebog, Kab. Kudus.  
**Pendidikan Akhir** : S1 / Sarjana  
**Jabatan** : Guru Fiqih MAN 2 Kudus  
**Waktu Wawancara** : Sabtu, 7 Maret 2020, pukul.  
09.00 – 10.15  
**Tempat Wawancara** : Ruang BK MAN 2 Kudus

Sistem pemerintahan dalam Islam disebut dengan *khilafah*. sebuah negara dengan mayoritas muslim biasanya sudah sesuai dengan *khilafah* karena dalam pemerintahan *khilafah*, disesuaikan dengan syariat Islam. maka bisa dianggap secara tidak langsung negara seperti itu sudah termasuk dalam negara *khilafah*. Seperti Indonesia yang mayoritasnya muslim, bisa dikatakan sesuai dengan *khilafah* dalam segi syariat yang dijalankan oleh muslim di Indonesia, pemerintahannya dan dalam menjalankan politiknya. Dikuatkan juga dalam buku Fiqih tentang tujuan *khilafah* salah satunya untuk mewujudkan dasar-dasar *khilafah* dan dasar *khilafah* itu sudah sama persis dengan dasar negara kita ini yaitu Pancasila. Meskipun begitu, para HTI tetap tidak bisa menerima dan tetap merasa kurang. Hal itu karena pemahaman salah yang dimiliki HTI tentang *khilafah*. yang diinginkan mereka adalah, semua hal yang dilaksanakan di Indonesia harus mengikuti syari'at Islam,

tidak hanya sekedar dari sistem politiknya. Akan tetapi semua bidang kehidupan harus diganti mengikuti syariat Islam. Nah ini yang salah dan menyebabkan perdebatan. Padahal negara kita mempunyai kebhinekaan, keberagaman agama. Jadi intinya mereka para oknum tidak bisa melakukan toleransi antar umat beragama. Mereka seakan memaksa untuk mengislamkan Indonesia. Padahal dalam Islam sendiri segala hal yang kaitannya dengan paksaan itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana Firman Allah SWT,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ....

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).....(Q.S. al-Baqarah/2 : 256)

Pendidikan menjadi salah satu incaran para HTI untuk mencari dukungan. Oleh sebab itulah, pemilihan metode yang akan diterapkan sangat penting. Walau tradisional yaitu melalui metode ceramah, guru menganggap itu akan lebih efektif dibandingkan dengan metode yang menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran. Guru menerangkan tentang perbedaan *khilafah* dan khalifah. Setelah itu guru mendetailkan sekaligus membandingkan tentang sistem *khilafah* dan sistem pemerintahan Indonesia. Menyampaikan alasan mengapa *khilafah* tidak tepat di Indonesia karena negara ini bukan negara Islam, negara ini mengakui 6 agama dan mengikuti syariat Islam dalam

beberapa hal saja sudah cukup dan sesuai dengan negara *khilafah*. Itu semua di jelaskan terlebih dahulu. Dan menekankan juga bahwa *khilafah* itu tidak sistem yang menyuruh mengganti kepada syariat Islam semua, akan tetapi cukup sesuai dengan syariat Islam. Sehingga yang diterima siswa dalam otaknya akan teratur dan sistematis yang tentunya menghindari dari kerancuan. Akan tetapi bila nanti ada siswa yang memiliki pemahaman berbeda atau bahkan melenceng, sebagai guru memberikan pemahaman terlebih dahulu, pengertian sedetail-detailnya sampai siswa tersebut paham. Tetapi jika siswa masih teguh dengan pendiriannya, sebagai guru sudah melakukan semampunya. Guru hanya bisa memberikan bimbingan dan arahan ketika di dalam lingkup madrasah saja. Di luar madrasah guru tidak bisa mengawasi secara lebih. Seperti contoh sekarang hampir tidak ada siswa yang tidak mempunyai dan bermain *gadget*, di sekolah tidak diperbolehkan, tetapi di luar sekolah diperbolehkan. Ketika mereka menggunakan *gadget*, mereka tentu akan dengan bebas mengakses apa saja tanpa kendali dari orang yang lebih tua. Termasuk mendengarkan ceramah-dari para dai-dai. Jika yang disampaikan dai tersebut positif, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah jika dai tersebut adalah dai instan artinya, mereka menyampaikan apa yang mereka ketahui dari satu sumber



saja bahkan ada yang hanya mengandalkan google untuk belajar dan tak jarang isi ceramahnya bersifat doktrin ke arah radikal. Hal itu tentu akan merusak Indonesia.

Pemahaman *jihad* dan *khilafah* selalu berkaitan. Adapun *jihad* di zaman Rasulullah SAW dengan zaman sekarang itu beda. *Jihad* zaman Rasul diartikan dengan perang karena ada yang diperangi yaitu betul-betul orang yang salah. Kalau zaman sekarang tidak mungkin. Siapa yang akan diperangi. Tidak ada. Islam itu *Rahmatanlilalamin*, jika tidak ada yang memerangi kita, ya kita tidak akan memerangi. Kalau *jihad* di zaman sekarang seperti *jihad* nya siswa yaitu belajar. Artinya mereka *jihad* menghilangkan kebodohan. Semacam itulah pemahamannya untuk *jihad* di zaman sekarang. Meski demikian, masih banyak orang yang menyalah artikan *jihad* hanya semata-mata memberantas kemaksiatan serta adanya aksi bom bunuh diri itu juga diatasmamakan dengan *jihad*. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang sudah terdoktrin. Sudah dicuci otaknya. Dan orang yang mudah terkena doktrin itu karena faktor kurangnya pemahaman ilmu agama, ada juga faktor ekonomi atau juga dia sering ikut pengajian-pengajian yang ekstrim. Dan sebetulnya *jihad* memang memberantas kemaksiatan akan tetapi caranya yang harus diperhatikan. Tidak boleh langsung dengan aksi bom bunuh diri.

Semuanya ada caranya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

Dari Abu Sa'id Al Khudri radiallyallahu berkata : Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. (H.R Muslim)

Untuk penggunaan metode sebagaimana yang guru gunakan ketika menyampaikan materi *khilafah* yaitu ceramah yang divariasi dengan tanya jawab di awal pembelajaran. Tanya jawab tersebut biasanya dengan meminta siswa untuk mengemukakan pendapatnya tentang pengertian *jihad* sesuai pemahaman mereka masing-masing. Jika nanti ada yang kurang benar atau melenceng saya baru meluruskan. Karena itu efektif untuk mereka baik yang salah pemahaman ataupun yang belum paham sama sekali. Setelah itu, guru memberikan contoh *jihad* di zaman sekarang. Jika ada yang pahamnya hanya *jihad qital*, guru akan meluruskan bahwa *jihad qital* itu hanya ada di zaman Rasulullah SAW. Untuk mengetahui seberapa efektifnya metode dan strategi yang diterapkan, guru menggunakan evaluasi baik secara lisan maupun tulis. Menyikapi tentang wacana kementerian

agama yang akan menghapus materi *khilafah* dan *jihad*, guru tidak setuju dengan alasan bahwa materi bukan penyebab utama yang membuat pikiran siswa menjadi rancu akan tetapi bisa karena gurunya ketika menyampaikan materi itu kurang tepat dan pemilihan metode yang digunakan juga kurang efektif. Jadi menurut guru kementerian agama hendaknya memperbaiki kualitas pendidikan bukan malah menghapus materi pelajaran yang harus diketahui, dipahami dengan benar oleh siswa baik dari sejarahnya maupun pelaksanaannya secara maksimal bukan setengah-setengah.

## NARASI WAWANCARA NARASUMBER IV

**Nama** : H. Suhartono, S.Ag., S.Pd.I.  
**TTL** : Kudus, 30 April 1968  
**Alamat** : Ds. Undaan Lor Rt. 06  
/ Rw. 04, Undaan, Kudus  
**Pendidikan Akhir** : S1 / Sarjana  
**Jabatan** : Guru Fiqih MA  
Muhammadiyah Kudus  
**Waktu Wawancara** : Kamis, 12 Maret 2020, pukul.  
09.15 – 10.40  
**Tempat Wawancara** : Ruang Kepala MA  
Muhammadiyah Kudus

Dalam Fiqih, *khilafah* Islam merupakan sesuatu yang diatur oleh sebuah lembaga organisasi. Misalnya, ormas Muhammadiyah bisa disebut dengan *khilafah*. jadi bisa diambil intinya yaitu bukan *khilafah* yang mengubah negara Pancasila ini menjadi negara Islam, karena jika itu dilakukan harus melalui *jihad* dulu, perang dengan orang yang dikatakan kafir dan saling membunuh. Guru menganggap hal tersebut sangat tidak mungkin. Jadi bagi guru, ormas Muhammadiyah itu sudah bisa dianggap sebagai *khilafah* versi perserikatan. Karena Muhammadiyah dianggap sudah bisa menentukan segala hal yang berkaitan dengan syariat Islam yaitu dalam segi amaliyah dan ibadah nya sebagaimana sudah sesuai dengan *khilafah*. Akan tetapi tidak dengan hukum pembunuhan, zina, minum-minuman keras dan sebagainya , Muhammadiyah belum bisa

menggunakan aturan sebagaimana *khilafah* zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itulah *khilafah* di sini lebih cocok dengan versi perserikatan saja. Tidak dalam lingkup sebuah negara, meskipun itu negara mayoritas muslim. Hal tersebut berdasar pada tidak adanya kewajiban dalam Al-qur'an maupun Hadits yang memerintahkan untuk menegakkan *khilafah* dalam lingkup sebuah negara. Jadi kembali lagi, lebih baik hanya cukup dalam versi perserikatan saja. Selain itu jika dilihat dari kondisi negara Indonesia terdiri dari berbagai agama, tidak hanya agama Islam saja. Jadi hal tersebut termasuk pemaksaan, mereka yang tidak beragama Islam, tidak akan mau karena mereka merasa punya hak hidup di negara ini. Apabila tetap dipaksakan efeknya akan terjadi pertumpahan darah dan perang saudara antar rakyat Indonesia. Dasar negara Indonesia sudah dibentuk sejak bertahun-tahun silam oleh para leluhur tokoh-tokoh kemerdekaan yang sangat berjasa. Membentuknya juga disesuaikan dengan kondisi rakyat Indonesia. Dengan menengok masa lalu dan mengingat tentang pembentukan piagam Jakarta yang sekarang menjadi dasar negara yaitu Pancasila. Piagam tersebut dibentuk oleh sembilan orang diantaranya satu orang beragama Kristen. Ketika menyusun sila yang pertama yaitu "ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya”. Salah seorang anggota yang bernama Maramis protes bahwa dia beragama Kristen, bagaimana bisa menjalankan syariat Islam. lalu delapan tokoh yang lain berunding dengan berbagai pertimbangan yang akhirnya menghasilkan susunan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari situ kita bisa melihat pengorbanan para tokoh khususnya yang beragama Islam, sudah melalui pertimbangan yang matang. Jadi tidak bisa diubah bagaimanapun itu. guru menganggap bahwa Indonesia sudah mengikuti dan sesuai dengan sistem *khilafah* dari segi dasar nya. Antara dasar negara Indonesia dengan dasar *khilafah* sudah sama persis. Seperti sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa sedangkan dasar *khilafah* yaitu Penegakan Tauhid, keduanya sama-sama membicarakan tentang ketuhanan atau ketauhidan. Lagi misalnya sila ke empat Pancasila yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, sedangkan dalam dasar *khilafah* yaitu Musyawarah untuk Mufakat, keduanya membicarakan perihal musyawarah mufakat. dari sila pertama sampai ke lima pun seperti itu.

Oleh sebab itulah sekali lagi, Indonesia wujud kekhilafahannya lebih baik berupa hanya dalam perserikatan sebagaimana Muhammadiyah atau yang lainnya saja jangan dalam lingkup se-negara. Jadi bagi oknum-oknum radikal di

luar sana, Mereka itu jelas menyalahi aturan. Negara ini sudah terbentuk dengan baik, jadi jangan pernah ada keinginan untuk mengubahnya menjadi negara Islam karena termasuk melanggar cita-cita para pendiri negara. Lebih baik melakukan hal-hal yang bisa mengembangkan negara ini menjadi lebih baik, dan memperbaikinya. Bisa dilihat juga pada perserikatan Muhammadiyah ataupun NU yang selalu ada perkembangan untuk menjadi yang lebih baik. Tidak usah ada keinginan untuk mendirikan *khilafah-khilafah* yang lain. Berkaitan dengan aspek pendidikan, *khilafah* menjadi salah satu materi dalam mata pelajaran Fiqih. Karena banyaknya pemahaman tentang *khilafah* sehingga rentan membuat rancunya pikiran. Oleh karena itulah perlu adanya metode dalam penyampaian kepada siswa. Metode yang dipilih yaitu metode pembelajaran konvensional atau tradisional dengan ceramah. Ketika guru menjelaskan, guru juga menanamkan dan memperkuat aqidah dalam diri tiap siswa, seperti pikiran dalam berislam atau bermuhammadiyah. Menerapkan jiwa muhammadiyah yang baik agar tidak terjerumus ke dalam kelompok-kelompok radikal yang ingin mendirikan kembali kekhilafahan yang baru. Namun karena kondisi di kelas yang tidak homogen, jadi guru selalu mengantisipasi jika ada siswa yang memiliki pendapat yang berbeda atau bahkan melenceng. Guru akan

menegur dan mengingatkan siswa yang demikian. Mengembalikan dan meluruskan pendapatnya agar sesuai dengan Al-qur'an dan Hadits sebagaimana Firman Allah SWT dalam Suran An-Nisa' : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Jadi dalam ayat tersebut jelas dikatakan bila terjadi perbedaan pendapat maka kembalikanlah kepada Alquran dan Hadits maka semuanya akan aman dan baik-baik saja, dalam hal apapun itu. Jangan sampai dikembalikan pada nafsu karena akan menyebabkan pertengakaran. Namanya anak muda ya memang mudah di doktrin. Oleh karena itu tugas guru adalah dengan meluruskannya, menyuruhnya agar kembali kepada Alquran dan Hadits.

Selanjutnya berkaitan dengan fenomena banyaknya da'i instan yang muncul di media sosial dengan isi ceramah yang menggiring ke arah pendirian *khilafah*, da'i itu kurang dipikirkan sebelum berceramah dan tidak memperhatikan tempat dimana ia berceramah. Seperti ceramah di lingkup negara Indonesia, sangat tidak pas jika berbicara tentang pendirian negara *khilafah*, dan mereka bisa disebut sebagai perusak Indonesia yang sudah relevan dengan Pancasilanya. Oleh karena itu, sangat tidak pantas bagi muballigh yang



mengatakan bahwa solusi negara adalah *khilafah*. Akan terjadi peperangan antar saudara bila *khilafah* yang di maksudkan mereka didirikan di Indonesia. Diperlukan adanya *jihad* jika *khilafah* ditegakkan. Untuk itulah pembahasan *khilafah* tidak bisa dijauhkan dengan pembahasan tentang *jihad*. Adapun *jihad* yang ada dalam pelajaran Fiqih menurut bahasa Arab artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh – sungguh dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan Alqur'an dan Hadits, intinya bersungguh-sungguh memperjuangkan Islam. Selain itu, dalam Fiqih juga dikatakan bahwa *jihad* yaitu *jihad qital* atau perang. Akan tetapi perlu dipahami perang disini yaitu ketika zaman Rasulullah SAW, memerangi kaum kafir. Bukan untuk zaman sekarang. *Jihad* yang pas untuk zaman sekarang yaitu memerangi kebodohan dengan *jihad* belajar, kemiskinan dengan *jihad* rajin bekerja, kemalasan dan yang terpenting memerangi hawa nafsu. Meski begitu, masih banyak juga orang di luar sana yang menyalah artikan *jihad* hanya semata-mata memberantas kemaksiatan serta adanya aksi bom bunuh diri itu juga di atasnamakan dengan *jihad*. Jelas mereka sangat melanggar apa yang dilarang oleh Islam. dalam Islam melarang untuk melakukan pembunuhan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. memang bisa dikatakan bahwa *jihad* adalah memberantas kemaksiatan

tetapi harus diperhatikan makasiat yang seperti apa dan cara dalam menyikapi kemaksiatan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْرِضْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

Jika ada kemunkaran atau kemaksiatan maka rubahlah dengan kekuasaanmu, contohnya seperti pihak berwajib yang lebih berwenang. Jika tidak bisa dengan lisan atau dengan nasihat atau ceramah tetapi jika tetap tidak bisa maka dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya Iman.

Termasuk mereka yang menyalah artikan *jihad* yaitu tergabung dalam gerakan yang bernama ISIS. Mereka berusaha mencari pasukan untuk melancarkan aksi mereka. Tak sedikit juga Warga negara Indonesia yang termakan iming-iming dan akhirnya menjadi anggota ISIS. Hingga akhirnya, Karena suatu hal mereka keluar dari ISIS dan meminta kepada pemerintah Indonesia untuk kembali dipulangkan ke tanah air. Mengenai permintaan dipulangkannya tentu menimbulkan banyak perdebatan. Guru lebih setuju untuk dipulangkan karena termasuk warga Indonesia dengan harapan nantinya bisa diberi binaan yang baik agar jangan sampai negara kita digerogeti oleh mereka yang menjadi ISIS seperti itu, lalu mengajaknya kembali

kepada Alquran dan Hadits. Saya yakin bisa, yaitu melalui psikolog yang handal.

Lalu menyinggung dalam aspek pendidikan, materi *jihad* pun juga disampaikan dengan metode yang sama ketika menyampaikan tentang konsep *khilafah*. Guru menanamkan arti *jihad* itu bersungguh-sungguh dan berjuang, memaparkan segala aktivitas sehari-harinya sebagai contoh *jihad* di zaman sekarang. Jadi siswa akan lebih mudah paham. Misalnya seperti ketika mereka belajar dan sholat itu merupakan *jihad* untuk melawan kebodohan serta *jihad* untuk ibadah. Bagi siswa yang hanya paham tentang *jihad* itu perang, maka guru memberikannya penjelasan bahwa perang yang dimaksudkan di zaman Rasulullah SAW untuk melawan orang kafir dan guru juga menjelaskan tentang macam kafir, agar mereka paham bahwa tidak semua orang kafir boleh diperangi atau bahkan dibunuh. Untuk melihat seberapa berhasilnya penggunaan metode yang diterapkan oleh guru, guru melakukan evaluasi dengan ujian tertulis ketika ulangan harian perbab maupun ketika ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian tertulis lebih dipilih oleh guru karena baginya hal tersebut lebih efektif artinya kita sebagai guru bisa sekaligus membantu siswa mengembangkan kemampuan berbahasa dan kemampuan memecahkan masalah. Karena soal dibuat

dalam bentuk tes uraian. Menyikapi perihal wacana kementerian agama yang akan menghapus materi *khilafah* dan *jihad* dalam mata pelajaran Fiqih, guru Fiqih menolak atas itu karena materi itu sangat penting bagi siswa baik sejarahnya maupun pelaksanaannya yang harus diketahui oleh siswa. Dan guru menilai bahwa rancu tidaknya pikiran siswa dipengaruhi oleh proses penyampaian materi oleh guru. Bukan dari ada tidaknya materi itu.

## NARASI WAWANCARA NARASUMBER V

**Nama** : Riyadi, S.Pd.I.  
**TTL** : Temanggung, 12 Juli 1980  
**Alamat** : Ds. Ngaringan, Kec. Gebog, Kab. Kudus.  
**Pendidikan Akhir** : S1 / Sarjana  
**Jabatan** : Waka Kesiswaan dan Guru Fiqih MA Muhammadiyah Kudus  
**Waktu Wawancara** : Kamis, 12 Maret 2020, pukul. 11.00 – 12.15  
**Tempat Wawancara** : Ruang Kepala MA Muhammadiyah Kudus

Dalam Buku Fiqih di Madrasah Aliyah, *khilafah* berasal dari kata *khalafa*, yaitu pengganti. *Khilafah* maknanya sudah masyhur yaitu sistem pemerintahan yang pelaksanaannya diatur dengan syari'at Islam sedangkan untuk khalifah yaitu orang yang memimpinnya. *Khilafah* juga merupakan tujuan diciptakannya manusia yaitu sebagai *khalifah fil ardh*, pemimpin di muka bumi ini. Guru beranggapan bahwa *khilafah* itu tidak perlu ditakutkan seakan bahayanya seperti PKI. Karena dari buku kemenag diajarkan dengan sejelas-jelasnya. Lalu mengapa harus ada orang yang bilang anti *khilafah* dan sebagainya. Guru memberikan tanggapan mengenai *khilafah* yang akan ditegakkan di Indonesia dengan melihat realita yang ada di Indonesia. Jadi menurut guru, daripada membahas tentang setuju atau tidaknya dengan pernyataan akan ditegakkannya

kembali *khilafah*, guru lebih fokus untuk perjuangan saat ini dengan dakwah. Menitikberatkan hanya pada dakwah karena dakwah tidak hanya untuk menegakkan syariat Islam, tetapi juga mewujudkan tujuan para kaum muslim yaitu *jannah* atau surganya Allah SWT. Guru Fiqih merasa aneh dengan Indonesia yang selalu ramai kalau berbicara soal *khilafah*. Mengapa harus diperdebatkan kalau di buku MA saja dijelaskan oleh negara tentang *khilafah*. Mungkin sebelum menuju ke *khilafahnya* sendiri, guru berpendapat bahwa harus membangun tauhidnya dulu. Jika tauhid dan aqidah belum terbentuk sempurna dalam diri seorang muslim maka sangat tidak mungkin akan berdiri *khilafah*. Oleh karena itu pentingnya mengutamakan istilah dalam dakwah yaitu, *auliyat* yang artinya mengutamakan dari sisi apa, jangan hanya menggembar-gemborkan *khilafah*. Dikatakan Sangat percuma jika orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji tapi menggembar-gemborkan tentang *khilafah*. oleh karena itu, guru memandang para radikal seperti Hizbut Tahrir dan semacamnya sudah benar. Karena memang segala hal harus sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi tidak dengan HT yang ada di Indonesia atau HTI. Karena kita ketahui bahwa negara ini tidak hanya mengakui satu agama saja. Bagi yang agama Islam ya harus melakukan segala hal yang sesuai dengan syariat Islam. Berbeda kalau

kita berbicara tentang orang non muslim, dalam Al-quran potongan Surat Al-Baqarah ayat 256 yaitu

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ....

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).....

Perlu diingat bahwa dalam Islam saja melarang pemaksaan, jadi menurut guru didakwahi dulu tidak boleh ada pemaksaan. Kecuali kalau memang sudah tegak kekuasaan muslim, namanya juga kekuasaan pasti ada penguasa, penguasa sifatnya memaksa karena dia punya kekuasaan. Kalau kaitannya mengislamkan Indonesia dengan mengenalkan orang-orang Indonesia yang belum mengenal tentang syariat Islam guru lebih setuju. Tapi jika mengislamkan Indonesia dalam arti pemaksaan, hal itu perlu dikoreksi karena pelaksanaan syariat Islam itu luas sekali. Individu dan non individu. Oknum atau gerakan yang ingin mendirikan *khilafah* menggunakan berbagai cara apapun tak peduli cara itu salah atau benar. Pendidikan menjadi salah satu gerbong untuk mereka agar bisa mencari pendukung untuk melancarkan aksinya dalam mendirikan *khilafah*. Dengan begitu, untuk mengantisipasi generasi muda agar tidak terdoktrin oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu, yang dilakukan guru Fiqih yaitu dengan menerapkan metode yang tepat dan efektif ketika menyampaikan materi tentang konsep *khilafah*. Adapun

metode tersebut antara lain mauidhoh hasanah dengan himbauan di awal proses pembelajaran agar siswa jangan sampai mudah terprovokasi oleh gerakan-gerakan yang mengatasnamakan dengan *jihad* atau *khilafah*, jangan sampai terkena atau bahkan bergabung dalam kelompok-kelompok ekstrem yang suka melakukan seperti aksi bom bunuh diri dan yang asal menggembar-gemborkan tentang *khilafah* padahal mereka sendiri tidak paham apa dan bagaimana *khilafah* itu. Karena kondisi siswa yang heterogen memungkinkan adanya perbedaan pendapat di kalangan siswa. Sikap guru yaitu dengan memanggil siswanya lalu guru biarkan siswa tersebut mengungkapkan segala pendapatnya setelah selesai, guru baru meluruskan pemahamannya yang semula keliru. Menjelaskan tentang pengertian dasar *khilafah*, pelaksanaannya di zaman Rasulullah SAW dan setelahnya. Menjelaskan tentang keadaan negara ini juga, agar menggiring pemikirannya tentang pantas tidaknya *khilafah* ada di negara kita. Intinya, guru dalam memberikan penjelasan secara pelan dan selalu mendengarkan apa saja pendapat siswa. Mengenai fenomena da'i instan yang bermunculan di media sosial dan isi ceramahnya seakan menggiring ke arah pendirian sistem *khilafah* di Indonesia, guru memberi tanggapan bahwa da'i harus berilmu dan selama yang dikatakan da'i itu benar



maka tidak masalah. Tapi jika tidak benar, waspada saja. Pokoknya intinya tiap individu itu harus mempelajari agama yang dianutnya dulu agar tidak menjadi korban sosial media seperti ceramah yang isinya belum tentu benar. Jika kita tidak paham dengan agama kita ya pasti kita akan mudah terpengaruh dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggiring pada opini untuk membenci Islam.

Bahasan *jihad* berkaitan dengan *khilafah*. *jihad* dimaknai dengan berjuang. Dalam Fiqih dijelaskan *jihad* itu *jihad qital* artinya berjuang itu berperang. *Jihad* inilah yang sering dipahami oleh oknum-oknum yang kurang belajar tentang sejarah terkhusus sejarah Islam. Padahal *jihad* itu ada beberapa macam tidak hanya *jihad* dengan perang. Ya memang benar *jihad* dengan berperang akan tetapi yang perlu dipahami itu ketika zaman Rasulullah SAW, karena di zaman tersebut ada orang kafir yang memerangi. Tidak untuk zaman sekarang, karena sekarang tidak ada orang kafir dan tidak ada yang memerangi. Tidak ada dalam Islam kita yang memerangi terlebih dahulu. Kita akan berperang jika ada yang memerangi. Perlu diketahui juga di sini tentang klasifikasi orang kafir, tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Hanya yang kategori kafir *harbi* saja yang boleh diperangi. Jadi bagi mereka yang hanya paham *jihad* itu perang, karena mereka belajar agama pada

satu sumber saja sehingga mereka hanya fanatik pada satu sumber yang dipelajarinya saja. *Jihad* memang memberantas kemaksiatan. Akan tetapi caranya dalam memberantas yang perlu diperhatikan. Jangan seketika langsung dengan peperangan itu tidak sesuai etika yang ada dalam hadits Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْرِضْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

Dari Abu Sa'id Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. (H.R Muslim)

Dalam hadits tersebut jelas disebutkan tentang tata cara ketika ada kemunkaran atau kemaksiatan yaitu pertama dengan tangan atau kekuasaan seperti pihak berwajib yang lebih berwenang atau yang lainnya bila belum bisa maka dengan mulut atau dengan nasihat, ceramah akan tetapi jika tetap tidak bisa yang terakhir dengan hati. Itulah selemah-lemahnya Iman. Jadi seperti orang yang melakukan aksi bom bunuh diri, pemahaman *jihadnya* sudah salah lalu cara yang digunakan untuk *jihad* juga salah. Bunuh diri sudah jelas dilarang dalam agama apalagi mereka juga membunuh orang sekitar yang tidak tau apa-apa.

Sedangkan dalam aspek pendidikan, metode yang dipilih guru sebagaimana metode ketika menyampaikan materi tentang konsep *khilafah*. Guru menyampaikan ke siswa bahwa *Jihad* untuk zaman sekarang itu dengan harta. Memberikan contoh *jihad* dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam ormas Muhammadiyah yang ber *jihad* dengan *amwal* atau harta dan tidak semata-mata dengan perang. Kecuali kondisi seperti dulu ketika masa penjajahan itu bisa dinamakan *jihad* dengan harta dan jiwa. Itulah strategi yang guru pilih ketika menyampaikan ke siswa yaitu dengan dakwah, artinya mengajak orang dengan kebaikan. Apabila terdapat perbedaan pendapat dari siswa, guru menyikapinya dengan memberikan beberapa pertanyaan tentang latar belakang siswa memiliki pendapat yang berbeda dan guru mempersilahkan siswa dalam menyelesaikan pendapatnya lalu guru menjelaskan bahwa pemahaman *jihad* mereka itu keliru dan guru juga menjelaskan juga tentang dalil larangan membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang benar, serta memberikan dasar pemahaman bahwa Indonesia bukan zamannya perang atau kekerasan melainkan dakwah. *Jihadnya* itu dengan dakwah. Dakwah dengan ilmunya kecuali jika ada ancaman, kita boleh memerangnya tetapi jika tidak ada yang memerangi ya untuk apa kita berperang dan membunuh.

Guru menerapkan evaluasi dalam bentuk penugasan kepada siswa seperti memerintahkan siswa untuk mencari kitab yang menjelaskan tentang *khilafah* atau *jihad* lalu diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan tujuan agar siswa tidak hanya belajar pada satu buku saja dan tentunya menambah wawasan bagi mereka juga. Pentingnya materi *khilafah* dan *jihad* sehingga membuat guru tidak setuju dengan wacana dari kementerian agama yang akan menghapus materi tersebut. Dikarenakan bagi guru kedua materi itu adalah bagian dari materi keislaman yang harus diketahui oleh siswa.

## NARASI WAWANCARA NARASUMBER VI

**Nama** : Ali Mahmudi, Lc.  
**TTL** : Kudus, 30 September 1980  
**Alamat** : Bendo, Rt.02/Rw. 02,  
Kec. Bae, Kab. Kudus.  
**Pendidikan Akhir** : S1 / Sarjana  
**Jabatan** : Guru Fiqih MA Ma'ahid Kudus  
**Waktu Wawancara** : Senin, 16 Maret 2020,  
pukul. 11.00 – 12.10  
**Tempat Wawancara** : Ruang Kepala MA Ma'ahid  
Kudus

*Khilafah* dikatakan baik secara teori karena merupakan sistem pemerintahan yang sudah disesuaikan dengan zaman Rasulullah SAW dan setelahnya. Sehingga sistem tersebut secara teori dalam konteks waktu itu sudah sesuai dengan Islam serta diatur juga dalam kitab-kitab Fiqih di zaman sekarang. Intinya, *khilafah* itu tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai Islam. Sistem pemerintahan ini, tidak bisa diterapkan untuk zaman sekarang, meski dipaksakan. Hal tersebut didasari dengan sudah jadinya kesepakatan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berdasarkan pada konstitusi UUD 1945 dan dasar negaranya Pancasila. Sehingga ketika ada orang yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan *khilafah* berarti bertentangan dengan cita cita pendiri negara Indonesia. Seperti banyaknya gerakan-gerakan yang berusaha mendirikan sistem pemerintahan *khilafah* , Hizbut

Tahrir Indonesia(HTI), FPI dan semacamnya, dikarenakan mereka mencapai tujuannya dengan cara instan. Yaitu langsung mengganti, merubah dan membuang apa yang sudah menjadi jerih payah para pendiri negara Indonesia dan diganti menjadi *khilafah* menurut versi mereka. *Khilafah* untuk konteks NKRI sangat tidak pas. Mereka ingin membuat negara Indonesia menjadi *khilafah* versi pemahaman mereka. Mereka tidak mengakui cara yang legal dalam pemerintahan kita. Seperti adanya partai politik, mereka tidak mengakui bahkan mengharamkan untuk terjun di dunia politik, padahal mereka di dunia politik. Mereka ingin berkuasa tapi tidak menempuh cara-cara yang diakui di negara Indonesia. Oleh sebab itulah dalam aspek pendidikan, guru sebagai salah satu bagian di dalamnya memiliki metode tersendiri untuk menyampaikan materi tentang *khilafah*. Metode yang guru terapkan ketika menyampaikan materi *khilafah* yaitu *mauidhoh hasanah* atau berceramah. Guru menyampaikan seluruhnya dan apa adanya, sesuai teori yang ada dalam Islam dari mulai definisi, dasar hukum, prinsip-prinsip yang mendasari sampai dengan sejarah pelaksanaan *khilafah* di masa Rasulullah Muhammad SAW dan setelahnya, lalu diberikan penjelasan bahwa secara khusus konteks *khilafah* yang ada pada zaman Rasulullah SAW untuk saat ini belum bisa diterapkan, karena belum sesuai

dengan cita-cita para pendiri negara ini. Negara ini memutuskan menjadi negara kesatuan RI bukan negara *khilafah*. Karena negara ini mengakui tidak hanya satu agama melainkan ada 6 agama. *Khilafah* yang sesuai dengan sejarah Islam saja tidak pas di Indonesia kok ada *khilafah* versi oknum yang pastinya sangat tidak tepat untuk diberlakukan di Indonesia. Adapun ketika ada siswa yang memiliki pemahaman berbeda, bahkan jika ada yang memiliki pemikiran yang melenceng dari syariat, yang dilakukan seorang guru adalah dengan menyampaikan bahwa pendapat siswa yang seperti itu keliru, karena konteks beragama dan bernegara tidak bisa dipisahkan, dan jika dilakukan itu namanya pemaksaan. intinya menanamkan bahwa teori atau konsep *khilafah* itu tidak salah, hanya saja jika diterapkan di Indonesia belum bisa karena alasan di atas, sekaligus tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini. Lalu guru jelaskan se jelas-jelasnya. Biar siswa paham sepenuhnya.

Mengenai fenomena tentang pendakwah-pendakwah instan yang bermunculan di media sosial dengan isi ceramah yang menggiring ke arah pendirian *khilafah*, guru menanggapi bahwa hidup di negara demokrasi itu bebas berpendapat, asalkan pendapatnya tidak menimbulkan konflik publik, mempengaruhi publik, memojokkan

masyarakat tertentu apalagi sampai mendoktrin untuk mendirikan negara *khilafah*. oleh karena itulah dari pihak pemerintah pun diharapkan secara maksimal membubarkan ormas-ormas yang memiliki pemahaman radikal, karena mereka masuk ke dalam zona larangan dan radikal.

Pembahasan mengenai *khilafah* tentunya tak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang *jihad*. Karena bagi oknum radikal yang ingin kembali menegakkan *khilafah* menganggap bagi siapa saja yang tidak mendukungnya maka harus diperangi. Padahal sesungguhnya arti *jihad* bukanlah sekedar perang. *Jihad* artinya bersungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah dibagi menjadi dua, *jihad* secara umum dan *jihad* secara khusus. Secara umum yaitu setiap usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dalam rangka melaksanakan, membela, memperjuangkan agama Islam, baik dengan tenaga, pikiran, harta bahkan nyawa. Misalnya orang ketika ibadah dia bersungguh-sungguh, siswa yang sekolah dengan bersungguh-sungguh, memberi harta pada kaum yg membutuhkan dan masih banyak lagi contohnya. Adapun *jihad* secara khusus yaitu *jihad qital* atau *jihad* dengan angkat senjata. *Jihad* ini ada cara-caranya, dan tata aturannya. Tidak seketika memutuskan akan berperang. Termasuk bagi orang-orang yang memahami *jihad* yaitu memberantas kemaksiatan dan melakukan aksi



bom bunuh diri serta mengatasnamakannya dengan *jihad fi sabilillah* dan dikatakan akan mendapat balasan surga. Guru mengkualifikasikan mereka ke dalam bagian *jihad* ketiga yaitu melawan orang dzolim, akan tetapi bagi masyarakat sipil ini dibatasi kewenangannya oleh perundang-undangan, bila yang bukan aparat tidak bisa melakukan suatu hal yang semauanya seperti menghakimi pelaku. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ يَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

Dari Abu Sa'id Al Khudri radiallyallahuhi berkata : Saya mendengar Rasulullah shallallohu 'alaihi wa sallam bersabda : Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. (H.R Muslim)

Itulah hadits tentang cara mengubah kemunkaran dalam arti *jihad* ketika ada kefasikan atau kedzoliman tetapi caranya harus benar. Adapun jihadnya orang radikal, dengan menghancurkan wilayah yang menurutnya mereka tempat kemaksiatan. Seperti melakukan bom bunuh diri di gereja. Jelas hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia yang mengakui beberapa negara, tidak adanya toleransi pada diri mereka. Sehingga mereka menganggap itu maksiat. Dalam Islam aksi bunuh diri dilarang sama

Allah SWT apalagi dengan melibatkan orang sekitar yang tidak tau apa- apa, sama saja dengan membunuh banyak orang. Padahal jelas dalam firman Allah SWT :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا  
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ

مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan (Q.S al-Isra'/17 : 33).

Ayat di atas mengatakan bahwa janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar kalau seperti itu berarti mereka melakukan larangan Allah SWT, jadi oknum seperti itu jelas melakukan pelanggaran. Dan tentunya balasannya dosa. Guru mengungkapkan pendapat bahwa mereka yang melakukan aksi bom bunuh diri, menurut mereka hal tersebut untuk membela kaum muslimin, agar orang-orang Kristen takut kepada kaum muslimin. Akan tetapi melihat kenyataannya, bukannya takut malah memperburuk citra Islam. mereka menggunakan segala cara untuk *jihad* menurut persepsi sempit mereka. Sebagaimana organisasi ISIS yang juga lagi ramai dibicarakan karena mereka warga

Indonesia yang merupakan mantan anggota ISIS meminta kepada pemerintah untuk dipulangkan ke tanah air. Walau hal tersebut menimbulkan perdebatan karena banyak sudut pandang positif negatif dari beberapa pihak, akhirnya pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan atas dasar dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak.

Dalam lingkup pendidikan, *jihad* juga menjadi salah satu materi yang diajarkan. Metode yang guru terapkan pun sebagaimana metode yang guru gunakan ketika menyampaikan materi tentang *khilafah*, yaitu dengan ceramah. Guru menjelaskan pengertian dari *jihad* secara lengkap dan jelas, menyebutkan macam dari *jihad* itu sendiri disertai dengan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari siswa dengan harapan siswa akan lebih mudah dalam mencerna dan memahami materi tersebut.. Bila ada siswa yang pahamnya hanya tentang *jihad qital*, guru menjelaskan jika itu memang benar akan tetapi guru juga meluruskan dan melengkapi pemahaman siswa bahwa *jihad* tidaklah sekedar perang semata. Saya tekankan bahwa *jihad qital* tidak bisa diterapkan untuk zaman sekarang terutama di negara Indonesia.

Baik strategi dan metode tentang konsep *khilafah* maupun *jihad*, untuk mengetahui seberapa berhasilnya dan efektifnya penggunaan strategi dan metode tersebut, guru

menerapkan evaluasi melalui kuis seperti pretest, penugasan seperti meminta siswa mencari perbedaan antara *jihad* secara umum maupun khusus dan mengadakan ulangan harian. Meski kedua materi tersebut mengandung banyak kerentanan untuk disalah artikan, guru menyikapi wacana dari kementerian agama yang akan menghapus materi *khilafah* dan *jihad* dengan dua jawaban. Guru akan setuju dihapus jika memang adanya alasan khawatir materi ini menjadi sumber adanya pemahaman yang radikal oleh para siswa. Akan tetapi guru tidak akan setuju dengan dihapusnya apabila ada seorang guru yang kurang benar dalam memahami materi ini sehingga berpengaruh pada proses penyampaian kepada siswa, guru lebih setuju jika pihak kementerian agama membenarkan, melengkapi serta meluruskan pemahaman para guru yang menjelaskan materi ini.

## Lampiran III : Berita Acara

### BERITA ACARA

Berikutan telah dilaksanakan wawancara pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 3 Maret 2020  
Tempat : Perpustakaan MAN 2 Kudus

Selaku sumber yang bersangkutan,

Nama : Is'adur Rofiq, S. Ag  
Alamat : Kalipate, Gg. VII Rt. 04/ Rw. II no. 134 Kota Kudus  
Jabatan : Guru Fiqh MAN 2 Kudus

Telah memberikan data dan keterangan guna memenuhi penelitian saudara,

Nama : Fadila Arifatul Fardah  
Lembaga : UIN Walisongo Semarang jurusan PAI  
Judul Skripsi : Konsep Khilafah dan Jihad dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqh Politik Islam ( Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqh MA se - Kabupaten Kudus)

Adapun pertanyaan dan jawaban wawancara sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti  
  
Fadila Arifatul Fardah.

Menasibkan  
  
Is'adur Rofiq, S. Ag.

#### BERITA ACARA

Bahwasanya telah dilaksanakan wawancara pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 4 Maret 2020  
Tempat : Ruang BPPMNU MA NU Banat Kudus

Selaku sumber yang bersangkutan,

Nama : Des. Subhan, M.Pd.I  
Alamat : Karangdowo, Bae, Kudus  
Jabatan : Guru Fiqh MA NU Banat Kudus

Telah memberikan data dan keterangan guna memenuhi penelitian saudara,

Nama : Fadila Arifatul Fardah  
Lembaga : UIN Walisongo Semarang jurusan PAI  
Judul Skripsi : **Konsep *Khalifah* dan *Jihad* dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqh Politik Islam ( Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqh MA se - Kabupaten Kudus)**

Adapun pertanyaan dan jawaban wawancara sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti



Fadila Arifatul Fardah,

Narasumber



Des. Subhan, M.Pd.I.

### BERITA ACARA

Dikawatannya telah dilaksanakan wawancara pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 7 Maret 2020  
Tempat : Ruang BK MAN 2 Kudus

Selaku sumber yang bersangkutan,

Nama : Ali Mustan, S.Pd.I  
Alamat : Kedungari, Rt.02/Rw. II, Gebog, Kudus.  
Jabatan : Guru Fiqh MAN 2 Kudus

Telah memberikan data dan keterangan guna memenuhi penelitian saudara,

Nama : Fadila Arfanul Fardah  
Lembaga : UIN Walisongo Semarang jurusan PAI

Judul Skripsi : **Konsep Ahlulqul dan Jihad dalam Konsultasi Pembelajaran Fiqh Politik Islam ( Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqh MA se - Kabupaten Kudus)**

Adapun pertanyaan dan jawaban wawancara sebagaimana terlampir.

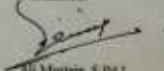
Demikian berita acara ini dibuat untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti



Fadila Arfanul Fardah

Seorang sumber



Ali Mustan, S.Pd.I

## BERITA ACARA

Bahwasanya telah dilaksanakan wawancara pada

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Maret 2020

Tempat : Ruang Kepala Madrasah Aliyyah Muhammadiyah Kudus

Selaku sumber yang bersangkutan,

Nama : H. Subatono, S.Ag., S.Pd.I.

Alamat : Ds. Undaan Lor, Gg. 24, Rt.01/Rw.04, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus

Jabatan : Guru Fiqh MA Muhammadiyah Kudus

Telah memberikan data dan keterangan guna memenuhi penelitian saudara,

Nama : Fadila Arfatul Fardah

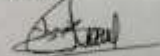
Lembaga : UIN Walisongo Semarang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PAI

Judul Skripsi : **Konsep Khilafah dan Jihad dalam Konstetasi Pembelajaran Fiqh Politik Islam ( Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqh MA se - Kabupaten Kudus)**

Adapun pertanyaan dan jawaban wawancara sebagaimana terlampir.

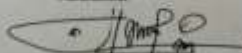
Demikian berita acara ini dibuat untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Penciri



Fadila Arfatul Fardah

Narasumber



H. Subatono, S.Ag., S.Pd.I



## BERITA ACARA

Bahwasanya telah dilaksanakan wawancara pada

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Maret 2020

Tempat : Ruang Kepala Madrasah Aliyyah Muhammadiyah Kudus

Selaku sumber yang bersangkutan,

Nama : Riyadi, S.Pd.I.

Alamat : Ds. Ngaringan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

Jabatan : Guru Fiqh MA Muhammadiyah Kudus

Telah memberikan data dan keterangan guna memenuhi penelitian saudara,

Nama : Fadila Arifatul Fardah

Lembaga : UIN Walisongo Semarang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PAI

Judul Skripsi : **Konsep *Khilafah* dan *Jihad* dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqh Politik Islam ( Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqh MA se - Kabupaten Kudus)**

Adapun pertanyaan dan jawaban wawancara sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti



Fadila Arifatul Fardah

Marasumber



Riyadi, S.Pd.I.

#### BERITA ACARA

Berikutnya telah dilaksanakan wawancara pada

Hari : Senin  
Tanggal : 16 Maret 2020  
Tempat : Kantor Guru MA Ma'ahid Kudus

Selaku sumber yang bersangkutan,

Nama : Ali Mahmudi, Lc.  
Alamat : Bendu Rt.02/ Rw.02, Kecamatan Ilas, Kabupaten Kudus  
Jabatan : Guru Fiqh MA Ma'ahid Kudus

Telah memberikan data dan keterangan guru mengenai penelitian saudara,

Nama : Fadila Arifatul Fardah  
Lembaga : UIN Walisongo Semarang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PAI  
Judul Skripsi : **Konsep *Khilafah* dan *Jihad* dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqh Politik Islam ( Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqh MA se - Kabupaten Kudus)**

Adapun pertanyaan dan jawaban wawancara sebagaimana terlampir.

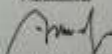
Demikian berita acara ini dibuat untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti



Fadila Arifatul Fardah

Narasumber



Ali Mahmudi, Lc.

## Lampiran IV : Foto Dokumentasi

### Foto Kegiatan Wawancara



Wawancara dengan Bpk. Is'adur Rofiq,S.Ag.  
(Guru Fiqih MAN 2 Kudus)



Wawancara dengan Bpk. Drs. Subhan,  
M.Pd.I. (Guru Fiqih MA NU Banat Kudus)



Wawancara dengan Bpk. Ali Mustain,  
S.Pd.I. (Guru Fiqih MAN 2 Kudus)



Wawancara dengan Bpk. H. Suhartono, S.Ag., S.Pd.I.  
(Guru Fiqih MA Muhammadiyah Kudus)



Wawancara dengan Bpk. Riyadi, S.Pd.I.  
(Guru Fiqih MA Muhammadiyah Kudus)



Wawancara dengan Bpk. Ali Mahmudi, Lc.  
(Guru Fiqih MA Ma'ahid Kudus)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jl. Prof. Dr. Ronggo (Kampus II) Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7612390/7613337 Semarang 50131

Nama	B-1019/ Uin. 10.3/ D.1/ TL.00.02.2020	Semarang, 17 Februari 2020
Lamp	-	
Hai	Mohol (an Riniat	
K.B	Fadhla Arifind Fadhah	
NIM	1603016108	

Kepada Yth  
Guru Mapel Fiqh  
Di Tempat

Assalamu alaikum, Wa, Wa,

Diberitahukan dengan hormat dalam rangka penilaian skripsi, bersama ini kami hadapkan mahasiswa:

Nama : Fadhla Arifind Fadhah  
NIM : 1603016108  
Alamat : Di Prambutan Lor, Rt 02/ Rw. II. Km. Kalibaru, Kab. Kudus  
Judul Skripsi : "Konsep Khilafah dan Jihad dalam Konteks Pendidikan Fiqh Politik Islam (Studi atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqh MA se-Kabupaten Kudus)"

Persembahkan  
1. H. Ahmad Muchtar, M.Ag

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya yang bersangkutan di berikan izin riset dan diikutkan data dengan tema/judul skripsi sebagaimana tersebut diatas selama 2 minggu, mulai tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan 8 Maret 2020.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.  
Wassalamu alaikum, Wa, Wa,

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Mubhal Junaedi, M. Ag  
NIP. 69060320199031004

Tertutupan  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

## **RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Fadila Arifatul Fardah
2. Tempat & Tanggal Lahir : Kudus, 25 Januari 1998
3. Alamat Rumah : Desa Prambatan Lor, Rt.02/  
Rw.02 Kec. Kaliwungu  
Kab. Kudus
4. No. Hp : 085722240702
5. Email : fadilafardah@yahoo.com

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. TK NU Banat Kudus : lulus tahun 2004
2. MI NU Banat Kudus : lulus tahun 2010
3. MTs Negeri 1 Kudus : lulus tahun 2013
4. MA Negeri 2 Kudus : lulus tahun 2016
5. UIN Walisongo Semarang : angkatan 2016